



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN



www.sumsel.kemenkumham.go.id 

Kanwil Kemenkumham Sumsel 

@kumhamsumsel  

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2022 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kanwil Kemenkumham Sumsel atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2022. Suatu instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan sebagai upaya mewujudkan misi organisasi. Guna mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, Instansi Pemerintah merangkum capaian kinerja yang telah ditargetkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Hal tersebut sebagai perwujudan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja dan keuangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan menyusun laporan kinerja yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai laporan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja, target kinerja serta capaian kinerja selama Tahun 2022 dalam melakukan misi dan tujuan organisasi baik yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022. Sebagai suatu harapan bersama bahwa dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat melakukan optimalisasi peran Kantor Wilayah Sumatera Selatan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan pada tahun selanjutnya sehingga mendukung kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mewujudkan Good Governance, Clean Governance, serta tetap dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Adapun bentuk penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian laporan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Kepala Kantor Wilayah,



Ilham Djaya
NIP 196412201991031002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Birokrasi pemerintahan juga memiliki fungsi terkait penyelenggaraan pelayanan publik di masyarakat dan aparatur negara. Melalui birokrasi, diharapkan terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan publik.

Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Hukum dan HAM, terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sekretariat Jenderal					
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,92	126,45%
Ditjen Pemasarakan					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	35%	43,75%
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80%	73,4%	91,75%
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	80%	23,67%	29,59%
2.	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	65%	104%	160%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	102%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100%	125%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%	149%	186%
		Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	100%	666,66%
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	17%	61%

		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	58,5%	88%
		Jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang	30 orang	100%
3.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	97%	135%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	100%	166%
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	64%	128%
		Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	63%	105%
		Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	30,4%	101%
5.	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	75%	100%
		Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
		Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80%	100%	125%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	80,4%	100,5%
6.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	125%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	86%	123%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	125%
7.	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	86%	123%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%

		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	88,5%	126%
Ditjen Imigrasi					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,20 Indeks	3,97	124%
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,12 Indeks	3,76	120%
Ditjen AHU					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-0,37%	-7,4%
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	84%	100%	119,04%
Ditjen KI					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	27 permohonan	123 Permohonan	451%
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus	1 Lokus	100%
2	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%	100%	100%
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus	2 Lokus	100%
		Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	2 laporan	2 Laporan	100%
Ditjen PP					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125%
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	23 orang	23 orang	100%

BPHN					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	100%	123,45%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	100%	125%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	67%	87,45%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	100%
		Persentase anggota JDHNN yang berpartisipasi aktif	20%	100%	500%
Ditjen HAM					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	17 Instansi Pemerintah (Kab/Kota)	850 %
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah (Kab/Kota)	150 %
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui Pelayanan Publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	28 Instansi (27 UPT dan 1 Kantor Wilayah)	1.400 %
	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	3 Rekomendasi	9 Rekomendasi	300%
Balitbang HAM					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80%	100%	125%
		Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	100%

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022, telah ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pagu Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp324.657.162.000. Selama tahun 2022, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah mengalami beberapa kali revisi yang menyebabkan pagu akhir jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menjadi Rp334.969.184.000 dengan realisasi anggaran Rp331.525.085.193 atau sebesar 98,97%. Realisasi anggaran ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 98,26%.



Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	12
D. ASPEK STRATEGIS	12
E. ISU STRATEGIS.....	12
F. SISTEMATIKA LAPORAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA	21
B. REALISASI ANGGARAN	90
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	101
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	107
E. PENGHARGAAN-PENGHARGAAN.....	160
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	163
B. RENCANA TINDAK LANJUT	163

DAFTAR TABEL

1. Tugas dan Fungsi Kanwil Kemenkumham Sumsel	3
2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel.....	10
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
4. Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal/Divisi Administrasi Tahun 2022	21
5. Survei Tingkat Kepuasan Layanan Internal	22
6. Komponen Survei Kepuasan Layanan Internal	23
7. Penyerapan Anggaran.....	27
8. Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal – Divisi Administrasi Year on Year	27
9. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan – Divisi Pemasyarakatan Tahun 2022.....	27
10. Capaian Indikator Kinerja 1 Divisi Pemasyarakatan.....	30
11. Capaian Indikator Kinerja 2 Divisi Pemasyarakatan.....	31
12. Capaian Indikator Kinerja 3 Divisi Pemasyarakatan.....	32
13. Capaian Indikator Kinerja 4 Divisi Pemasyarakatan.....	32
14. Capaian Indikator Kinerja 5 Divisi Pemasyarakatan.....	33
15. Capaian Indikator Kinerja 6 Divisi Pemasyarakatan.....	34
16. Capaian Indikator Kinerja 7 Divisi Pemasyarakatan.....	35
17. Capaian Indikator Kinerja 8 Divisi Pemasyarakatan.....	35
18. Capaian Indikator Kinerja 9 Divisi Pemasyarakatan.....	36
19. Capaian Indikator Kinerja 10 Divisi Pemasyarakatan.....	37
20. Capaian Indikator Kinerja 11 Divisi Pemasyarakatan.....	38
21. Capaian Indikator Kinerja 12 Divisi Pemasyarakatan.....	38
22. Capaian Indikator Kinerja 13 Divisi Pemasyarakatan.....	39
23. Capaian Indikator Kinerja 14 Divisi Pemasyarakatan.....	40
24. Capaian Indikator Kinerja 15 Divisi Pemasyarakatan.....	41
25. Capaian Indikator Kinerja 16 Divisi Pemasyarakatan.....	42
26. Capaian Indikator Kinerja 17 Divisi Pemasyarakatan.....	42
27. Capaian Indikator Kinerja 18 Divisi Pemasyarakatan.....	43
28. Capaian Indikator Kinerja 19 Divisi Pemasyarakatan.....	44
29. Capaian Indikator Kinerja 20 Divisi Pemasyarakatan.....	45
30. Capaian Indikator Kinerja 21 Divisi Pemasyarakatan.....	45
31. Capaian Indikator Kinerja 22 Divisi Pemasyarakatan.....	46
32. Capaian Indikator Kinerja 23 Divisi Pemasyarakatan.....	47
33. Capaian Indikator Kinerja 24 Divisi Pemasyarakatan.....	47
34. Capaian Indikator Kinerja 25 Divisi Pemasyarakatan.....	48
35. Capaian Indikator Kinerja 26 Divisi Pemasyarakatan.....	49
36. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan – Divisi Pemasyarakatan Year on Year	50
37. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Keimigrasian – Divisi Imigrasi 2022	52
38. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian.....	53
39. Capaian Perjanjian Kinerja Divisi Keimigrasian Year on Year	54
40. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2022	55
41. PNBP AHU pada Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dan 2022	55
42. Data Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022	57
43. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Year on Year	58
44. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022	58

45. Data Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Merek Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022.....	59
46. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Year on Year	66
47. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022	66
48. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Year on Year	68
49. Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah Sumatera Selatan Tahun 2022	68
50. Target dan Realisasi Terselenggaranya Fasilitasi Perencanaan Serta Pemantauan dan Peningjauan/Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah.....	69
51. Bantuan Hukum Litigasi	70
52. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi.....	70
53. Bantuan Hukum Non Litigasi.....	70
54. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi.....	70
55. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	71
56. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	72
57. Target dan Realisasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah	72
58. Persentase Anggota JDIH yang Berpartisipasi Aktif.....	72
59. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.....	74
60. Capaian Kinerja BPHN Year on Year.....	80
61. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2022	80
62. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Year on Year.....	87
63. Capaian Kinerja Balitbang HAM Tahun 2022	87
64. Capaian Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	88
65. Capaian Kinerja Balitbang HAM Year on Year.....	89
66. Organisasi Bantuan Hukum Sumatera Selatan	90
67. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal/Divisi Administrasi.....	90
68. Realisasi Anggaran Divisi Pemasarakatan	91
69. Realisasi Anggaran Divisi Keimigrasian	91
70. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal AHU.....	92
71. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	92
72. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.....	92
73. Realisasi Anggaran BPHN	92
74. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal HAM	93
75. Realisasi Anggaran Balitbang Hukum dan HAM	93
76. Rincian Revisi DIPA.....	94
77. Realisasi Anggaran Pada Jajaran Kantor Wilayah Sumatera Selatan.....	97
78. Nilai Efisiensi Pada Jajaran Kantor Wilayah Sumatera Selatan.....	99
79. Rekapitulasi Nilai SMART Tahun 2022	102
80. Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022	106
81. Capture E-Monev Bappenas	147

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Sekretaris Jenderal
2. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan
3. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jenderal Keimigrasian
4. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jenderal AHU
5. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
6. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundangan
7. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jenderal HAM
8. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Balitbang Hukum dan HAM
9. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala BPHN
10. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Divisi Administrasi
11. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Divisi Pemasarakatan
12. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Divisi Keimigrasian
13. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
14. Surat Permintaan LKjIP Tahun 2022
15. Nota Dinas Permintaan LKjIP Tahun 2022
16. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2022
17. SOP Pengumpulan Data Kinerja
18. SOP Penyusunan Laporan Kinerja



A. Latar Belakang

Perwujudan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, serta sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah. Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila penyelenggaraannya menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratisasi, efisiensi, efektivitas dan penegakan supremasi hukum.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, dalam konteks perwujudan visi dan misi serta tujuan Kementerian Hukum dan HAM, peran dan andil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah. Dalam kondisi demikian, kinerja birokrasi pemerintah yang unggul menjadi suatu keharusan serta selalu menjadi perhatian publik.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai fungsi melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan; pembinaan dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia; penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual; perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia; pelayanan hukum; pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi Hak Asasi Manusia; pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terletak di

Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 berdekatan dengan Pengadilan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berada di 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota yaitu : (1) Ogan Komering Ilir; (2) Ogan Komering Ulu; (3) Muara Enim; (4) Lahat; (5) Musi Rawas; (6) Musi Banyuasin; (7) Banyuasin; (8) OKU Selatan; (9) OKU Timur; (10) Ogan Ilir; (11) Empat Lawang; (12) Palembang; (13) Prabumulih; (14) Pagaralam; (15) Lubuk Linggau; (16) Penukal Abab Lematang Ilir; (17) Musi Rawas Utara.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibutuhkan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. LKjIP adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai penjabaran dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah telah membuat petunjuk teknis berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan memiliki 11 (sebelas) Unit Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan merupakan perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat melalui 4 program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Pembentukan Regulasi;
3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;
4. Program Pemajuan dan Penegakan HAM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi yang berada dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi.

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Wilayah.

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Kanwil Kemenkumham Sumsel

TUGAS	FUNGSI
<p>Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAK Asasi Manusia R.I dan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; b. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum; c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum; d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat; e. Penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah; g. Konsultasi dan bantuan hukum; h. Pengordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Adapun fungsi dari Divisi Administrasi adalah:

- a) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c) Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d) Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e) Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri dari 2 bagian, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagian Umum:

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Bagian Umum terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan Rumah Tangga :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

2. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat :

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas fungsi antara lain:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama pelayanan pengaduan;
- d. Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) Subbagian yaitu:

a. Subbagian Program dan Pelaporan:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

b. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi:

Melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

Divisi Pemasyarakatan :

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah.

Adapun fungsi dari Divisi Pemasyarakatan adalah:

- a) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban;
- c) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan;
- d) Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari 2 bidang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan

barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Terdiri dari 2 (dua) sub bidang yaitu:

a. Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi.

b. Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

2. Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama.

b. Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

Divisi Keimigrasian :

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Jenderal Imigrasi di wilayah.

Adapun fungsi Divisi Keimigrasian adalah:

- a) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;

- c) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian;
- d) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 bidang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian :

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a. Subbidang Perizinan Keimigrasian:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan keimigrasian.

b. Subbidang Informasi Keimigrasian :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

2. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian :

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a. Subbidang Intelijen Keimigrasian :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

b. Subbidang Penindakan Keimigrasian :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM :

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.

Adapun fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM adalah:

- a) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdiri dari 3 bidang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bidang Pelayanan Hukum :

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

b. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

2. Bidang Hukum :

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

b. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

3. Bidang Hak Asasi Manusia :

Bidang HAM mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Bidang Hak Asasi Manusia Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu :

a. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia.

b. Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

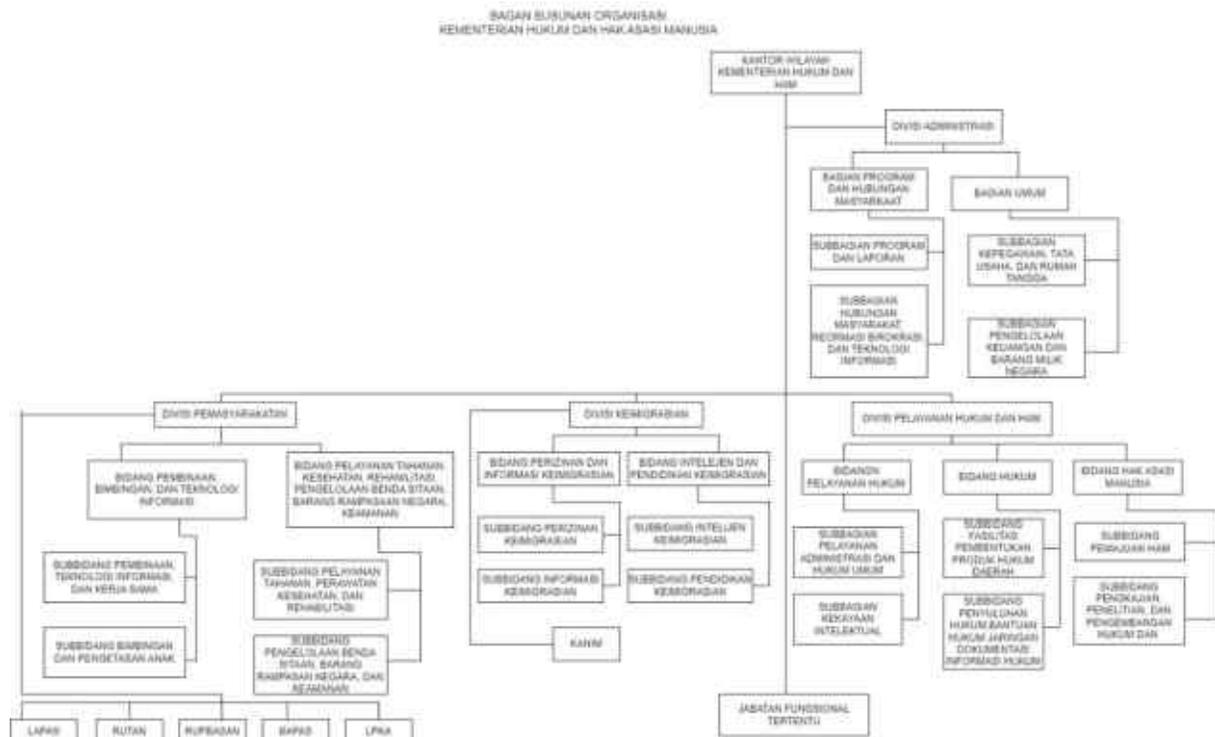
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan memiliki pegawai sebanyak 195 orang. Di samping itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan memiliki 28 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 26 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan 2 Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian.

Tabel 2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel

No.	Satuan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	117	77	194
2	LAPAS KELAS I PALEMBANG	103	12	115
3	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG	67	24	91
4	LAPAS KELAS IIA LAHAT	60	8	68
5	LAPAS KELAS IIA LUBUK LINGGAU	50	16	66
6	LAPAS KELAS IIB MUARA ENIM	79	8	87
7	LAPAS KELAS IIB SEKAYU	64	5	69
8	LAPAS KELAS IIA TANJUNG RAJA	78	11	89

No.	Satuan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
9	RUTAN KELAS IIB BATURAJA	37	6	43
10	RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH	57	13	70
11	RUTAN KELAS I PALEMBANG	115	16	131
12	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG	52	41	93
13	RUPBASAN KELAS I PALEMBANG	19	14	33
14	RUPBASAN KELAS II BATURAJA	9	5	14
15	KANIM KELAS I TPI PALEMBANG	48	37	85
16	KANIM KELAS II NON TPI MUARA ENIM	27	8	35
17	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT	26	8	34
18	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG	17	79	96
19	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MUSI RAWAS UTARA	17	7	24
20	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II OGAN KOMERING ULU INDUK	15	7	22
21	LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	74	11	85
22	LAPAS KELAS IIB KAYU AGUNG	77	10	87
23	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	74	12	86
24	LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG	32	4	36
25	LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS	29	3	32
26	LAPAS KELAS III PAGAR ALAM	42	7	49
27	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	60	9	69
28	LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	42	4	46
29	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	86	9	95
TOTAL		1.573	471	2.044

Berikut ini merupakan struktur organisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Aspek Strategis

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan mempunyai fungsi melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan; pembinaan dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia; penegakan hukum di bidang masyarakat, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual; perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia; pelayanan hukum; pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi hak asasi manusia; pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan merupakan perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat.

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaannya, mengingat kondisi umum potensi dan permasalahan dan pemetaan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan organisasi, terdapat beberapa isu strategis yang terdiri dari kekuatan atau peluang dan juga kelemahan dan tantangan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Adapun hal-hal yang menjadi kekuatan atau peluang yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan memiliki jenis pelayanan publik yang cukup bervariasi, mempunyai peran koordinasi dan fasilitasi dalam aspek perencanaan dan pembentukan hukum, penyelenggaraan pelayanan hukum, penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja kementerian, serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja. Sedangkan hal-hal yang menjadi kelemahan serta ancaman di antaranya ialah komitmen melayani dari para pegawai yang masih perlu ditingkatkan, kualitas dan

kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu dimaksimalkan, serta adanya kondisi pandemi Covid-19.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut.

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2022, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2022 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang efektif dan efisien, agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi untuk mencapai sasaran strategis yang telah disusun.

Adapun visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu:

Visi :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi :

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan public di bidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung penegakan hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah PASTI yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Adapun sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di antaranya ialah:

- a. Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- b. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- f. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
- g. Meningkatnya kesadaran hokum dan pemajuan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat dan masyarakat dan aparaturnya;
- h. Meningkatnya SDM kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia yang unggul dan berdaya saing;
- i. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan;
- j. Meningkatkan efektivitas organisasi;
- k. Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan Hak Asasi Manusia;
- l. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan telah memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disusun guna membantu mewujudkan sasaran-sasaran secara tepat, terukur, dan akuntabel. Perjanjian tersebut berisi indikator kinerja utama yang dapat menjadi alat bantu ukur.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melaksanakan 9 urusan sebagai turunan dari Unit Eselon I yakni sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
6. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Direktorat Jenderal Keimigrasian;
9. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

B. Perjanjian Kinerja

Secara definisi, perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan berisikan penugasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan yang memiliki 4 (empat) divisi, pada tahun 2022 ini telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah. Dokumen perjanjian tersebut berisikan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah sebagai pemberi amanah kepada para Kepala Divisi dalam hal ini Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keempat divisi tersebut sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sasaran yang sesuai dengan Unit Eselon I masing-masing. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2022 dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Adapun rincian perencanaan kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang perlu dicapai yang berdasarkan perjanjian kinerja Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Setjen - Divisi Administrasi			
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks
Ditjen Pas - Divisi Pemasarakatan			
1	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80%
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	80%
2	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	65%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%
		Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
		Jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi	30 orang
3	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
4	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
5	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	80%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
7	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	80%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
Ditjen Imigrasi - Divisi Keimigrasian			
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,20 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,12 Indeks
Direktorat Jenderal AHU			
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	84%
Direktorat Jenderal KI			
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah	27 permohonan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus
2	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus
		Kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di wilayah	2 laporan
Direktorat Jenderal PP			
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	23 orang
BPHN			
1	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase anggota JDHNN yang berpartisipasi aktif	20%
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia			
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 instansi pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	2 instansi pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 instansi pemerintah
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	3 rekomendasi
Balitbang HAM			
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80%
		Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku

Untuk melakukan pemantauan terhadap capaian indikator kinerja secara *real time*, sejak tahun 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah meluncurkan aplikasi e-performance sebagai alat untuk melakukan monitoring kinerja jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, yang dapat diakses melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id> .

Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase capaian terdapat dua rumus, yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Secara keseluruhan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2022 telah tercapai sebagaimana berikut.

1. Sekretariat Jenderal – Divisi Administrasi

Adapun target dan realisasi capaian kinerja Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal/Divisi Administrasi Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,92	126,45%

Sasaran: Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan

Capaian sasaran terselenggaranya terhadap peningkatan Layanan Dukungan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melalui Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dapat diukur menggunakan survei indeks integritas internal organisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan yang dilakukan setiap bulan melalui laman www.survei.balitbang.go.id dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Survei Tingkat Kepuasan Layanan Internal

NO	PERIODE	SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI
1.	JANUARI 2022	3,98
2.	FEBRUARI 2022	3,99
3.	MARET 2022	3,99
4.	APRIL 2022	3,89
5.	MEI 2022	3,90
6.	JUNI 2022	3,91
7.	JULI 2022	3,90
8.	AGUSTUS 2022	3,90
9.	SEPTEMBER 2022	3,91
10.	OKTOBER 2022	3,92
11.	NOVEMBER 2022	3,84
12.	DESEMBER 2022	3,93
RATA-RATA		3,92

Penilaian survei kepuasan layanan internal tersebut terdiri dari beberapa komponen, di antaranya:

Tabel 6. Komponen Survei Kepuasan Layanan Internal

Indikator	Variabel
Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi (Index Sistem Anti Korupsi)	Transparansi
	Menerima Imbalan
	Perlakuan yang Sama
	Prosedur
	Privasi Pelapor
	Proses Pelanggaran
	Pencegahan Korupsi
Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM (Index SDM)	Penerimaan Pegawai
	Penempatan
	Promosi Jabatan
	Pengembangan Kompetensi
	Kenaikan Pangkat
	Gaji
	Presensi Pegawai
Integritas dan Pelaksanaan Anggaran (Index Anggaran)	Perjalanan Dinas
	PBJ
	Honorarium
	Bukti Transaksi
Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma (Index Aturan dan Norma)	Tanggung Jawab
	Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan
	Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan
	Kode Etik

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Administrasi secara baik telah menunjang keberhasilan Kantor Wilayah Sumatera Selatan dalam memberikan layanan dukungan manajemen. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yang telah memenuhi target.

Dalam hal layanan kepegawaian dan tata usaha, keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni layanan kenaikan pangkat, mutasi, pembuatan kartu pegawai, kartu peserta Taspen, Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Istri (Karis), pengurusan Satya Lencana, rekomendasi tugas belajar dan izin belajar, pengajuan pensiun, hukuman disiplin, absensi dan layanan persuratan atau sistem surat masuk dan keluar melalui Sumaker, serta pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Selatan yang telah

terinternalisasi *Corporate University* maupun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan melalui *e-learning*.

PENERIMAAN PEGAWAI	:	0 ORANG CPNS
PROMOSI	:	19 ORANG
USUL PROMOSI	:	110 ORANG KANWIL DAN UPT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI	:	-
		1. Kenaikan Pangkat Reguler: 671
		2. Kenaikan Pangkat Struktural: 39
		3. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:
KENAIKAN PANGKAT	:	25
		4. Kenaikan Pangkat JF:
		-Lokal 24
		-Pusat 9

Adapun faktor yang menunjang keberhasilan layanan keuangan yang akurat dan akuntabel, Kantor Wilayah Sumatera Selatan telah melakukan:

- a) Membuat laporan pertanggungjawaban bendahara per bulan;
- b) Monitoring pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) dengan verifikasi berjenjang;
- c) Mengelola perpajakan baik PPh 22, 23 maupun PPN;
- d) Melakukan rekonsiliasi eksternal dengan Kementerian Keuangan melalui e-rekon;
- e) Mengadakan kegiatan pra rekonsiliasi antara Kantor Wilayah dan Satuan Kerja secara *virtual*;
- f) Mengadakan kegiatan rekonsiliasi nasional antara Kantor Wilayah dengan Eselon1;
- g) Monitoring IKPA dan penyerapan anggaran.

Tercapainya target layanan BMN pada Kantor Wilayah Sumatera Selatan didukung oleh:

- a) Mengadakan kegiatan rekon BMN baik pra rekon maupun rekon nasional secara *virtual*;
- b) Mengadakan monitoring dan evaluasi pengendalian BMN di Satuan Kerja maupun Kantor Wilayah;
- c) Pelaksanaan Revaluasi penilaian BMN untuk memberikan nilai wajar pada BMN;
- d) Pelaksanaan penertiban penggunaan akun persediaan dan BMN yang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e) Melaksanakan pengajuan Status Penggunaan BMN agar BMN bisa digunakan dan dimanfaatkan.

Dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi dan meningkatkan citra positif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Sumatera Selatan telah

melakukan penyebaran informasi melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, dan juga website resmi www.sumsel.kemenkumham.go.id yang bisa diakses oleh publik. Kantor Wilayah Sumatera Selatan juga melakukan publikasi melalui media cetak dan media online.

- Total publikasi di website sepanjang tahun 2022: **556** berita;
- Total publikasi melalui Instagram dan Facebook: **313** konten;
- Total publikasi melalui Twitter sebanyak **24.620** tweet;
- Total publikasi melalui stasiun TV: **0** siaran;
- Total publikasi melalui siaran radio: **10** siaran;
- Total kampanye publik melalui penyuluhan hukum ke masyarakat: **121** penyuluhan;
- Melaksanakan giat 'Kumham Peduli, Kumham Berbagi' membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19;
- Melakukan publikasi narasi tunggal, infografis, dan videografis, serta membuat buletin Kantor Wilayah berjumlah **4** buletin kinerja per tahun, ditambah buletin Zona Integritas;
- Bersinergi dengan media eksternal terkait publikasi kantor wilayah secara cetak maupun online, diantaranya:
 1. LKBN ANTARA Biro Sumsel;
 2. PT Sumsel Media Grafika (Tribun Sumsel);
 3. PT Radar Citra Media (Sumeks.co);
 4. PT Media Nawacita Indonesia;
 5. PT Cipta Megaswara Televisi (Kompas.tv);
 6. PT Trans Digital Media (detik.com);
 7. PT Indo Group Intermedia (Indodaily.co);
 8. PT Rakyat Sulsel Intermedia (rakyatsulsel.co);
 9. PT Media Sriwijaya Anugerah (mediasriwijaya.com);
 10. PT Media Sumsel Indonesia (sumseltoday.com).

Di samping itu, Kanwil Kemenkumham Sumsel telah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, beberapa di antaranya ialah:

- a. Berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan;
- b. Berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait penegakan hukum di wilayah Sumatera Selatan, antara lain Polda Sumsel, Kejaksaan Tinggi Sumsel, BNNP Sumsel, Pengadilan Tinggi Palembang, BINDA Sumsel dan Kodam II/Sriwijaya.
- c. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah;
- d. Menerima Audiensi dari mitra kerja Kantor Wilayah.

Dalam rangka mewujudkan layanan reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, beberapa kegiatan telah dilaksanakan, di antaranya ialah:

- Menggelar Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas yang diikuti secara berturut-turut oleh seluruh satuan kerja Sumatera Selatan;
- Membentuk Agen Perubahan dan Tunas Integritas guna menjadi *role model* dalam kegiatan Kanwil Kemenkumham Sumsel;
- Mengadministrasikan laporan, mengunggah data dukung serta memverifikasi RKT RB dan LKE ZI setiap triwulan satuan kerja pada aplikasi e-RB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Melakukan studi tiru pembangunan Zona Integritas ke Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta dan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam rangka progres pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Kepala Kantor Wilayah mengeluarkan Nota Dinas Penunjukan Kepala Divisi sebagai Pembina Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM;
- Melakukan penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta melakukan monitoring dan pendampingan pada satuan kerja yang berproses menuju WBK/WBBM;
- Mendampingi Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang dalam Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB. LPP Palembang menjadi satu-satunya Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional dari total 25 Satuan Kerja Kemenkumham se-Indonesia
- Telah disusunnya dokumen Penerapan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Membentuk Tim Satuan Tugas SPIP dan Tim Asesor SPIP tahun 2022 guna memastikan terselenggaranya SPIP di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan;
- Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel yang menghasilkan skor 4,12 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 4 (Terkelola dan Terukur);
- Menerima kunjungan Inspektur Jenderal Kemenkumham RI dalam rangka Program 3M (Menyapa, Mengajarkan dan Menyadarkan) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan;
- Bersama Inspektorat Jenderal, melakukan reuiu dan pendampingan Tunas Integritas ke Satuan Kerja Sumatera Selatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dan pemberian layanan yang maksimal kepada masyarakat, Kantor Wilayah Sumatera Selatan telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai seperti peralatan kantor, penyediaan ruang pelayanan, ruang pengaduan, ruang laktasi, *smoking room*, serta fasilitas penunjang disabilitas.

Hambatan dan Kendala Dalam Pelaksanaan Kinerja

Dengan adanya kebijakan *automatic adjustment* (pemblokiran anggaran) anggaran tahun 2022, menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran menjadi kurang optimal. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan yang tidak mencapai target maksimal.

Tabel 7. Penyerapan Anggaran

Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Target Nasional	25%	50%	80%	100%
Realisasi	18,95%	47,49%	75,61%	98,97%

Dengan adanya kebijakan *automatic adjustment* anggaran ini, apabila pada tahun selanjutnya masih menggunakan kebijakan yang sama maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan akan menerapkan strategi dengan melakukan revisi anggaran yang tidak terkena pemblokiran dan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran menjadi lebih optimal dan target realisasi anggaran tercapai.

Tabel 8. Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal/Divisi Administrasi Year on Year

INDIKATOR KINERJA		2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,93	126,77%	3,1	3,92	126,45 %

2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan

Tabel 9. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan Tahun 2022

Ditjen Pemasyarakatan					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	35%	43,75%

Ditjen Pemasyarakatan					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80%	73,4%	91,75%
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	80%	23,67%	29,59%
2.	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	65%	104%	160%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	102%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100%	125%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%	149%	186%
		Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	100%	666,66%
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	17%	61%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	58,5%	88%
		Jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang	30 orang	100%

Ditjen Pemasyarakatan					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	97%	135%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	100%	166%
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	64%	128%
		Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	63%	105%
		Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	30,4%	101%
5.	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	75%	83%
		Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
		Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80%	100%	125%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	80,4%	100,5%
6.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	125%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	86%	123%

Ditjen Pemasyarakatan					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	bidang keamanan dan ketertiban	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	125%
7.	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	86%	123%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	88,5%	126%

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja:

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja I Divisi Pemasyarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	80%	35%	43,75%

$$\% \text{ Menurunnya Tahanan Yang Overstaying} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan Overstaying

B = Jumlah Tahanan

Untuk tahanan yang Overstaying berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh melalui website E-Performance dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Menurunnya Tahanan Yang Overstaying} = \frac{720}{2044} \times 100\% = 35\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{35\%}{80\%} \times 100\% = 43,75\%$$

Kendala/Hambatan

Dalam melaksanakan indikator kinerja ini, terdapat kendala yang dihadapi UPT Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Sumatera Selatan yakni sering terlambatnya administrasi dokumen untuk perpanjangan masa penahanan sehingga menyebabkan capaian kinerja pada indikator ini tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan penegak hukum terkait terhadap penanganan overstaying agar di UPT tidak terjadi overstaying.

Tabel II. Capaian Indikator Kinerja 2 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	73,4%	91,75%

$$\% \text{ Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum

B = Jumlah Tahanan

Untuk tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh dari laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum} = \frac{1500}{2044} \times 100\% = 73,4\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{73,4\%}{80\%} \times 100\% = 91,75\%$$

Kendala/Hambatan

Dalam melaksanakan indikator kinerja ini, tidak memenuhi target disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dengan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam hal penyuluhan hukum bagi tahanan. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik ke depannya guna mendukung tercapainya target kinerja.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja 3 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	23,67%	29,59%

$$\% \text{ Menurunnya Tahanan Yang Fasilitas Bantuan Hukum} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan Fasilitas Bantuan Hukum

B = Jumlah Tahanan

Untuk tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh melalui website E-Performance dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Menurunnya Tahanan Yang Fasilitas Bantuan Hukum} = \frac{484}{2044} \times 100\% = 23,67\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{23,67\%}{80\%} \times 100\% = 29,59\%$$

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja 4 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Penidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	104%	160%

$$\% \text{ Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A= Jumlah Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian

B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian berdasarkan data hasil yang didapat dari walipas dan wakil walipas namun masih perlu adanya tenaga medis/psikologi di tiap-tiap lapas yang Kantor Wilayah lihat melalui SDP dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian} = \frac{898}{863} \times 100\% = 104\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{104\%}{65\%} \times 100\% = 160\% \end{aligned}$$

Dalam pelaksanaan indikator ini, telah mencapai target. Meski demikian, masih terdapat kendala yaitu masih kurangnya Sumber daya Manusia (SDM) ataupun operator yang menginput instrument penilaian kepribadian serta masih kurang pemahannya operator untuk penginputan data. Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja 5 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Penidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	102%

$$\% \text{ Predikat Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi

Untuk Indikator kinerja kegiatan tersebut berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh melalui aplikasi E-Performance dan Laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Predikat Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} = \frac{20168}{20168} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{98\%} \times 100\% = 102\% \end{aligned}$$

Dalam pelaksanaan indikator ini, telah mencapai target. Meski demikian, masih terdapat kendala yaitu sering terjadi kekurangan dokumen WBP diupload di SDP serta kendala jaringan internet yang mengalami gangguan. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke bagian tikers untuk melakukan pengawasan dan verifikasi data usulan remisi.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja 6 Divisi Pemasyarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi	80%	100%	125%

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan Narapidana yang mendapatkan hak integrasi berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh melalui aplikasi E-Performance dan laporan UPT Pemasyarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi} = \frac{3109}{3109} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Dalam pelaksanaan indikator ini, telah mencapai target. Meski demikian, masih terdapat kendala yaitu sering terjadi gagal konsolidasi pada SDP UPT yang menyebabkan data yang terkirim gagal atau kurang sempurna yang diterima oleh Ditjen Pemasyarakatan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan operator ditjen terkait kendala yang dialami setiap kali melakukan pengusulan integrasi WBP.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja 7 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	149%	186%

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latar Belakang Pendidikan Formal

Untuk indikator kinerja kegiatan narapidana yang mendapatkan hak pendidikan berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh melalui aplikasi E-Performance dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan} = \frac{3661}{2450} \times 100\% = 149\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{149\%}{80\%} \times 100\% = 186\%$$

Dalam pelaksanaan indikator ini, telah mencapai target. Meski demikian, masih terdapat kendala yaitu masih kurangnya tenaga pengajar dan faktor WBP yang tidak mempunyai dasar pendidikan yang memadai. Untuk itu, diperlukan upaya seperti menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk tenaga pengajar dan memberikan edukasi ke WBP untuk mengikuti program pendidikan yang diberikan oleh Lapas/Rutan.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja 8 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Displin	15%	100%	666,66%

$$\% \text{ Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Displin} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Displin

B = Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Untuk Indikator Kinerja Kegiatan Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh melalui aplikasi E-Performance dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Displin} = \frac{79}{79} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{15\%} \times 100\% = 666,66\%$$

Dalam pelaksanaan indikator ini, telah mencapai target. Meski demikian, masih terdapat kendala yaitu untuk mengubah prilaku menjadi sadar, patuh dan disiplin tidaklah mudah, dibutuhkan keinginan dan upaya dari diri masing-masing individu tapi untuk perubahan sekarang sudah mulai ada pada WBP yang ada di Lapas/Rutan di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Untuk itu, perlu diberikan pengertian dan pemahaman untuk WBP agar bisa menjadi sadar, patuh dan disiplin untuk kedepannya bisa memperoleh hak-hak seperti remisi dan integrasi sebagai warga binaan di Lapas/Rutan.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja 9 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	28%	17%	61%

$$\% \text{ Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A= Jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

B = Jumlah Narapidana

Untuk Indikator Kinerja Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh melalui aplikasi E-Performance dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{2185}{13009} \times 100\% = 17\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{17\%}{28\%} \times 100\% = 61\%$$

Kendala/Hambatan

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat mencapai target dikarenakan uerdapatnya anggaran kemandirian di UPT Pemasarakatan yang diblokir sehingga program pelatihan warga binaan tidak berjalan dengan maksimal. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan pihak luar untuk menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan program kemandirian warga binaan.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja IO Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Penididikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	67%	59%	88%

$$\% \text{ Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif

B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

Untuk Indikator Kinerja kegiatan narapidana yang bekerja dan produktif berdasarkan data yang Kantor Wilayah lihat melalui SDP dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif} = \frac{364}{622} \times 100\% = 59\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{59\%}{67\%} \times 100\% = 88\%$$

Kendala/Hambatan

Untuk indikator kinerja kegiatan ini tidak memenuhi target, dikarenakan adanya program integrase (PB, CMB, CB, dan asimilasi rumah) sehingga jumlah Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang bekerja dan produktif berkurang (bebas bersyarat).

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja II Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah Sesuai Standar	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	70%	97%	135%

$$\% \text{ Pengelolaan Basan Baran} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran

B = Jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan narapidana benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya berdasarkan data yang Kantor Wilayah laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian sebagai berikut:

$$\% \text{ Pengelolaan Basan Baran} = \frac{68}{70} \times 100\% = 97\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{97\%}{70\%} \times 100\% = 139\%$$

Dalam pelaksanaan indikator ini, telah mencapai target. Meski demikian, masih terdapat kendala yaitu barang yang ada UPT Rupbasan masih terjaga namun untuk jangka panjang barang yang ada disana sudah terlalu lama yang seiring waktu berjalan akan rusak juga. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga kualitas dan kuantitas selama barang dititipkan di Rupbasan dan mendata terhadap jumlah basan baran yang akan dilelang serta basan baran yang mengalami depresiasi.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja 12 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah Sesuai Standar	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap	60%	100%	166%

$$\% \text{ Basan baran yang dikeluarkan dan Berkekuatan Hukum Tetap} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi

B = Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkekuatan hukum tetap)

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh melalui aplikasi E-Performance dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Basan baran yang dikeluarkan dan Berkekuatan Hukum Tetap} = \frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{60\%} \times 100\% = 166\%$$

Dalam pelaksanaan indikator ini, telah mencapai target. Meski demikian, masih terdapat kendala yaitu masih adanya barang yang belum memiliki dokumen yang lengkap dan masih dititipkan. Untuk itu, perlu dilakukan eksekusi terhadap Basan Baran yang telah Inkracht untuk mengurangi jumlah barang pada Rupbasan.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja 13 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	50%	64%	128%

$$\% \text{ Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga

B = Jumlah Klien Usia Produktif

Untuk Indikator kinerja narapidana klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh melalui Aplikasi E-Performance dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Klien Usia Produktif Yang Memperoleh/Melanjutkan Pekerjaan} = \frac{1930}{3000} \times 100\% = 64\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{64\%}{50\%} \times 100\% = 128\%$$

Dalam pelaksanaan indikator ini, telah mencapai target. Meski demikian, masih terdapat kendala yaitu masih ada klien usia produktif yang memperoleh pekerjaan atau melanjutkan pekerjaan lama sebelum melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena klien kesulitan memperoleh pekerjaan, jikapun memperoleh pekerjaan klien tersebut sulit untuk mempertahankan. Di samping itu, terbatasnya anggaran yang ada di Bapas untuk melakukan pelatihan klien. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyediaan

lapangan kerja produktif dan mengarahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membuat program bimbingan bagi klien usia produktif yang focus untuk memperoleh atau melanjutkan pekerjaan.

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja 14 Divisi Pemasyarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	60%	63%	105%

$$\% \text{ Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara

B = Jumlah Pendampingan Anak

Untuk Indikator Kinerja narapidana anak yang mendapatkan putusan pidana penjara berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh melalui website E-Performance dan laporan UPT Pemasyarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara} = \frac{12}{19} \times 100\% = 63\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{63\%}{60\%} \times 100\% = 105\%$$

Dalam pelaksanaan indikator ini, telah mencapai target. Meski demikian, masih terdapat kendala yaitu masih ada anak yang belum mendapatkan putusan pidana penjara dikarenakan anak belum cukup umur, serta belum maksimalnya proses diversifikasi pada Balai Pemasyarakatan untuk anak. Untuk itu, dalam melakukan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil bersama-sama dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Di samping itu, perlu memaksimalkan upaya diversifikasi dalam sistem peradilan anak.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja 15 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	30,4%	101%

$$\% \text{ Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan

B = Jumlah Klien Anak

Untuk Indikator Kinerja narapidana klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya berdasarkan data yang Kantor Wilayah lihat melalui aplikasi E-Performance dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya} = \frac{35}{115} \times 100\% = 30,4\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

$$= \frac{30,4\%}{30\%} \times 100\% = 101\%$$

Dalam pelaksanaan indikator ini, telah mencapai target. Meski demikian, masih terdapat kendala yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi anak, serta kurangnya mitra kerja dalam upaya pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan Pendidikan di UPT Pemasarakatan.

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja 16 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	75%	75%	100%

$$\% \text{ Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah anak yang terampil

B = Jumlah anak yang mengikuti Pendidikan keterampilan

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat berdasarkan data yang Kantor Wilayah lihat melalui aplikasi e-performance dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat} = \frac{42}{56} \times 100\% = 75\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{75\%}{75\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja 17 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%

$$\% \text{ Anak yang Memperoleh Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi

B = Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi berdasarkan data yang Kantor Wilayah lihat melalui SDP dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi} = \frac{70}{70} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Dalam pelaksanaan indikator ini, telah mencapai target. Meski demikian, masih terdapat kendala yaitu sering terlambatnya pengurusan dokumen karena terdapat beberapa anak yang tidak pernah ada keluarga yang mengurus atau membesuk. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan hak-hak anak terutama yang sudah lengkap dokumen untuk pengurusan usulan integrasinya.

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja 18 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	80%	100%	125%

$$\% \text{ Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan

B = Jumlah Anak

Untuk Indikator Kinerja narapidana anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh melalui Aplikasi E-Performance dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan} = \frac{116}{116} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja 19 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan NonFormal	80%	80,4%	100,5%

$$\% \text{ Pendidikan Formal Dan Non Formal} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal

B = Jumlah Anak

Untuk Indikator Kinerja narapidana anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal berdasarkan data yang Kantor Wilayah lihat melalui SDP dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Pendidikan Formal Dan Non Formal} = \frac{119}{148} \times 100\% = 80,4\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{80,4\%}{80\%} \times 100\% = 100,5\%$$

Dalam pelaksanaan indikator ini, telah mencapai target. Meski demikian, masih terdapat kendala yaitu masih ada anak binaan yang belum mengikuti kegiatan pendidikan formal dan non formal dikarenakan data yang diperlukan lapas/rutan untuk mendaftarkan anak belum lengkap. Untuk itu, diperlukan upaya koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat agar anak binaan bisa mengikuti kegiatan Pendidikan formal dan non formal.

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja 20 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	125%

$$\% \text{ Pengaduan yang Diselesaikan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

B = Jumlah Pengaduan yang masuk

Untuk Indikator Kinerja persentase pengaduan yang diselesaikan berdasarkan data yang Kantor Wilayah lihat melalui SDP dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Pengaduan yang diselesaikan} = \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja 21 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pencegahan Gangguan Kamtib	70%	86%	123%

$$\% \text{ Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah

B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan pencegahan gangguan kamtib berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh dari laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah} = \frac{49}{57} \times 100\% = 86\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{86\%}{70\%} \times 100\% = 123\%$$

Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja 22 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Kepatuhan dan Displin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	100%	125%

$$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya

B = Jumlah pelaku gangguan kamtib

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh dari laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{65}{65} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja 23 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	100%	125%

$$\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

B = Jumlah Gangguan Kamtib

Untuk Indikator Kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas berdasarkan data yang Kantor Wilayah dari laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} = \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 125\%$$

Dalam pelaksanaan indikator ini, telah mencapai target. Meski demikian, masih terdapat kendala yaitu masih kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang-barang yang dilarang masuk. Untuk itu, diperlukan pengendalian, pengeledahan serta melakukan sinergitas dengan aparat hukum terkait untuk keamanan pasca gangguan kamtib agar gangguan dapat diselesaikan secara tuntas.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja 24 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	100%	125%

$$\% \text{ Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

B = Jumlah Pengaduan yang masuk

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh dari laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

% Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar = $\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja 25 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	70%	86%	123%

$$\% \text{ Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah

B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan gangguan kamtib yang dapat dicegah berdasarkan data yang Kantor Wilayah lihat melalui SDP dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah} = \frac{49}{57} \times 100\% = 86\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{86\%}{70\%} \times 100\% = 123\%$$

Tabel 34. Capaian Indikator Kinerja 26 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Kepatuhan dan Displin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	100%	125%

$$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya

B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib berdasarkan data yang Kantor Wilayah lihat melalui SDP dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib} = \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja 27 Divisi Pemasarakatan

SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	88,5%	126%

$$\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

B = Jumlah Gangguan Kamtib

Untuk indikator kinerja kegiatan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas berdasarkan data yang Kantor Wilayah peroleh dari aplikasi E-Performance dan laporan UPT Pemasarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian perhitungan:

$$\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} = \frac{23}{26} \times 100\% = 88,5\%$$

Sehingga Capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{88,5\%}{70\%} \times 100\% = 126\%$$

Tabel 36. Capaian Perjanjian Kinerja Divisi Pemasarakatan Year on Year

INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	70%	100%	80%	35%	43,75%

INDIKATOR KINERJA		2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70%	70%	100%	80%	73,4%	91,75%
3	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	70%	70%	100%	80%	23,67%	29,59%
4	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	60%	60%	100%	65%	104%	160%
5	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	97%	100%	98%	100%	102%
6	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%	100%	80%	100%	125%
7	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75%	75%	100%	80%	149%	186%
8	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	13%	13%	100%	15%	100	666,66%
9	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	25%	100%	28%	17%	61%
10	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	62%	100%	67%	58,5%	88%
11	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	60%	100%	70%	97%	135%
12	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	40%	40%	100%	60%	100%	166%
13	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	40%	40%	100%	50%	64%	128%

INDIKATOR KINERJA		2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
14	Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	50%	100%	60%	63%	105%
15	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	25%	100%	30%	30,4%	101%
16	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%	70%	100%	75%	75%	100%
17	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	70%	70%	100%	80%	100%	125%
19	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70%	70%	100%	80%	80,4%	100,5%
20	Persentase pengaduan yang diselesaikan	75%	75%	100%	80%	100%	125%
21	Persentase pencegahan gangguan kamtib	60%	60%	100%	70%	86%	123%
22	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	75%	75%	100%	80%	100%	125%
23	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	60%	100%	70%	100%	125%
24	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	75%	100%	80%	100%	125%

INDIKATOR KINERJA		2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
25	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	60%	100%	70%	86%	123%
26	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	75%	75%	100%	80%	100%	125%
27	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	60%	100%	70%	88,5%	126%

3. Direktorat Jenderal Keimigrasian - Divisi Keimigrasian

Tabel 37. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Keimigrasian - Divisi Keimigrasian Tahun 2022

Ditjen Imigrasi					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,20 Indeks	3,97	124%
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,12 Indeks	3,76	120%

Capaian kinerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan pada Tahun 2022 ini telah memenuhi target yang telah ditentukan, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator I: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah diperoleh dengan cara menghitung rata-rata hasil survei IKM pada aplikasi Survey Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia selama Tahun 2022 dari seluruh Satuan Kerja yang ada di wilayah kerja Divisi Keimigrasian masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38. Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian

Bulan	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim
Januari	3.99	3.96
Februari	3.94	4

Maret	3.99	3.99
April	3.92	3.98
Mei	4	3.96
Juni	3.96	3.96
Juli	3.88	3.96
Agustus	3.93	3.95
September	3.97	3.95
Oktober	3.95	3.96
November	3.94	3.93
Desember	3.99	4
RATA-RATA	3,95	3.97

Indikator II: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah diperoleh dari hasil rerata Indeks Pengamanan Keimigrasian dari seluruh satuan kerja imigrasi di wilayah kerja masing-masing. Survei dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui *e-Form* mulai dari tanggal 14 November hingga 25 Desember 2022 (Lampiran II);. Sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1-PW.01.02-001 Tanggal 03 Desember 2023 hal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja (IKM, IKI, IPK) Tahun 2022.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Kalender Kerja;
- 2) Pelayanan penerbitan Paspor RI melalui aplikasi M-Paspor dan APAPO 2.0;
- 3) Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Udara dan Laut Berjalan baik;
- 4) Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Keimigrasian melalui Aplikasi Simkim V2 berjalan lancar;
- 5) Melakukan penelitian data dan informasi serta membuat dokumen telaahan alih status keimigrasian;
- 6) Membentuk TIM PORA Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- 7) Pengawasan Orang Asing di seluruh penginapan dan perhotelan di wilayah Sumatera Selatan melalui pemantauan aplikasi APOA .

Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi seperti:

- 1) Dari 10 orang yang diperlukan di UKK Ogan Komering Ulu, baru 3 pegawai yang tersedia dan dari 10 orang yang diperlukan di UKK Musi Rawas baru 4 pegawai yang tersedia;
- 2) Data dari UPT Keimigrasian Sumatera Selatan tidak dapat diperoleh melalui sistem keimigrasian yang ada sehingga Divisi Keimigrasian harus meminta data

- kepada UPT Keimigrasian secara manual;
- 3) Belum sepenuhnya pelaporan keberadaan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) oleh pihak hotel dan penginapan yang berada di wilayah Sumatera Selatan;
 - 4) Dikarenakan renovasi Gedung bangunan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan khususnya pemindahan ruang server pada Divisi Keimigrasian mengakibatkan terganggunya kelancaran sistem jaringan SIMKIM II.

Terkait adanya kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan khususnya Divisi Keimigrasian, maka telah diambil langkah-langkah kebijakan diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Musi Rawas dan Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu guna meminta penambahan pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan di UKK;
- b. Meminta UPT Keimigrasian terkait permintaan data secara manual;
- c. Melakukan Koordinasi pihak hotel dan penginapan di Sumatera Selatan mengenai pelaporan keberadaan orang asing;
- d. Melakukan Koordinasi dengan divisi administrasi untuk memasang sistem jaringan yang baru.

Tabel 39. Capaian Perjanjian Kinerja Divisi Keimigrasian Year on Year

INDIKATOR KINERJA		2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,15	3,89	123,49%	3,20 Indeks	3,97	124%
2	Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,11	3,89	125,08%	3,12 Indeks	3,76	120%

4. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tabel 40. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2022

Ditjen AHU					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-0,37%	-7,4%

2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	84%	100%	119,04%
---	--	---	-----	------	---------

Sasaran I: Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum

Indikator: Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah

Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah diperoleh dengan cara menghitung peningkatan setiap bulan pada tahun berjalan PNBPN AHU di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan kemudian melakukan *compare* dengan PNBPN AHU di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan setiap bulan pada tahun sebelumnya. Selama Tahun 2022, jumlah PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. PNBPN AHU Pada Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dan 2022

Bulan	PNBPN AHU tahun 2021	PNBPN AHU tahun 2022
Januari	Rp. 1.294.900.000	Rp. 1.276.850.000
Februari	Rp. 1.087.350.000	Rp. 1.168.150.000
Maret	Rp. 1.200.050.000	Rp. 1.334.700.000
April	Rp. 1.260.600.000	Rp. 1.408.550.000
Mei	Rp. 1.439.000.000	Rp. 1.003.800.000
Juni	Rp. 1.539.200.000	Rp. 1.123.650.000
Juli	Rp. 1.424.250.000	Rp. 1.267.150.000
Agustus	Rp. 987.950.000	Rp. 1.348.500.000
September	Rp. 1.178.350.000	Rp. 1.355.450.000
Oktober	Rp. 1.151.950.000	Rp. 1.338.600.000
November	Rp. 1.380.100.000	Rp. 1.334.050.000
Desember	Rp. 1.316.300.000	Rp. 1.252.050.000
Total	Rp. 15.260.000.000	Rp. 15.211.600.000
Peningkatan PNBPN Tahun 2021 – 2022	- Rp. 48.400.000	
Persentase Peningkatan PNBPN 2021 - 2022	- 0.37%	

* Data dari <https://kanwil.ahu.go.id/pnbp/index> yang diakses pada 04 Januari 2023

Penurunan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan disebabkan sangat cepatnya penyebarluasan penyakit pandemic COVID-19 pada wilayah ini yang menjadi faktor utama aktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi menjadi lambat sehingga berdampak juga pengguna jasa notaris di wilayah kerja provinsi Sumatera Selatan. Strategi yang diambil dan dijalankan Sub Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam meningkatkan PNBPN Adminsitration Hukum Umum di Provinsi Sumatera Selatan dengan cara menjalin Kerjasama

dengan instansi Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam memberikan edukasi Layanan Jasa Hukum yang berada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta memberikan informasi secara luas kepada masyarakat di Wilayah terkait dengan Layanan AHU Online baik melalui social media maupun melalui radio daerah dan ikut serta dalam rangkaian kegiatan daerah yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan juga menyediakan pendampingan secara langsung bagi masyarakat dalam pengajuan permohonan layanan jasa AHU yang berada pada bagian Layanan Terpadu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, yang mana layanan terpadu tersebut merupakan layanan andalan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam mendapatkan predikan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2021 dan terus ditingkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat yang hadir secara langsung yang diharapkan pada tahun 2023 nanti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dapat mendapatkan predikat Wilayah Bebas Bersih Melayanani (WBBM) sesuai dengan arahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan terus berupaya untuk meningkatkan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah dengan berbagai cara antara lain: Penyebarluasan Informasi Layanan Administrasi Hukum Umum dengan media Podcast, Radio, dan Sosialisasi, serta Diseminasi.

Pada pelaksanaan Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat, PPNS, Badan Hukum, Badan Usaha, dan kewarganegaraan, serta Perseroan Perorangan diperlukan suatu evaluasi atas capaian kinerja dan penggunaan anggaran pada Program Administrasi Hukum Umum yang berasal dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pada tahun 2022, telah dilakukannya kegiatan evaluasi bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, atas pelaksanaan kinerja dan penggunaan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai sebuah organisasi tentunya juga melakukan evaluasi untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dalam rangka mencapai output maupun outcome organisasi. Evaluasi kinerja dilaksanakan tidak hanya terhadap unit teknis di pusat (Ditjen AHU), melainkan juga terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada program Administrasi Hukum Umum di wilayah.

Sasaran II: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD

Indikator: Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah

Dari data yang didapat dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Sumatera Selatan didapat jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris yang masuk sebanyak 5 (lima) laporan pada Tahun 2022, data tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 42. Data Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022

No	Laporan Pengaduan	Tanggal Penyelesaian
1	Laporan pengaduan pelanggaran kode etik jabatan notaris atas nama Taskin Syaritta Zulli, S.H., M.Kn	25 Mei 2022
2	Laporan Pengaduan notaris Rini Oktaviani, SH, M.Kn	28 Juni 2022
3	Laporan pengaduan masyarakat kepada notaris Julius, SH, M.Kn	04 Juli 2022
4	Laporan pengaduan Notaris Ida Kumala Dewi, SH, M.Kn	08 Juli 2022
5	Laporan pengaduan masyarakat kepada Notaris EA Muftiha, SH, M.Kn	15 Agustus 2022

*Sumber data Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan telah mencapai 100% dari 5 (lima) laporan pengaduan pada Tahun 2022 telah ditangani sebanyak 5 (lima) laporan pengaduan masyarakat tersebut.

Terpenuhnya target yang ditentukan tersebut disebabkan peran aktifnya seluruh anggota Majelis dalam menindaklanjuti laporan pengaduan Masyarakat dan didukung dengan sekretariat Majelis bertindak segera dalam melaporan kepada seluruh anggota terkait pengaduan Masyarakat. Kegiatan evaluasi tersebut merupakan salah satu bentuk sistem penjaminan mutu internal yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah sebagai kebutuhan organisasi, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara terprogram dengan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan capaian kinerja Kantor Wilayah yang pada akhirnya akan mencapai kinerja yang akuntabel.

Tabel 43. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Year on Year

INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	100%	5%	-0,37%	-7,4%

2	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	82%	82%	100%	84%	100%	119,04%
---	---	-----	-----	------	-----	------	---------

5. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tabel 44. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022

Ditjen KI					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	27 permohonan	123 Permohonan	451%
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus	1 Lokus	100%
2	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%	100%	100%
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus	2 Lokus	100%
		Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	2 laporan	2 Laporan	100%

Sasaran I: Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indikator I: Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah

Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah yang mana pada Tahun 2022 telah 123 (serratus dua puluh tiga) permohonan pendaftaran. Data tersebut diperoleh dari pangkalan data yang terdapat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diakses pada tanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut:

Tabel 45. Data Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Merek Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022

No.	Tanggal Pengajuan	Tipe Merek	Merek	Kelas	Tipe Permohonan	Jenis Permohonan
1	30/12/2022 16:09:40	Merek Kata dan Lukisan	Kue Bu Hj	30	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil

No.	Tanggal Pengajuan	Tipe Merek	Merek	Kelas	Tipe Permohonan	Jenis Permohonan
2	30/12/2022 15:39:59	Merek Kata dan Lukisan	Vie's Rajut	24	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
3	30/12/2022 11:39:04	Merek Kata dan Lukisan	BSB PACAK	36	Merek Jasa	Umum
4	30/12/2022 11:31:27	Merek Kata dan Lukisan	Rumpadyan	24	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
5	30/12/2022 08:25:47	Merek Kata dan Lukisan	Duo Lala	29	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
6	22/12/2022 15:48:58	Merek Kata	D'Poer Boenda Lee	29	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
7	22/12/2022 15:29:11	Merek Kata	Vent Craft	28	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
8	22/12/2022 15:01:01	Merek Kata	WARUNG KOREAN FOOD Oma Meta	43	Merek Jasa	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
9	22/12/2022 14:52:22	Merek Kata dan Lukisan	KEDAI PEMPEK RAKAYU	29	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
10	22/12/2022 13:10:38	Merek Kata dan Lukisan	Bakso Meletup	29	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
11	22/12/2022 12:16:22	Merek Kata dan Lukisan	OLEH2 KAMILAH	30	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
12	22/12/2022 11:42:41	Merek Kata dan Lukisan	Ikan Bakar GEGANA	29	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
13	22/12/2022 11:31:03	Merek Kata dan Lukisan	DAPOER TIGA SAUDARA	29	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
14	24/11/2022 13:04:55	Merek Kata dan Lukisan	Pak Ratin Coffe	30	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
15	24/11/2022 11:29:16	Merek Kata dan Lukisan	HAFIYYAH	3	Merek Dagang	Umum
16	24/11/2022 11:02:48	Merek Kata dan Lukisan	Mie Desa	29	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
17	18/11/2022 11:55:28	Merek Kata dan Lukisan	SEKOLAH ISLAM TERPADU AL - FURQON	41	Merek Jasa	Umum
18	18/11/2022 09:00:29	Merek Kata dan Lukisan	Mie Desa	30	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil

No.	Tanggal Pengajuan	Tipe Merek	Merek	Kelas	Tipe Permohonan	Jenis Permohonan
19	10/11/2022 14:53:39	Merek Kata dan Lukisan	BANK SUMSELBABEL MOBILE	36	Merek Jasa	Umum
20	10/11/2022 11:55:21	Merek Kata dan Lukisan	BANK SUMSEL BABEL INTERNET BANKING	36	Merek Jasa	Umum
21	10/10/2022 11:50:19	Merek Kata dan Lukisan	BSB Cash	36	Merek Jasa	Umum
22	10/10/2022 11:16:22	Merek Kata dan Lukisan	BSB LUR	36	Merek Jasa	Umum
23	06/10/2022 16:22:32	Merek Kata dan Lukisan	KENZOLIVE RESTO & SINGING HALL	41	Merek Jasa	Umum
24	04/10/2022 10:14:25	Merek Kata dan Lukisan	THE GRANS HOTEL	43	Merek Jasa	Umum
25	04/10/2022 09:52:18	Merek Kata dan Lukisan	The FOREST Cafe & Resto	43	Merek Jasa	Umum
26	22/09/2022 17:22:57	Merek Kata dan Lukisan	RUMAH SONGKET ADIS	35	Merek Jasa	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
27	22/09/2022 16:55:13	Merek Kata dan Lukisan	RUMAH SONGKET ADIS	25	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
28	22/09/2022 16:40:35	Merek Kata dan Lukisan	THE Palembang HERITAGE	25	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
29	22/09/2022 12:16:55	Merek Kata dan Lukisan	Adis Karim	25	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
30	08/09/2022 09:41:41	Merek Kata dan Lukisan	INSAN MANDIRI CENDEKIA	41	Merek Jasa	Umum
31	07/09/2022 13:34:08	Merek Kata dan Lukisan	MediaSi	41	Merek Jasa	Umum
32	05/09/2022 09:33:51	Merek Kata dan Lukisan	amangamir COLLECTION	35	Merek Jasa	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
48	01/09/2022 14:08:48	Merek Kata dan Lukisan	Kue Pancong Lemak Oy	30	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
49	01/09/2022 10:46:58	Merek Kata dan Lukisan	THE CILOK Mami Tepe	43	Merek Jasa	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
50	01/09/2022 09:21:27	Merek Kata dan Lukisan	JAMIAH RIZQI HERBAL	5	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil

No.	Tanggal Pengajuan	Tipe Merek	Merek	Kelas	Tipe Permohonan	Jenis Permohonan
51	01/09/2022 08:35:42	Merek Kata dan Lukisan	PEMPEK BETTY	29	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
52	31/08/2022 13:27:51	Merek Kata dan Lukisan	ROKI CHICKEN	30	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
53	29/08/2022 09:38:58	Merek Kata dan Lukisan	PEMPEK CEK AYU	29	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
54	19/08/2022 13:29:00	Merek Kata dan Lukisan	Velia COFFE	30	Merek Dagang	Umum
55	29/07/2022 11:06:58	Merek Kata dan Lukisan	MA'HAD IZZATUNA	41	Merek Jasa	Umum
56	29/07/2022 10:51:39	Merek Kata dan Lukisan	Bihaar	32	Merek Dagang	Umum
57	11/07/2022 13:15:37	Merek Kata	Miss MEYI	30	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
58	11/07/2022 11:08:42	Merek Kata dan Lukisan	Pindang BEBEK Amangamir	29	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
33	11/07/2022 10:32:36	Merek Kata dan Lukisan	GALERI WONG KITO	35	Merek Jasa	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
34	01/07/2022 16:00:34	Merek Kata dan Lukisan	RENDANG binda mimi	29	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
35	29/06/2022 11:27:05	Merek Kata dan Lukisan	Kelempang & Kerupuk "Cek Rahma"	30	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
36	17/06/2022 09:39:09	Merek Kata dan Lukisan	ENTAHUR + LUKISAN	30	Merek Dagang	Umum
37	14/06/2022 10:56:58	Merek Kata dan Lukisan	KERUPUK & KEMPLANG Leo 333 + LUKISAN	30	Merek Dagang	Umum
38	02/06/2022 11:51:00	Merek Kata dan Lukisan	SMM GLOW	3	Merek Dagang	Umum
39	24/05/2022 12:03:07	Merek Kata dan Lukisan	Wenda Andre Laundry	37	Merek Jasa	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
40	28/04/2022 12:10:14	Merek Kata dan Lukisan	NAPSkin NATURAL & HEALTHY SKIN	3	Merek Dagang	Umum
41	25/04/2022 12:27:16	Merek Kata dan Lukisan	TIGA SAUDARA	43	Merek Jasa	Umum

No.	Tanggal Pengajuan	Tipe Merek	Merek	Kelas	Tipe Permohonan	Jenis Permohonan
42	06/04/2022 11:03:16	Merek Kata dan Lukisan	Nikmat Copi	30	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
43	23/03/2022 10:35:13	Merek Kata dan Lukisan	LIDAH KITO	29	Merek Dagang	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
44	15/03/2022 09:39:54	Merek Kata dan Lukisan	ChaYah DIMSUM	29	Merek Dagang	Umum
45	09/03/2022 12:25:34	Merek Kata dan Lukisan	E2 SKIN	3	Merek Dagang	Umum
46	01/03/2022 14:43:45	Merek Kata dan Lukisan	Yumaya	43	Merek Jasa	Usaha Mikro dan Usaha Kecil
47	07/02/2022 11:22:35	Merek Kata dan Lukisan	AYAM BAKAR RAJAWALI	29	Merek Dagang	Umum
59	31/01/2022 13:03:35	Merek Kata dan Lukisan	RS SLIM	5	Merek Dagang	Umum
60	28/01/2022 13:55:13	Merek Kata dan Lukisan	Pindang ANTEK Resto & Cafe	43	Merek Jasa	Umum
61	26/01/2022 13:52:44	Merek Kata dan Lukisan	REDFIRE	9	Merek Dagang	Umum
62	21/01/2022 15:42:25	Merek Kata dan Lukisan	docnoi	31	Merek Dagang	Umum
63	19/01/2022 14:19:05	Merek Kata dan Lukisan	Al Khoir chicken	43	Merek Jasa	Umum
64	13/01/2022 10:25:55	Merek Kata dan Lukisan	PONDOK PINDANG UMAK	43	Merek Jasa	Umum
65	07/01/2022 11:44:22	Merek Kata dan Lukisan	DEMANGAQUATIC	31	Merek Dagang	Umum
66	06/01/2022 13:05:37	Merek Kata dan Lukisan	DEMANGELFOOD	31	Merek Dagang	Umum
67	05/01/2022 11:51:45	Merek Kata dan Lukisan	YES	1	Merek Dagang	Umum

**Data Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Cipta
Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022**

<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan	Nomor IPAS	Pengguna	Judul Ciptaan	Tanggal Pengajuan
<input type="checkbox"/>	EC002022104795		Kanwil Sumatera Selatan	SKOR H	13-12-2022 01:18:31
<input type="checkbox"/>	2022112813		Kanwil Sumatera Selatan	Maskot LPKA Kejas I Palembang "SI CAKEP"	07-12-2022 04:14:10
<input type="checkbox"/>	2022112863		Kanwil Sumatera Selatan	SATU (Sistem Aplikasi Terpadu) LPKA PALEMBANG	07-12-2022 02:42:01
<input type="checkbox"/>	2022112633		Kanwil Sumatera Selatan	Jingle WBK/ WBBM LPKA Palembang	07-12-2022 02:23:20
<input type="checkbox"/>	EC00202295525		Kanwil Sumatera Selatan	SISTEM INFORMASI LAYANAN MAGANG DAN PENELITIAN (28-11-2022 11:02:02
<input type="checkbox"/>	2022103426		Kanwil Sumatera Selatan	Jingle WBK/ WBBM LPKA Palembang	22-11-2022 04:12:26
<input type="checkbox"/>	2022103345		Kanwil Sumatera Selatan	SISTEM INFORMASI LAYANAN MAGANG DAN PENELITIAN (22-11-2022 03:09:14
<input type="checkbox"/>	EC00202281226		Kanwil Sumatera Selatan	Kain Batik Tulis Motif Lakuer Burung Hong	31-10-2022 11:42:35
<input type="checkbox"/>	EC00202281225		Kanwil Sumatera Selatan	Kain Batik Tulis Motif Lakuer Bungo Melati	31-10-2022 11:44:31
<input type="checkbox"/>	EC00202281224		Kanwil Sumatera Selatan	Kain Batik Tulis Motif Lakuer Bungo Matahari	31-10-2022 11:48:45

<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan	Nomor IPAS	Pengguna	Judul Ciptaan	Tanggal Pengajuan
<input type="checkbox"/>	EC00202279464		Kanwil Sumatera Selatan	E-Siraja Musi Polda Sumatera Selatan	25-10-2022 05:34:34
<input type="checkbox"/>	EC00202279463		Kanwil Sumatera Selatan	E-Gerai Sdm Polda Sumatera Selatan	25-10-2022 05:32:59
<input type="checkbox"/>	EC00202279462		Kanwil Sumatera Selatan	E-Kopi Polda Sumatera Selatan	25-10-2022 05:32:54
<input type="checkbox"/>	EC00202279461		Kanwil Sumatera Selatan	E-Sertijab Polda Sumatera Selatan	25-10-2022 05:31:52
<input type="checkbox"/>	EC00202279460		Kanwil Sumatera Selatan	E-Sipenjas Polda Sumatera Selatan	25-10-2022 05:30:43
<input type="checkbox"/>	EC00202279459		Kanwil Sumatera Selatan	E-Banghutbun Polda Sumatera Selatan	25-10-2022 05:29:43
<input type="checkbox"/>	EC00202279458		Kanwil Sumatera Selatan	E-Sebatas Polda Sumatera Selatan	25-10-2022 05:27:56
<input type="checkbox"/>	EC00202278928		Kanwil Sumatera Selatan	E-Barbuk Polda Sumatera Selatan	24-10-2022 04:09:37
<input type="checkbox"/>	EC00202278927		Kanwil Sumatera Selatan	E-Berkas Polda Sumatera Selatan	24-10-2022 04:08:45
<input type="checkbox"/>	EC00202278926		Kanwil Sumatera Selatan	E-Patrolri Polda Sumatera Selatan	24-10-2022 04:06:53

<input type="checkbox"/>	Nomor Permohonan	Nomor IPAS	Pengguna	Judul Ciptaan	Tanggal Pengajuan
<input type="checkbox"/>	EC00202279467		Kanwil Sumatera Selatan	E-Smart Presisi Polda Sumatera Selatan	25-10-2022 05:35:30
<input type="checkbox"/>	EC00202278080		Kanwil Sumatera Selatan	E- Absensi Polda Sumatera Selatan	21-10-2022 12:44:51
<input type="checkbox"/>	EC00202278083		Kanwil Sumatera Selatan	E- Kinerja Polda Sumatera Selatan	21-10-2022 12:46:03
<input type="checkbox"/>	EC00202278037		Kanwil Sumatera Selatan	E-Office Polda Sumatera Selatan	21-10-2022 11:45:09
<input type="checkbox"/>	EC00202268772		Kanwil Sumatera Selatan	POLITIK HUKUM KEBEBASAN BERAGAMA DALAM BINGKAI B	23-09-2022 02:20:21
<input type="checkbox"/>	EC00202267728		Kanwil Sumatera Selatan	Tancap Gas - Jingle WBK/WBBM Kanwil Kemenkumha	22-09-2022 07:13:37
<input type="checkbox"/>	EC00202263097		Kanwil Sumatera Selatan	Koran Online	09-09-2022 10:08:38
<input type="checkbox"/>	EC00202261586		Kanwil Sumatera Selatan	Kain Sulam Angkinan Motip Papan	06-09-2022 10:45:39
<input type="checkbox"/>	EC00202261585		Kanwil Sumatera Selatan	Kain Sulam Angkinan Motif Biji Pala	06-09-2022 10:45:02
<input type="checkbox"/>	EC00202261562		Kanwil Sumatera Selatan	Kain Sulam Angkinan Motip Singkok Jala	06-09-2022 10:41:28

Nomor Permohonan	Nomor IPAS	Pengguna	Judul Ciptaan	Tanggal Pengajuan
EC00202261564		Kanwil Sumatera Selatan	Kain Sulam Angkinah Motip Angso Belago	06-09-2022 10:44:15
EC00202256812		Kanwil Sumatera Selatan	MOTIF BATIK KAMBANG TOMAN	24-08-2022 10:58:24
EC00202252081		Kanwil Sumatera Selatan	Motif Batik Kepayang	10-08-2022 08:03:53
202257364		Kanwil Sumatera Selatan	Motif Batik Kepayang	09-08-2022 04:38:16
202257361		Kanwil Sumatera Selatan	Motif Batik Kepayang	09-08-2022 04:20:44
EC00202247717		Kanwil Sumatera Selatan	EKSPLORASI POTENSI SENYAWA FLAVONOID SAMBILOTO (26-07-2022 01:55:51
EC00202247716		Kanwil Sumatera Selatan	* Efek Antibodi Anti RAGE (RECEPTOR ADVANCED G	26-07-2022 01:54:38
EC00202247715		Kanwil Sumatera Selatan	* PENGARUH SUPER OXIDE DISMUTASE (SOD) TERHADAP	26-07-2022 01:53:16
EC00202243251		Kanwil Sumatera Selatan	SATPAM HEBAT	06-07-2022 10:01:23
EC00202230874		Kanwil Sumatera Selatan	Open Jurnal System Fakultas Ilmu Komputer	20-05-2022 10:54:34

Nomor Permohonan	Nomor IPAS	Pengguna	Judul Ciptaan	Tanggal Pengajuan
EC00202230874		Kanwil Sumatera Selatan	Open Jurnal System Fakultas Ilmu Komputer	20-05-2022 10:54:34
EC00202230972		Kanwil Sumatera Selatan	Website Fakultas Ilmu Komputer	21-05-2022 07:19:47
202229225		Kanwil Sumatera Selatan	Website Fakultas Ilmu Komputer	20-04-2022 01:15:03
202229164		Kanwil Sumatera Selatan	Open Jurnal System Fakultas Ilmu Komputer	20-04-2022 11:32:27
EC00202222928		Kanwil Sumatera Selatan	PREMENSTRUAL SYNDROME	06-04-2022 12:13:49
EC00202222926		Kanwil Sumatera Selatan	HIPERPLASIA ENDOMETRIUM	06-04-2022 12:14:21
EC00202222904		Kanwil Sumatera Selatan	DILATASI DAN KURETASE	06-04-2022 11:33:12
EC00202219303		Kanwil Sumatera Selatan	Pemeriksaan diagnosis Lesi Serviks dengan metode	21-03-2022 04:23:17
EC00202216417		Kanwil Sumatera Selatan	Pemeriksaan CA-125 sebagai Skrining Endometriosis	09-03-2022 01:22:11
EC00202213626		Kanwil Sumatera Selatan	Piasenta	24-02-2022 12:32:02
EC00202213625		Kanwil Sumatera Selatan	Anak Luaran Penelitian Dosen	24-02-2022 12:31:51
EC00202213624		Kanwil Sumatera Selatan	SOP Praktikum Keperawatan Anak Luaran Penelitian	24-02-2022 12:31:38
EC00202212163		Kanwil Sumatera Selatan	PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA bagi anak di Indonesia	18-02-2022 11:28:48
202211053		Kanwil Sumatera Selatan	Piasenta	10-02-2022 10:38:52
202210979		Kanwil Sumatera Selatan	Anak Luaran Penelitian Dosen	10-02-2022 09:09:58
EC00202209529		Kanwil Sumatera Selatan	Rampal Banyuasin	08-02-2022 01:35:58

Pendaftaran Merek yang difasilitasi Kantor Wilayah pada Tahun 2022 dari data tersebut berjumlah 67 (enam puluh tujuh) Permohonan, sedangkan untuk pendaftaran Cipta yang difasilitasi Kantor Wilayah pada Tahun 2022 dari data tersebut berjumlah 56 (lima puluh enam) Permohonan.

Indikator II: Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah

Untuk Indikator Kinerja selanjutnya yaitu Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah telah mencapai target yang ditentukan. Hasil tersebut didapat dengan terselenggaranya kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan

Intelektual di Wilayah tentang Hak Cipta pada tanggal 22 Februari 2022 di Hotel Beston Palembang.

Sasaran II: Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang handal

Indikator I: Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual

Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual telah memenuhi target yang ditentukan. Hasil tersebut dicapai dikarenakan dari tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan belum menerima aduan masyarakat terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah provinsi Sumatera Selatan, dari hasil tersebut maka belum ada pelaporan pengaduan menyebabkan belum ada tindakan penanganan dari para PPNS Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah dalam hal ini.

Indikator II: Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

Pada Indikator Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah telah mencapai hasil sesuai target yang ditetapkan. Hasil tersebut didapat dengan terlaksananya kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual tentang Tata Cara Pengajuan Perlindungan Kekayaan Intelektual secara *online* pada tanggal 22 Maret 2022 bertempat di Hotel Aston Palembang, dan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual pada tanggal 27 Mei 2022 bertempat di Hotel Aston Palembang.

Indikator III: Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah

Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah masih belum memenuhi target yang ditentukan dimana kegiatan yang dilakukan baru 2 (dua) kegiatan yang telah diselenggarakan sesuai dengan kalender kerja Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual sebagai pendamping penyusunan Draft Indikasi Geografis Gambir pada Kabupaten Musi Rawas di awal bulan April 2022, kemudian kegiatan berikutnya diselenggarakan sesuai dengan kalender kerja yaitu pada bulan September 2022.

Tabel 46. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Year on Year

INDIKATOR KINERJA		2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	26 Layanan	26 Layanan	100%	27 permohonan	123 Permohonan	451%

INDIKATOR KINERJA		2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	1 Lokus	100%	1 lokus	1 Lokus	100%
3	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 lokus	2 Lokus	100%
5	Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 laporan	2 Laporan	100%

6. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 47. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022

Ditjen PP					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125%
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	23 orang	23 orang	100%

Rincian pelaksanaan Indikator Kinerja sebagai berikut:

Sasaran I: Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

Indikator Kinerja: Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

Pada capaian telah tercapai sebanyak 100% dengan terfasilitasinya rancangan perda oleh kantor wilayah dengan rincian sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang:
 - a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung; dan
 - b. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Jenis Usaha Dan Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tentang:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

- b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - c. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - d. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - e. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang:
 - a) Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh; dan
 - b) Penyediaan Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
 4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Empat Lawang;
 5. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel;
 6. Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang:
 - a) Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Pemerintah Provinsi Sumsel;
 - b) Penugasan Kepada PT Sriwijaya Mandiri Sumsel dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang di Tanjung Carat;
 - c) Lisensi Arsitek;
 - d) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - e) Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan APBD; dan
 - f) Jenis, Jumlah, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
 7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sasaran II: Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja: Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan

Untuk indikator kinerja terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dengan target sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang telah terealisasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan didapat hasil capaian sebesar 100%.

Persentase tersebut didapat dari bulan Januari s.d Desember 2022 Sub Bidang FPPHD yang telah melaksanakan kegiatan pembinaan perancang berupa kegiatan forum pendalaman materi yang diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) orang perancang dan penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel yang diikuti oleh 7 (tujuh) orang perancang.

Tabel 48. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Year on Year

INDIKATOR KINERJA		2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	80%	100%	80%	100%	125%
2	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	23 Orang	23 orang	100%	23 orang	23 orang	100%

7. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tabel 49. Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah Sumatera Selatan Tahun 2022

BPHN					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	100%	123,45%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	100%	125%

BPHN					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	67%	87,45%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	100%
		Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif	20%	100%	500%

- **Sasaran: Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah**

Indikator Kinerja: Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

Tabel 50. Target dan Realisasi Terselenggaranya Fasilitasi Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan/Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah

Target	Realisasi
2	2

- **Sasaran: Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah**

- Indikator Kinerja : Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Permohonan Bantuan Hukum Litigasi pada tahun 2021 sebanyak 359 Kasus sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 217 Kasus. Perhitungan dilakukan dengan membagi indikator Jumlah Permohonan yang sudah dicairkan dengan Jumlah Permohonan yang diterima.

Tabel 51. Bantuan Hukum Litigasi

Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah Permohonan yang diterima	Jumlah Permohonan yang sudah dicairkan	Persentase
	217	217	100%

Hasil realisasi indikator kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target 1 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 52. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi

Target	Realisasi
81%	100%

- b. Indikator Kinerja : Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi pada tahun 2021 sebanyak 65 Kegiatan sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 34 Kegiatan.

Tabel 53. Bantuan Hukum Nonlitigasi

Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah Permohonan yang diterima	Jumlah Permohonan yang sudah dicairkan	Persentase
	34	34	100%

Perhitungan dilakukan dengan membagi indikator Jumlah Permohonan yang sudah dicairkan dengan Jumlah Permohonan yang diterima. Hasil realisasi indikator kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target 1 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 54. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi

Target	Realisasi
80%	100%

- c. Indikator Kinerja : Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum didapat melalui kegiatan Monitoring yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah melalui metode kuesioner yang kemudian hasil monitoring tersebut diinput ke dalam aplikasi SIDBankum. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 55. Rekapitulas Nilai Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

NO.	OBH	PELAKSANAAN	NILAI
1.	LKBH Musi Banyuasin	28 Juni 2022	65
2.	LKBH Musi Banyuasin	28 Juni 2022	92
3.	LBH Sumsel Cabang Pagaram	25 Mei 2022	75
4.	LBH Sumsel Cabang Pagaram	24 Mei 2022	71
5.	LBH Lahat	23 Mei 2022	75
6.	Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja	10 Juni 2022	68
7.	Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja	10 Juni 2022	60

8.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Sumsel	15 Agustus 2022	51
9.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya	15 Agustus 2022	70
10.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya	16 Agustus 2022	44
11.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang	15 Agustus 2022	50
12.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang	16 Agustus 2022	55
13.	Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (LBH Sumsel)	16 Agustus 2022	48
14.	Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda	18 Agustus 2022	64
15.	Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara Enim	07 September 2022	78
16.	Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara Enim	07 September 2022	74
17.	Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara Enim	07 September 2022	64
18.	Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara Enim	07 September 2022	61
19.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya	04 Oktober 2022	66
20.	Pusat Bantuan Hukum Peradi Palembang	05 Oktober 2022	70
21.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Sumatera Selatan	06 Oktober 2022	77
22.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI LBH) Palembang	06 Oktober 2022	80
23.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI LBH) Palembang	06 Oktober 2022	83
RATA-RATA			67

Hasil realisasi indikator kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target 1 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 56. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

Target	Realisasi
76,61	67

Indikator Kinerja ini tidak memenuhi target, hal tersebut dikarenakan responden yang merupakan penerima bantuan hukum masih banyak yang belum memahami cara pengisian kuesioner.

- d. Indikator Kinerja : Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah

Pada tahun 2021 tidak terdapat Desa/Kelurahan sadar hukum yang terbentuk sehingga ditargetkan kembali. Target yang telah ditetapkan ini merupakan target nasional. Adapun pada tahun anggaran 2022 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan terdapat 7 (tujuh) Desa/Kelurahan yang telah memenuhi kriteria yang kemudian diusulkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang akan ditetapkan melalui SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Desa/Kelurahan dimaksud terletak di Kabupaten Muara Enim (5 Desa Binaan) dan Kabupaten Musi Banyuasin (2 Desa Binaan).

Tabel 57. Target dan Realisasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah

Target	Realisasi
70%	100%

- e. Indikator Kinerja : Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

Anggota JDIHN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) instansi termasuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Sebanyak 36 (tiga puluh enam) Anggota tersebut telah terintegrasi dengan JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2021.

Tabel 58. Persentase Anggota JDIH yang Berpartisipasi Aktif

Target	Realisasi
20%	100%

Adapun capaian-capaian kinerja tersebut juga didukung dengan telah terlaksananya beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Penyuluhan Hukum yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kali penyuluhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sebanyak 217 Kasus untuk Bantuan Hukum Litigasi dan 34 Kegiatan untuk Bantuan Hukum Non Litigasi;
- Telah dilaksanakan Penyuluhan Hukum Terpadu di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022;
- Telah dilaksanakan Penyuluhan Hukum Terpadu di Kecamatan Ilir Barat I Palembang pada tanggal 22 Februari 2022;

- Telah dibuat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Nomor: W.6-0007.HN.03.01 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Daerah dan Admin Sistem Informasi Database Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Penandatanganan Kontrak Pemberian Bantuan Hukum, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan;
- Koordinasi Pusat dalam rangka pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di BPHN, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Maret 2022 di Ruang Rapat Bagian Program dan Pelaporan Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- Telah dibuat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Nomor: W.6-0003.HN.02.04 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penguatan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan sebagai Pusat Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Monitoring Pengelolaan Perpustakaan Hukum ke Universitas Muhammadiyah Palembang, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2022;
- Monitoring Pengelolaan Perpustakaan Hukum ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022;
- Monitoring Pengelolaan Perpustakaan Hukum ke Universitas Sriwijaya Palembang, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022;
- Monitoring Pengelolaan Perpustakaan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Palembang, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022;
- Pembinaan dan Pengelolan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022;
- Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022;
- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Panitia Pengawas Daerah ke Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 - 25 Mei 2022;
- Penyiapan Bahan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan;
- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Panitia Pengawas Daerah ke Kabupaten Ogan Komering Ulu, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Juni 2022;

- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Panitia Pengawas Daerah ke Kabupaten Musi Banyuasin, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27-29 Juni 2022;
- Monitoring Pengelolaan Perpustakaan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas I Palembang, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022;
- Penambahan koleksi JDIH :
 - Pembelian Buku Hukum sebanyak 145 eksemplar;
 - Hibah Buku Umum sebanyak 100 eksemplar.
- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Panitia Pengawas Daerah ke Kota Palembang, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 - 18 Agustus 2022 dan 22 Agustus 2022 di Rumah Penerima Bantuan Hukum di Kota Palembang, Unit Pelaksana Teknis di Kota Palembang;
- Monitoring dan Evaluasi JDIH Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muara Enim, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 06-08 September 2022 bertempat Kantor Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muara Enim;
- Penandatanganan Kontrak Addendum II antara Kantor Wilayah dengan Pemberi Bantuan Hukum, kegiatan dilaksanakan pada Selasa 15 November 2022 bertempat Ruang Kerja Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH;
- Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2022, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bidang Hukum dan Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH;
- Koordinasi Pengintegrasian Anggota JDIH dan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 pada tanggal 22-25 November 2022.
- Kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan:

Tabel 59. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

NO	WAKTU KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	MATERI
1	20/1/2022	SMP IT BINA INSANI KAYU AGUNG	HAK ANAK
2	20/1/2022	SMAN 4 KAYUAGUNG	NARKOBA
3	20/1/2022	SMP IT MADANI KAYUAGUNG	HAK ANAK
4	24/1/2022	SMPN 27 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
5	25/1/2022	SMPN 3 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE

NO	WAKTU KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	MATERI
6	26/1/2022	SMPN 21 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
7	26/1/2022	SMPN 16	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
8	27/1/2022	SMPN 3 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
9	28/1/2022	SMPN 17 PALEMBANG	NARKOBA
10	28/1/2022	SMAN 2 PALEMBANG	NARKOBA
11	02/2/2022	SMPN 19 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
12	08/2/2022	SMPN 21 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
13	09/2/2022	SMPN AZHARIYAH PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
14	10/2/2022	SMP N 5 KAYUAGUNG	NARKOBA
15	10/2/2022	SMP N 3 KAYUAGUNG	BULLYING
16	10/2/2022	DESA EMBACANG	KADARKUM
17	12/2/2022	SMP MUHAMMADIYAH PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
18	14/2/2022	SMPN PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
19	15/2/2022	KANTOR CAMAT SEBERANG ULU	KADARKUM
20	16/2/2022	SMP N 20 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
21	17/2/2022	SMP N 20 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
22	18/2/2022	MA MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
23	18/2/2022	MTS MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
24	21/2/2022	SMA N 4 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
25	22/2/2022	KANTOR LURAH SIRING AGUNG	KADARKUM
26	22/2/2022	LAPAS BANYUASIN	TATA CARA PENGADUAN
27	23/2/2022	SMPN 2 SUNGAI PINANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
28	23/2/2022	SMP N 3 SUNGAI PINANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
29	23/2/2022	LAPAS TANJUNG RAJA	TATA CARA PENGADUAN
30	4/3/2022	SMAN 4 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
31	4/3/2022	SMP N 20 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE

NO	WAKTU KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	MATERI
32	8/3/2022	SMA N 2 SEMBAWA	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
33	9/3/2022	SMP N 1 RAMBUTAN	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
34	10/3/2022	SMP N 3 BANYUASIN	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
35	12/3/2022	SMP N 4 RAMBUTAN	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
36	12/3/2022	MAJELIS TAKLIM MASJID DARULFALAH	BANKUM
37	14/3/2022	SMP N 5 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
38	15/3/2022	SMP N 30 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
39	15/3/2022	SMA N 8 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
40	18/3/2022	KEL. TALANG OJAN – PALI	KADARKUM
41	18/3/2022	DESA AIR ITAM - PALI	KADARKUM
42	18/3/2022	DESA BETUNG INDUK PALI	KADARKUM
43	18/3/2022	DESA BETUNG SELATAN PALI	KADARKUM
44	18/3/2022	DESA BETUNG UTARA - PALI	KADARKUM
45	18/3/2022	SMP MUHAMMADIYAH 7 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
46	18/3/2022	SMA MUHAMMADIYAH 5 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
47	19/3/2022	MAJELIS TAKLIM MASJID ISLAMIAH	BANKUM
48	21/3/2022	SMP N 42 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
49	22/3/2021	SMP N 42 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
50	22/3/2022	SMP N 21 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
51	23/3/2022	AMP N 8 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
52	24/3/2022	SMK MADIYAHTAMA	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
53	24/3/2022	SMP KARTIKA II - 1	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
54	25/3/2022	SMP 2 BANYUASIN	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
55	28/3/2022	SMA N 5 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
56	29/3/2022	SMP KARTIKA II - 1	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE

NO	WAKTU KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	MATERI
57	30/3/2022	SMP N 42 PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
58	01/4/2022	SMP PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
59	07/4/2022	SMP 7 SEKAYU	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
60	8/4/2022	SMP 3 LAIS	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
61	09/4/2022	SMP 3 SUNGAI LILIN	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
62	11/4/2022	SMP 7 SEKAYU	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
63	12/4/2022	SMP 3 LAIS	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
64	13/4/2022	SMP 3 SUNGAI LILIN	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
65	11/4/2022	SMP 7 SEKAYU	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
66	23/5/2022	SMP SWAKARYA BANYUASIN	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
67	24/5/2022	LAPAS KAYU ANGUNG	TATA CARA PENGADUAN, NARKOBA, TATA TERTIB, LAPAS
68	24/5/2022	SMP KAYU AGUNG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
69	24/5/2022	SD KAYU AGUNG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
70	30/5/2022	LAPAS KLAS I PALEMBANG	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
71	30/5/2022	SMA BANYUASIN	NARKOBA, BULLYING, LALU LINTAS, ITE
72	30/5/2022	BENTENG KUTO BESAK (BKB), MONPERA, MUSEUM SMB II	UU TPKS No. 12 TAHUN 2022
73	02/6/2022	BKB (PERAHU KETEK DAN DERMAGA BKB)	UU TPKS No. 12 TAHUN 2022
74	22/6/2022	PASAR 16 ILIR PALEMBANG	UU TPKS No. 12 TAHUN 2022
75	07/6/2022	KAMBANG IWAK	UU TPKS No. 12 TAHUN 2022
76	10/6/2022	KAMBANG IWAK	UU TPKS No. 12 TAHUN 2022
77	13-17/6/2022	KOTA PALEMBANG	UU NOMOR 20 TAHUN 2016
78	17/6/2022	JAKABARING SPORT CITY	UU TPKS No. 12 TAHUN 2022
79	14/07/2022	SMPN 33 PALEMBANG	ITE

NO	WAKTU KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	MATERI
80	14/07/2022	SMA SRIJAYA NEGARA	ITE
81	19/07/2022	MTS MUHAMADDIYAH 1 PALEMBANG	ITE
82	27/07/2022	KANTOR CAMAT SAKO	PERSEROAN PERSEORANGAN CIPTA/MEREK
83	27/07/2022	KANTOR CAMAT 3-4 ULU	PERSEROAN PERSEORANGAN CIPTA/MEREK
84	03/08/2022	SMK YP GAJAH MADA	NARKOBA,BULLYING,LALU LINTAS,ITE
85	04/08/2022	SMA NEGERI 6 PALEMBANG	NARKOBA,BULLYING,LALU LINTAS,ITE
86	05/08/2022	SMA NEGERI 1 TELUK GELAM	NARKOBA,BULLYING,LALU LINTAS,ITE
87	08/08/2022	SMK INDOSAINS PALEMBANG	NARKOBA,BULLYING,LALU LINTAS,ITE
88	09/08/2022	SMK BISTEK PALEMBANG	NARKOBA,BULLYING,LALU LINTAS,ITE
89	10/08/2022	SMP NEGERI 1 INDERALAYA	NARKOBA,BULLYING,LALU LINTAS,ITE
90	10/08/2022	SD NEGERI 11 INDERALAYA	KEDISIPLINAN
91	13/08/2022	SMP NEGERI 4 RAMBUTAN BANYUASIN	CINTA TANAH AIR
92	26/08/2022	SMA MUHAMADDIYAH 1 PALEMBANG	BULLYING
93	3/9/10	UNIV.TAMAN SISWA	UU TPKS
94	27/9/2022	UNIV. TRIDINANTI	RUU KUHP
95	27/9/2022	UNIV. IGM PALEMBANG	RUU KUHP
96	27/9/2022	UNIV. MUHAMMADIYAH PALEMBANG	RUU KUHP
97	27/9/2022	UNIV. TAMAN SISWA PALEMBANG	RUU KUHP
98	27/9/2022	UNIV. STIPADA PALEMBANG	RUU KUHP
99	27/9/2022	UNIV. BINA DHARMA	RUU KUHP
100	28/9/2022	MIN 1 PALEMBANG	KI
101	28/9/2022	SMPN 20 PALEMBANG	KI
102	28/9/2022	SMPN 21 PALEMBANG	KI
103	28/9/2022	SMPN 3 KAYU AGUNG	KI
104	28/9/2022	SDN 12 KAYU AGUNG	KI
105	3/10/2022	SMKN 8 PALEMBANG	CEGAH KENAKALAN REMAJA
106	7/10/2022	SMPN 4	CEGAH KENAKALAN REMAJA
107	10/10/2022	SMP BINA WARGA	CEGAH KENAKALAN REMAJA
108	11/10/2022	SMA BINA WARGA 2	CEGAH KENAKALAN REMAJA
109	12/10/2022	SMKN 6	CEGAH KENAKALAN REMAJA

NO	WAKTU KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	MATERI
110	13/10/2022	SMKN 6	CEGAH KENAKALAN REMAJA
111	17/10/2022	SMKN 6	CEGAH KENAKALAN REMAJA
112	24/10/2022	SMA BINA WARGA 1	G20/ CEGAH KENAKALAN REMAJA
113	25/10/2022	SMA TUNAS BANGSA	G20/ CEGAH KENAKALAN REMAJA
114	26/10/2022	SMP TUNAS BANGSA	G20/ CEGAH KENAKALAN REMAJA
115	28/10/2022	SMA 12 PALEMBANG	KI
116	31/10/2022	MTSN 1 PALEMBANG	KI
117	1/11/2022	SMA N 6	KI
118	2/11/2022	SMA SYAHYAKIRTI	KI
119	3/11/2022	SMK SYAHYAKIRTI	KI
120	2/11/2022	SMP XAVERIUS 1	G20/CEGAH KENAKALAN REMAJA
121	7/11/2022	SMPN 48 PALEMBANG	KI
122	8/11/2022	SMA 4 PALEMBANG	KI
123	9/11/2022	SMPN 43	KI
124	9/11/2022	SMP METHODIST 2	G20/CEGAH KENAKALAN REMAJA
125	10/11/2022	SMPN 54 PALEMBANG	KI
126	11/11/2022	SMPN 29	KI
127	14/11/2022	SMPN 10 PALEMBANG	CEGAH KENAKALAN REMAJA
128	15/11/2022	SMPN 10 PALEMBANG	CEGAH KENAKALAN REMAJA
129	16/11/2022	SMPN 9 PALEMBANG	CEGAH KENAKALAN REMAJA
130	17/11/2022	SMPN 9 PALEMBANG	CEGAH KENAKALAN REMAJA

Tabel 60. Capaian Kinerja BPHN Year on Year

INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1 Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2 Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	283,46%	368,12%	81%	100%	123,45%
3 Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	361,11%	457,10%	80%	100%	125%

INDIKATOR KINERJA		2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 %	70,16%	91,587%	76,61%	67%	122,53%
5	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	5%	-	-	70%	70%	100%
6	Persentase anggota JDHN yang berpartisipasi aktif	20%	100%	500%	20%	100%	500%

8. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Tabel 61. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Tahun 2022

Ditjen HAM					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	17 Instansi Pemerintah (Kab/Kota)	850 %
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah (Kab/Kota)	150 %
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui Pelayanan Publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	28 Instansi (27 UPT dan 1 Kantor Wilayah)	1.400 %
	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	3 Rekomendasi	9 Rekomendasi	300%

Sasaran: Meningkatkan pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi Hak Asasi Manusia

Indikator I: Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi Hak Asasi Manusia

Mengingat luas dan besarnya cakupan wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota serta besarnya animo para Kepala Daerah untuk menghadirkan

pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia, menjadikan realisasi program Aksi Hak Asasi Manusia berbanding sangat jauh dari target yang telah ditentukan oleh Eselon I/Dirjen Hak Asasi Manusia. 17 (tujuh belas) Kabupten/Kota yang menindaklanjuti dan melaksanakan program Aksi Hak Asasi Manusia adalah :

- 1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- 2) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- 3) Pemerintah Kabupaten Lahat;
- 4) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- 5) Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- 6) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- 7) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 8) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- 9) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 10) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- 11) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 12) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- 13) Pemerintah Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir;
- 14) Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
- 15) Pemerintah Kota Palembang;
- 16) Pemerintah Kota Prabumulih; dan
- 17) Pemerintah Kota Pagar Alam.

Indikator II: Jumlah Kab/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Mengingat luas dan besarnya cakupan wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota serta besarnya animo para Kepala Daerah untuk menjadikan Instansi Pemerintah peduli Hak Asasi Manusia, menjadikan realisasi Instansi pemerintah peduli Hak Asasi Manusia berbanding sangat jauh dari target yang telah ditentukan oleh Eselon I/Dirjen Hak Asasi Manusia. 17 (tujuh belas) Kabupten/Kota yang menindaklanjuti dan melaksanakan peduli Hak Asasi Manusia adalah :

- 1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- 2) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- 3) Pemerintah Kabupaten Lahat;
- 4) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- 5) Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- 6) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- 7) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 8) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- 9) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- 10) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- 11) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 12) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- 13) Pemerintah Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir;
- 14) Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
- 15) Pemerintah Kota Palembang;
- 16) Pemerintah Kota Prabumulih; dan
- 17) Pemerintah Kota Pagar Alam.

Dari jumlah 17 Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang diusulkan ke Direktorat Jenderal HAM Hak Asasi Manusia terdapat 3 Kabupaten/Kota yang yang mendapat Predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yakni :

- 1) Kota Lubuk Linggau
- 2) Kabupaten Musi Rawas
- 3) Kabupaten Lahat

Indikator III: Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia melalui Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia

Sehubungan dengan luasnya wilayah kerja dan banyaknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, menjadikan realisasi berbanding jauh dengan target yang telah ditentukan oleh Eselon I/Ditjen Hak Asasi Manusia. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia melalui pelayanan publik yang berbasis Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

- 1) Kantor Imigrasi Palembang;
- 2) Kantor Imigrasi Muara Enim;
- 3) Lapas Kelas I Palembang;
- 4) Lapas Kelas II A Tanjung Raja;
- 5) Lapas Kelas II A Banyuasin;
- 6) Lapas Kelas II A Lubuk Linggau;
- 7) Lapas Kelas II A Lahat;
- 8) Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti;
- 9) Lapas Perempuan Kelas II A Palembang;
- 10) LPKA Kelas I Palembang;
- 11) Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin;
- 12) Lapas Kelas II B Muara Dua;
- 13) Lapas Kelas II B Empat Lawang;
- 14) Lapas Kelas II B Kayuagung;

- 15) Lapas Kelas II B Sekayu;
- 16) Lapas Kelas II B Muara Enim;
- 17) Lapas Kelas II B Martapura;
- 18) Lapas Kelas II Surulangun Rawas;
- 19) Rutan Kelas I Palembang;
- 20) Lapas Kelas III Pagar Alam;
- 21) Rutan Kelas II B Prabumulih;
- 22) Rutan Kelas II B Baturaja;
- 23) Bapas Kelas I Palembang;
- 24) Bapas Kelas II Lahat;
- 25) Bapas Kelas II OKU Induk;
- 26) Bapas Kelas II Muratara;
- 27) Rupbasan Kelas I Palembang; dan
- 28) Rupbasan Kelas II Baturaja.

Sasaran: Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah

Indikator: Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah

Adapun yang dimaksud rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah merupakan rekomendasi yang diberikan oleh tim layanan komunikasi masyarakat pada agenda rapat sebagai fasilitator untuk mediasi atas permasalahan para penyampai komunikasi.

Terlaksana/telah ditindaklanjuti ada 9 (sembilan) Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah

I. Pelaksanaan Rapat :

- a. Kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (mediasi) dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022 bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.
- b. Kegiatan ini dihadiri oleh :
 1. Tim Yankomas
 2. Pihak pelapor
 3. Pihak terlapor dan
 4. Pihak terkait lainnya.
- c. Adapun materi pengaduan terkait dengan :
 1. Warisan yang menjadi hak anak (Pelapor atas nama Arief Basuni)
 2. Keberatan atas rencana pengusuran lahan/rumah (pelapor atas nama Ny. Suarsih Ningsih);

3. Dugaan terjadinya kriminalisasi terhadap Awaludin bin Cekmat (Suami PK) yang dilakukan anggota Polsek Air Kumbang PK Sanima;
4. Penyampai Komunikasi (Rumsi) memohon untuk ditindaklanjuti atau memproses IPDA Wilson Hutapea yang telah melakukan pengusiran dan bersikap arogan terhadap PK dan kliennya;
5. Penyampai Komunikasi (Jhonry Evyryanto) memohon agar putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap terkait ganti rugi tanah/lahan warga segera dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Mitra Ogan Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan;
6. Penyampai Komunikasi (R. David Sanaki) bertindak atas nama 50 (lima puluh) kepala keluarga masyarakat yang bertempat tinggal di atas tanah seluas sekitar 2,5 Ha di Jalan Chengho RT.62 RW.07 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, menyampaikan pengaduan terkait dengan pengambilalihan hak atas tanah tersebut;
7. Penyampai Komunikasi (Marusaha) mohon Atensi dan perlindungan hukum atas dugaan keberpihakan/penyalahgunaan wewenang dan/atau penelantaran perkara yang diduga dilakukan oleh penyidik Unit II Subdit II Harda Polda Sumatera Selatan;
8. Penyampaian Komunikasi (Gunaidi) permohonan bantuan atas keluhan masyarakat terkait penanganan laporan Polisi di Kepolisian Resort Musi Rawas; dan
9. Penyampai Komunikasi (Sofhuan Yusfiansyah) mengajukan permohonan keadilan hukum atas sengketa Tanah/Lahan warga Rt. 29 Mekarsari Kel. Pulokerto yang di klaim oleh Abdullah Syahab dkk.

II. Hasil Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (mediasi)

1. Tujuan Ibu Suarsih Ningsih melaporkan permasalahannya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan adalah untuk memperjuangkan haknya karena ia merasa berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Permasalahannya pihakpelapor tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah, karena dalam proses jual beli tidak ada Akta jual beli.
2. Pihak pelapor ingin meminta solusi mengenai hak waris atas warisan dari orang tua anak yang bernama Tita Anwar;
3. Telah dilaksanakan Koordinasi dan komunikasi dengan pihak Polsek Air Kumbang atas perkara/kasus Awalludin Bin Cekmat, Perkara yang bersangkutan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuasin dan murni tindak pidana pencurian bukan kriminalisasi seperti yang dikomunikasikan.
4. Telah dilaksanakan Klarifikasi dan Koordinasi dengan kedua belah pihak (Rumsi dan Ipda Wilson) dan masing-masing pihak telah bersepakat damai

atas kesalahpahaman yang terjadi.

5. Telah dilaksanakan Klarifikasi dan Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Baturaja (terkomunikasi) atas tertundanya Eksekusi keputusan Mahkamah Agung perihal ganti rugi lahan oleh PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada Jhonry Evyryanto (penyampai Komunikasi) selaku kuasa hukum dari disebabkan karena pihak pemohon Eksekusi (Jhonry Evyryanto) belum membayar biaya Eksekusi.
6. Telah dilaksanakan Klarifikasi dan Koordinasi dengan pihak Kanwil BPN Sumatera Selatan atas pengukuran lahan milik warga Tanah seluas sekitar 2,5 Ha di Jl. Chengho Rt.062 Rw.007 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, bahwa pihak kanwil BPN Sumatera Selatan maupun BPN Kota Palembang tidak pernah melakukan pengukuran tanah/lahan atas permohonan Aman Astra Ramli (Terkomunikasi).
7. Telah dilaksanakan Klarifikasi dan Koordinasi dengan Polda Sumatera Selatan (Terkomunikasi) bahwa perkara Pengaduan Masyarakat atas nama Marusaha (PK) tidak dapat dilanjutkan/dihentikan karena masing-masing pihak yang berperkara tidak memiliki Legal Standing atas tanah yang disengketakan.
8. Telah dilaksanakan Klarifikasi dan Koordinasi dengan pihak Kanit Tipikor Polres Musi Rawas (Terkomunikasi) atas pengaduan Gunaidi (Penyampai Komunikasi), bahwa perkara dugaan korupsi oleh kepala Desa dan perangkatnya yang dilaporkan masih dalam proses penyelidikan.
9. Telah dilaksanakan Klarifikasi dan Komunikasi dengan Sofhuan Yusfiansyah (Penyampai Komunikasi) atas penelantaran laporan masyarakat terhadap pihak Polda Sumatera Selatan (Terkomunikasi), bahwa laporan belum dapat ditindaklanjuti karena perkara/permasalahan atas kepemilikan lahan sedang dalam proses di Mahkamah Agung.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (mediasi) Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat memberikan saran kepada pihak pelapor sebagai berikut :

1. Untuk pihak pelapor agar melaksanakan hal-hal berikut:
 - Menelusuri ahli waris oknum BPN untuk meminta kejelasan terkait sertifikat;
 - Membuat surat susulan yang diajukan ke PEMKOT dan PEMDA;
 - Meminta keikhlasan hati dari PEMDA untuk memberikan uang bantuan kepada pihak pelapor dari sisi kemanusiaan.
2. Dikarenakan sudah adanya kesepakatan bersama yang disepakati pada mediasi sebelumnya, tetapi belum secara resmi mengeluarkan dokumen kesepakatan antara kedua belah pihak. Merespon permasalahan ini tim YANKOMAS merekomendasikan untuk menunggu dokumen kesepakatan tersebut terbit dan

ditandatangani oleh masing-masing pihak dan berharap agar masing-masing pihak tidak lagi mengungkit permasalahan yang terjadi dan antar kedua belah pihak dapat saling merangkul sebagai satu keluarga.

3. Agar kiranya petugas Kepolisian yang menjadi Terkomunikasi melaporkan hasil Klarifikasi dan Koordinasi dengan Tim Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan ke Link yankomas@ham.go.id Dirjenham dengan mencantumkan surat keputusan Pengadilan Negeri Banyuasin/Vonis Awalludin Bin Cekmat atas kasus Pidana Pencurian.
4. Agar kiranya petugas Kepolisian yang menjadi Terkomunikasi yakni anggota Polres OKU Timur untuk mengirimkan hasil perdamaian kedua belah pihak ke Link yankomas@ham.go.id Dirjenham.
5. Agar kiranya Pengadilan Negeri Baturaja yang menjadi Terkomunikasi, membuat surat balasan atas belum terlaksananya Eksekusi Putusan Mahkamah Agung perihal ganti rugi tanah/lahan ke Link yankomas@ham.go.id Dirjenham dan ditembuskan pula ke Penyampai Komunikasi Jhonry Evyrianto.
6. Agar kiranya pihak Kanwil BPN Sumtera Selatan dan BPN Kota Palembang memberikan penjelasan terhadap masyarakat yang lahan/tanahnya diukur oleh pihak lain selain BPN Kota Palembang serta melaporkan hasil Klarifikasi dan Koordinasi dengan Tim Yankomas Kantor Wilayah ke Link yankomas@ham.go.id Dirjenham dan ditembuskan pula ke Penyampai Komunikasi David Sanaki
7. Agar pihak Subdit II Harda Polda Sumatera Selatan melaporkan hasil gelar perkara dengan pihak Mabes Polri yang melakukan Penghentian Penyelidikan ke Link yankomas@ham.go.id Dirjenham dan ditembuskan pula ke Penyampai Komunikasi Marusaha.
8. Agar kiranya pihak Kanit Tipikor Polres Musirawas memberikan penjelasan atas kelanjutan perkara pengaduan masyarakat Gunaidi bahwa perkaranya masih berlanjut ke tingkat Penyelidikan dan pengumpulan barang bukti.
9. Agar kiranya pihak Penyampai Komunikasi (Sofhuan Yusfiansyah) menunggu penyelesaian perkara perdata dengan Abdullah Syahab masalah kepemilikan lahan yang sedang ditangani oleh Pihak Mahkamah Agung.

Tabel 62. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Year on Year

INDIKATOR KINERJA		2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	6 Instansi Pemerintah	17 Intansi Pemerintah (Kab/Kota)	283,33%	2 Instansi Pemerintah	17 Intansi Pemerintah (Kab/Kota)	850 %

INDIKATOR KINERJA		2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	100%	2 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah (Kab/Kota)	150 %
3	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%	2 Instansi Pemerintah	28 Instansi (27 UPT dan 1 Kantor Wilayah)	1.400 %
4	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	3 Rekomendasi	5 Rekomendasi	166,67%	3 Rekomendasi	9 Rekomendasi	300%

9. Balitbang HAM

Tabel 63. Capaian Kinerja Balitbang HAM Tahun 2022

Balitbang HAM					
No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80%	100%	125%
		Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	100%

Indikator I: Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan postur RKA-K/L Tahun 2022, untuk output rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebanyak 3 rekomendasi, dan telah tercapai sebanyak 3 rekomendasi. Adapun rekomendasi tersebut adalah:

- 1) Formulasi kebijakan analisis strategi kebijakan hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2) Monev IPK-IKM
- 3) SIPKUMHAM

Hasil kajian di wilayah terkait survey IKM-IPK yang kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 64. Capaian Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	Volume RKA-K/L	Realisasi	Persentase
	3	3	100%

Indikator II: Hasil penelitian hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan telah melakukan Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah melalui Diskusi Daring Obrolan Peneliti (OPini) pada 31 Maret 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 1.529 peserta yang mendaftar, 780 diantaranya bergabung melalui Zoom Meeting dan 247 peserta mengikuti lewat Live Stream Youtube Kemenkumham Sumsel. Peserta yang bergabung terdiri dari Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Pelajar, Mahasiswa, jajaran internal Kanwil Kemenkumham maulun UPT dari berbagai wilayah di Indonesia serta masyarakat umum. Penentuan tema Sosialisasi Hasil Penelitian Melalui Diskusi Daring OPini berdasarkan daftar yang sudah ditetapkan Balibang Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan mengusung tema "Kehilangan Kewarganegaraan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI". Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber diantaranya Dr. Firman Freaddy Busroh, Lektor Kepala STIH Sumpah Pemuda Palembang yang menyampaikan materi tentang politik hukum kewarganegaraan. Kemudian Sahlan Syamsu, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Palembang dengan materi Peran Disdukcapil Terhadap Pencegahan kehilangan Status Kewarganegaraan. Serta Muhaimin, Peneliti Ahli Muda Balitbangkumham yang menyampaikan hasil penelitian terkait kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, yang dipandu Moderator Dr.Derry Angling Kesuma selaku Lektor pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

Tabel 65. Capaian Kinerja Balitbang HAM Year on Year

INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	70%	90%	128,57%	80%	100%	125%
2 Hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 buku	100%

Berdasarkan uraian maupun tabel, secara garis besar beberapa indikator pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia telah tercapai. Namun, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum bisa dipenuhi secara maksimal dikarenakan adanya kendala yakni pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia.

Adapun tercapainya kinerja tersebut didukung oleh beberapa hal, seperti:

1. Selalu berkoordinasi dengan para Ketua OBH untuk memaksimalkan penyerapan anggaran melalui aplikasi SIDBANKUM dalam hal penyerapan anggaran;
2. Para JFT Penyuluh Hukum telah melakukan penyuluhan hukum keliling;
3. Para Perancang Peraturan Perundang-Undangan telah melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Analisis Hukum;
4. Melakukan MoU dan kerja sama;
5. Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual;
6. Optimalisasi pendaftaran indikasi geografis;
7. Optimalisasi pemahaman desain industri;
8. Meningkatkan sinergitas dengan stakeholder terkait.

Selain itu, Untuk menjamin terlaksananya pemberian hak bagi penerima bantuan hukum, pemerintah telah menetapkan aturan tentang tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2018 dan diundangkan pada tanggal 26 Januari 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182). Terdapat 10 (sepuluh) OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi Kemenkumham, antara lain :

Tabel 66. Organisasi Bantuan Hukum Sumatera Selatan

No.	NAMA
1.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang
2.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI LBH) Palembang
3.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya
4.	Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (LBH Sumsel)
5.	Lembaga Bantuan Hukum Lahat
6.	Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
7.	Pusat Bantuan Hukum Peradi Palembang
8.	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin
9.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Apik Sumatera Selatan
10.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Sumsel

Dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melakukan beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia;
2. Mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia; dan
3. Memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

B. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari segi keuangan, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dipaparkan sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal – Divisi Administrasi

Tabel 67. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal/Divisi Administrasi

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Divisi Administrasi – Program Dukungan Manajemen	26.337.462.000	26.204.402.850	99,49
a.	Layanan BMN	223.124.000	222.478.500	99,71
b.	Layanan Hubungan Masyarakat	346.199.000	346.072.400	99,96
c.	Layanan Protokoler	51.640.000	51.540.000	99,81
d.	Layanan Perkantoran	17.298.842.000	17.169.194.909	99,25
e.	Layanan Sarana Internal	3.578.575.000	3.577.903.000	99,98
f.	Layanan Prasarana Internal	3.806.180.000	3.805.695.117	99,99
g.	Layanan Manajemen SDM	206.068.000	205.567.350	99,76
h.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	352.590.000	352.399.982	99,95
i.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	107.199.000	107.147.250	99,95
j.	Layanan Manajemen Keuangan	183.856.000	183.780.300	99,96
k.	Layanan Reformasi Kinerja	183.189.000	182.624.042	99,69

2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan – Divisi Pemasyarakatan

Tabel 68. Realisasi Anggaran Divisi Pemasyarakatan

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Divisi Pemasyarakatan – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	930.531.000	923.886.087	99.29%
a.	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan di Wilayah	336.415.000	334.131.123	99,32%

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
b.	Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	411.818.000	408.181.364	99.12%
c.	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	182.298.000	181.573.600	99.60%

Berdasarkan capaian kinerja yang telah tercapai sebagaimana pada Subbab Capaian Kinerja, dan capaian realisasi anggaran pada table di atas, maka *performance* yang diperoleh adalah sebagai berikut:

3. Direktorat Jenderal Keimigrasian – Divisi Imigrasi

Tabel 69. Realisasi Anggaran Divisi Keimigrasian

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Divisi Keimigrasian – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	962.973.000	948.440.122	98,49%
a.	Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian	581.936.000	570.001.432	97,94%
b.	Penyelidikan Intelijen keimigrasian di Wilayah	247.766.000	246.442.580	99.47%
c.	Operasi Mandiri di Wilayah	58.550.000	57.958.510	98,99 %
d.	Operasi Gabungan di Wilayah	11.211.000	10.967.600	97,83%
e.	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	120.000	0	0%
f.	Pengawasan Orang Asing	63.390.000	63.070.000	99,49 %

4. Direktorat Jenderal AHU

Tabel 70. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal AHU

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.289.000.000	2.240.736.876	97,91%
a.	Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait	447.664.000	482.929.172	34,85%
b.	Layanan administrasi hukum umum di wilayah	903.075.000	782.484.500	86,65%
c.	Penanganan perkara pada Kantor Wilayah	27.660.000	0	0%
d.	Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di wilayah	919.601.000	175.451.000	19.08%

5. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tabel 71. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.133.102.000	1.121.793.887	99,00%
a.	Pelayanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	533.132.000	565.748.387	98,63%
b.	Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	383.176.000	341.660.400	99,98%
c.	Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	143.184.000	143.668.200	99,65%
d.	Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah	73.610.000	70.716.900	96,07%

6. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 72. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Direktorat Jenderal PP - Program Pembentukan Regulasi	275.000.000	268.458.800	97,715%
a.	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (Rekomendasi Kebijakan)	182.590.000	177.908.300	97,44%
b.	Standarisasi Profesi dan SDM (orang)	92.410.000	90.550.500	97,99%

7. BPHN

Tabel 73. Realisasi Anggaran BPHN

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI(Rp)	CAPAIAN (%)
1	Program Pembentukan Regulasi	Rp. 118.718.000,-	Rp. 103.943.800,-	87,55%
a.	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	Rp. 51.391.000,-	Rp. 43.032.400,-	83,73%
b.	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	Rp. 67.327.000,-	Rp. 60.911.400,-	90,47%
2	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman hukum di Wilayah	Rp. 1.001.922.000,-	Rp. 970.543.800,-	96,86%
a.	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum	Rp. 30.938.000,-	Rp. 28.372.500,-	91,70%
b.	Layanan Penyuluhan Hukum	Rp. 32.832.000,-	Rp. 31.301.300,-	95,33%
c.	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp. 88,748,000,-	Rp. 84.329.100,-	95,02%
d.	Fasilitasi JDIHN	Rp. 60.982.000,-	Rp. 58.505.200,-	95,93%
e.	Layanan Perpustakaan Hukum	Rp. 20.210.000,-	Rp. 20.142.200,-	99,66%
f.	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Rp. 682.000.000,-	Rp. 665.000.000,-	97,50%

PROGRAM/OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI(Rp)	CAPAIAN (%)
g. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Rp. 86.212.000,-	Rp. 82.893.500,-	96,15%

8. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Tabel 74. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal HAM

PROGRAM/OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1 Direktorat Jenderal HAM – Program Pemajuan dan Penegakan HAM	205.710.000	198.430.500	91,36%
a. Rekomendasi Analisis Produk Hukum di Daerah	11.626.000.-	10.584.800.-	91.04 %
b. Koordinasi antar Pemerintah Daerah	88.305.000	85,288,100.-	96.58 %
c. Fasilitasi Proses Penilaian Kab/Kota Peduli HAM	39.711.000	38,710,600.-	97.48 %
d. Pembinaan Lembaga Pulik berbasis HAM di Wilayah	30.688.000	30,149,900.-	98.25 %
e. Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	33.765.000	32,594,000.-	96.53 %
f. Layanan Penyediaan Informasi dan Dokumentasi HAM	1.615.000	1,103,100.-	68.30 %

9. Balitbang Hukum dan HAM

Tabel 75. Realisasi Anggaran Balitbang Hukum dan HAM

PROGRAM/OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1 Balitbang Hukum dan HAM – Program Dukungan Manajemen	214.073.000,-	169.602.830	99.86%
a. Kajian Hukum dan HAM	44.234.000,-	0	0%
b. Analisis Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM	82.445.000,-	77.854.030	99.82%
c. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM	77.971.000,-	82.947.900	99.96%
d. Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM di Wilayah	9.423.000,-	8.800.900	99.24%

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022, telah ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pagu Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp324.657.162.000. Selama tahun 2022, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan telah mengalami beberapa kali revisi yang menyebabkan pagu akhir jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan menjadi Rp334.969.184.000 dengan realisasi anggaran Rp331.525.085.193 atau sebesar 98,97%. Realisasi anggaran ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 98,26%.



Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan telah mengalami beberapa kali revisi DIPA. Hal ini dilakukan guna optimalisasi penyerapan anggaran dan mempercepat pencapaian kinerja. Adapun rincian revisi yang telah dilaksanakan sebagai berikut.

Tabel 76. Rincian Revisi DIPA

DIPA	Nomor DIPA	Revisi	Tanggal Revisi	PAGU	Keterangan
Kanwil Ditjen Administrasi Hukum Umum	SP DIPA-013.03.2.408 812/2022	Ke 1	16-02-2021	2.298.000.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 2	18-04-2022	2.298.000.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 3	13-05-2022	2.298.000.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 4	08-07-2022	2.298.000.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 5	08-08-2022	2.298.000.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 6	17-10-2022	2.298.000.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 7	17-11-2022	2.298.000.000	Revisi Halaman III DIPA
Kanwil Ditjen Pemasyarakatan	SP DIPA-013.05.2.408 813/2022	Ke 1	16-12-2021	1.151.828.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 2	16-02-2022	1.151.828.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 3	18-04-2022	1.151.828.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 4	13-05-2022	1.151.828.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 5	08-07-2022	1.151.828.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 6	29-07-2022	1.151.828.000	Revisi POK
		Ke 7	08-09-2022	1.151.828.000	Revisi POK
		Ke 8	30-09-2022	1.151.828.000	Revisi DJA
		Ke 9	17-10-2022	1.151.828.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 10	04-11-2022	930.531.000	Revisi DJA
		Ke 11	18-11-2022	930.531.000	Revisi POK
		Ke 12	29-11-2022	930.531.000	Revisi Halaman III DIPA
Kanwil Ditjen Imigrasi	SP DIPA-013.06.2.408 814/2022	Ke 1	16-02-2022	962.973.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 2	18-04-2022	962.973.000	Revisi Halaman III DIPA

DIPA	Nomor DIPA	Revisi	Tanggal Revisi	PAGU	Keterangan
		Ke 3	13-05-2022	962.973.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 4	08-07-2022	962.973.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 5	17-10-2022	962.973.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 6	24-11-2022	962.973.000	Revisi POK
		Ke 7	25-11-2022	962.973.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 8	26-11-2022	962.973.000	Revisi POK
Kanwil Ditjen Kekayaan Intelektual	SP DIPA-013.07.2.408 815/2022	Ke 1	16-02-2022	1.133.102.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 2	18-04-2022	1.133.102.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 3	13-05-2022	1.133.102.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 4	08-7-2022	1.133.102.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 5	01-11-2022	1.133.102.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 6	17-11-2022	1.133.102.000	Revisi Halaman III DIPA
Kanwil Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	SP DIPA-013.09.2.408 816/2022	Ke 1	16-12-2022	315.000.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 2	16-02-2022	315.000.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 3	18-04-2022	315.000.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 4	13-05-2022	315.000.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 5	12-07-2022	315.000.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 6	31-08-2022	315.000.000	Revisi POK
		Ke 7	17-10-2022	315.000.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 8	24-10-22	315.000.000	Revisi POK
		Ke 9	05-12-2022	275.000.000	Revisi DJA
Kanwil Ditjen Hak Asasi Manusia	SP DIPA-013.09.2.408 817/2022	Ke 1	16-02-2022	205.710.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 2	18-04-2022	205.710.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 3	13-05-2022	205.710.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 4	12-07-2022	205.710.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 5	17-10-2022	205.710.000	Revisi Halaman III DIPA

DIPA	Nomor DIPA	Revisi	Tanggal Revisi	PAGU	Keterangan
Kanwil Ditjen Sekretariat Jenderal	SP DIPA-013.05.2.408 818/2022	Ke 1	16-12-2021	23.086.115.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 2	16-02-2022	23.086.115.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 3	18-04-2022	23.086.115.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 4	13-05-2022	23.086.115.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 5	12-07-2022	23.086.115.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 6	08-09-2022	23.086.115.000	Revisi POK
		Ke 7	19-09-2022	24.304.616.000	Revisi DJA
		Ke 8	04-10-2022	24.304.616.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 9	14-10-2022	27.345.616.000	Revisi DJA
		Ke 10	21-20-2022	27.345.616.000	Revisi POK
		Ke 11	28-10-2022	27.345.616.000	Revisi POK
		Ke 12	28-10-2022	27.345.616.000	Revisi POK
		Ke 13	24-11-2022	27.345.616.000	Revisi POK
		Ke 14	02-12-2022	26.337.462.000	Revisi DJA
		Ke 15	06-12-2022	26.337.462.000	Revisi POK
		Ke 16	15-12-2022	26.337.462.000	Revisi POK
Kanwil Badan Pembinaan Hukum Nasional	SP DIPA-013.05.2.408 819/2022	Ke 1	16-12-2021	1.658.697.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 2	04-02-2022	1.658.697.000	Revisi DJA
		Ke 3	16-02-2022	1.658.697.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 4	18-04-2022	1.658.697.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 5	13-05-2022	1.658.697.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 6	15-07-2022	1.640.277.000	Revisi DJA
		Ke 7	17-10-2022	1.640.277.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 8	25-10-2022	1.640.277.000	Revisi DJA
		Ke 9	08-11-2022	1.625.799.000	Revisi DJA
		Ke 10	01-12-2022	1.120.640.000	Revisi DJA
Kanwil Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	SP DIPA-013.05.2.408 820/2022	Ke 1	16-12-2021	214.073.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 2	16-02-2022	214.073.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 3	18-04-2022	214.073.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 4	13-05-2022	214.073.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 5	12-07-2022	214.073.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 6	01-11-2022	214.073.000	Revisi Halaman III DIPA
		Ke 7	06-12-2022	169.839.000	Revisi DJA

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan maupun Unit Pelaksana Teknis sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 77. Realisasi Anggaran Pada Jajaran Kantor Wilayah Sumatera Selatan

No.	Kode Satker	Nama Satker	PAGU	Realisasi	
				Jumlah	%
1	683589	Lapas BANYUASIN	19.800.351.000	19.784.934.801	99,92%

No.	Kode Satker	Nama Satker	PAGU	Realisasi	
				Jumlah	%
2	406402	Lapas LAHAT	9.724.801.000	9.711.988.348	99,87%
3	626115	Rupbasan PALEMBANG	3.021.852.000	3.017.792.867	99,87%
4	408820	KANWIL BALITBANGKUMHAM	169.839.000	169.602.830	99,86%
5	406463	Lapas SURULANGUN RAWAS	5.744.718.000	5.734.341.991	99,82%
6	406381	Lapas TANJUNG RAJA	14.354.319.000	14.318.091.732	99,75%
7	406457	Lapas LUBUK LINGGAU	16.714.826.000	16.669.108.462	99,73%
8	406494	Rutan PRABUMULIH	9.629.976.000	9.602.244.450	99,71%
9	406375	Lapas PALEMBANG	24.409.563.000	24.303.610.793	99,57%
10	408818	KANWIL SETJEN	26.337.462.000	26.204.402.850	99,49%
11	406472	Rutan BATURAJA	6.901.536.000	6.866.556.745	99,49%
12	406369	Bapas PALEMBANG	8.916.423.000	8.866.803.861	99,44%
13	406441	Lapas EMPAT LAWANG	5.584.538.000	5.547.859.192	99,34%
14	664565	Kanim MUARAENIM	6.976.611.000	6.928.764.476	99,31%
15	406401	Lapas SEKAYU	14.648.803.000	14.545.735.827	99,30%
16	406539	LPKA PALEMBANG	9.425.335.000	9.356.241.848	99,27%
17	408143	Kanim PALEMBANG	11.085.166.000	11.003.249.161	99,26%
18	406426	Lapas MUARADUA	6.251.869.000	6.203.446.009	99,23%
19	683593	Lapas KAYU AGUNG	15.606.308.000	15.449.043.290	98,99%
20	406420	Lapas MUARAENIM	17.047.332.000	16.872.610.006	98,98%
21	408815	KANWIL Ditjen KI	1.133.102.000	1.121.253.887	98,95%
22	683996	Lapas NARKOTIKA BANYUASIN	17.245.058.000	17.049.626.688	98,87%
23	109118	Rutan PALEMBANG	24.898.801.000	24.594.824.975	98,78%
24	408813	KANWIL Ditjen PAS	930.531.000	919.152.887	98,78%
25	497733	Lapas PEREMPUAN PALEMBANG	12.708.504.000	12.547.492.236	98,73%
26	653271	Rupbasan BATURAJA	1.607.532.000	1.582.898.293	98,47%
27	408814	KANWIL Ditjen IM	962.973.000	947.900.122	98,43%

No.	Kode Satker	Nama Satker	PAGU	Realisasi	
				Jumlah	%
28	652958	Lapas NARKOTIKA MUARA BELITI	15.402.333.000	15.102.590.395	98,05%
29	408812	KANWIL Ditjen AHU	2.298.000.000	2.249.836.076	97,90%
30	632009	Bapas MUSI RAWAS UTARA	2.878.601.000	2.813.221.623	97,73%
31	406488	Lapas MARTAPURA	8.599.154.000	8.401.318.226	97,70%
32	408816	KANWIL Ditjen PP	275.000.000	268.458.800	97,62%
33	632013	Bapas OKU INDUK	2.466.358.000	2.405.450.324	97,53%
34	408817	KANWIL Ditjen HAM	205.710.000	198.430.500	96,46%
35	408819	KANWIL BPHN	1.120.640.000	1.080.264.000	96,40%
36	653108	Bapas LAHAT	3.994.234.000	3.689.818.696	92,38%
37	406432	Lapas PAGAR ALAM	5.891.025.000	5.396.117.926	91,60%
Total Realisasi			334.969.184.000	331.525.085.193	98,97%

Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Efisiensi Anggaran

Berbicara tentang efisiensi berarti mengukur keberhasilan suatu kegiatan berdasarkan besarnya biaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa semakin sedikit anggaran yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan maka semakin dapat dikatakan efisien. Untuk pengukuran nilai efisiensi anggaran terhadap kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan tahun 2022, digunakan data pada aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Nilai efisiensi tersebut diperoleh dari rata-rata nilai efisiensi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan sehingga diperoleh angka efisiensi sebesar **91%**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78. Nilai Efisiensi Pada Jajaran Kantor Wilayah Sumatera Selatan

No	SATKER	Nilai Efisiensi
KANTOR WILAYAH		
1.	Sekretariat Jenderal	100
2.	Ditjen Administrasi Hukum Umum	100
3.	Ditjen Kekayaan Intelektual	91,82
4.	Balitbang Hukum dan HAM	100

No	SATKER	Nilai Efisiensi
5.	BPHN	85,14
6.	Ditjen Peraturan Perundang - undangan	100
7.	Ditjen Hak Asasi Manusia	84,16
8.	Ditjen Pemasyarakatan	100
9.	Ditjen Imigrasi	100
UPT PEMASYARAKATAN		
1.	Lapas Kelas I Palembang	81,35
2.	LPKA Klas I Palembang	67,2
3.	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	48,94
4.	Lapas Kelas IIA Tanjung Raja	100
5.	Lapas Kelas IIA Lahat	99,79
6.	Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau	87,27
7.	Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti	100
8.	Lapas Kelas IIA Banyuasin	91,52
9.	Lapas Kelas IIB Muara Enim	100
10.	Lapas Kelas IIB Sekayu	54,02
11.	Lapas Kelas IIB Kayu Agung	83,29
12.	Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	100
13.	Lapas Kelas IIB Martapura	100
14.	Lapas Kelas IIB Muara Dua	100
15.	Lapas Kelas IIB Empat Lawang	98,22
16.	Lapas Kelas III Surulangun Rawas	89,52
17.	Lapas Kelas III Pagar Alam	100
18.	Rutan Kelas I Palembang	100
19.	Rutan Kelas II Prabumulih	52,29
20.	Rutan Kelas II Baturaja	100
21.	Bapas Kelas I Palembang	100
22.	Bapas Kelas II Lahat	100
23.	Bapas Kelas II OKU Induk	100
24.	Bapas Kelas II Muratara	100
25.	Rupbasan Kelas I Palembang	100
26.	Rupbasan Kelas II Baturaja	86,74
UPT KEIMIGRASIAN		
1.	Kanim Kelas I TPI Palembang	99,46
2.	Kanim Kelas II Non TPI Muara Enim	66,95
NILAI EFISIENSI		91%

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sebagai respon terhadap e-government, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan telah melakukan serangkaian transformasi dalam rangka penerapan e-government dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di antaranya:

- Aplikasi Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar (Sisumaker) dalam rangka pengelolaan persuratan;
- Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dalam rangka mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian;
- SIKOK SUMSEL (Sistem Informasi Kolektif Online Kanwil Kemenkumham Sumsel) guna mengakomodir seluruh layanan yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, termasuk yang ada di lingkup satuan kerja Pemasarakatan dan Keimigrasian;
- SIPP-O (Sistem Pendaftaran Pelayanan Online) yang memfasilitasi pengunjung untuk menerima layanan Kantor Wilayah sesuai waktu yang mereka tentukan;
- Aplikasi Layanan Konsultasi Hukum Online, yaitu wadah masyarakat untuk bertanya secara *online* mengenai masalah hukum, yang akan dijawab oleh Penyuluh Hukum Kanwil dalam rentang waktu 1x2 jam;
- Aplikasi Pengajuan Pelantikan Notaris & PPNS secara online. Guna menghindari pungli dari pemangku jabatan, inovasi ini membuat calon Notaris/PPNS yang ingin dilantik tidak perlu mendatangi kantor Wilayah, cukup melakukan pendaftaran melalui laman sumsel.kemenkumham.go.id yang bisa diakses secara online dimana saja dan kapan saja;
- Digitalisasi Layanan JDIH Kanwil Sumsel Meliputi aplikasi Buku Pengunjung JDIH Digital dan Sistem Informasi Perpustakaan Hukum untuk mempermudah pencarian lokasi buku, serta Survei Kepuasan Pengunjung Perpustakaan JDIH secara online;
- Sistem Informasi Layanan Izin Tinggal Keimigrasian. Dengan aplikasi ini maka proses layanan izin tinggal orang asing yang diteruskan oleh Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dapat diketahui oleh pemohon, sponsor/penjamin termasuk kelengkapan yang diajukan apakah terpenuhi;
- Sistem Informasi Pelaporan Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan. Inovasi ini memfasilitasi seluruh laporan divisi pemasarakatan dari seluruh UPT Sumsel, yang meliputi laporan bulanan Kamtib, Basan Baran, Rehabilitasi, Pelayanan Tahanan, dan lain-lain;
- Sistem Informasi Manajemen Pertanggungjawaban Keuangan. SIMANJAKU menjadi solusi dalam ketidakseragaman format dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi temuan berulang oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sistem ini memfasilitasi pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- SILANTAS-WAI (Sistem Informasi Layanan Konsultasi Kepegawaian). Sistem ini memfasilitasi pengguna untuk melakukan konsultasi kepegawaian dengan jadwal dan duta kepegawaian yang telah ditentukan secara mandiri, baik secara langsung maupun virtual.
- Sistem Pelabelan QR Code Barang Milik Negara. Dengan melakukan scan pada qr code yang tertera pada BMN, maka akan diketahui detail data BMN tersebut, mulai dari kode barang, merk, perolehan, hingga BAST dan penerima.
- Sistem Pengarsipan Terintegrasi QR-Code. Melalui scanning qr code yang tertera di samping order, maka pengguna dapat mengetahui daftar isi berkas pada order serta dilengkapi dengan soft copy dokumennya yang di upload di google drive

Adapun efisiensi yang dirasakan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan di antaranya:

- Menunjang budaya digital dalam rangka e-government;
- Menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses dan waktu penyelesaian tugas;
- Menunjang budaya kerja pegawai yang dapat bekerja di mana saja;
- Mendukung budaya paperless sehingga terdapat efisiensi sumber daya dan biaya pengantaran naskah dinas atau dokumen.

C. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Adapun sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 variabel, yaitu:

- a) Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- b) Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- c) Efisiensi, bobot 18,2%
- d) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melakukan penginputan sesuai dengan timeline pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut:

- a) Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya;

- b) Semester, batas waktu pada bulan Juli;
 c) Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berikut merupakan rekapitulasi nilai SMART Tahun 2022 per tanggal 4 Januari 2023:

Tabel 79. Rekapitulasi Nilai SMART Tahun 2022

No	SATKER	Komponen Nilai SMART					Nilai	Target
		Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi		
KANTOR WILAYAH								
1.	Sekretariat Jenderal	98,87	98,36	100	20	100	99,59	95,5
2.	Ditjen Administrasi Hukum Umum	97,9	97,88	100	20	100	99,41	95,5
3.	Ditjen Kekayaan Intelektual	98,95	92,68	100	16,73	91,82	96,23	95,5
4.	Balitbang Hukum dan HAM	99,86	42,85	100	20	100	89,59	95,5
5.	BPHN	96,4	81,62	100	14,06	85,14	92,06	95,5
6.	Ditjen Peraturan Perundang - undangan	97,62	84,86	100	20	100	97,01	95,5
7.	Ditjen Hak Asasi Manusia	96,46	99,65	100	13,67	84,16	95,06	95,5
8.	Ditjen Pemasyarakatan	98,78	76,72	100	20	100	95,64	95,5
9.	Ditjen Imigrasi	95,61	99,05	100	20	100	99,4	95,5
UPT PEMASYARAKATAN								
1.	Lapas Kelas I Palembang	99,18	93,36	100	12,54	81,35	93,38	95,5
2.	LPKA Klas I Palembang	99,27	96,35	100	6,88	67,2	89,88	95,5
3.	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	98,09	97,61	97,52	-0,42	48,94	83,7	95,5
4.	Lapas Kelas IIA Tanjung Raja	99,2	96,78	100	20	100	99,34	95,5
5.	Lapas Kelas IIA Lahat	99,87	93,67	100	19,91	99,79	98,78	95,5
6.	Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau	99,73	99,81	100	14,91	87,27	96,3	95,5
7.	Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti	98,05	98,97	100	20	100	99,62	95,5
8.	Lapas Kelas IIA Banyuasin	99,54	98,97	98,22	16,61	91,52	96,57	95,5
9.	Lapas Kelas IIB Muara Enim	98,98	99,5	100	20	100	99,81	95,5
10.	Lapas Kelas IIB Sekayu	98,39	99,26	100	1,61	54,02	86,56	95,5

No	SATKER	Komponen Nilai SMART					Nilai	Target
		Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi		
11.	Lapas Kelas IIB Kayu Agung	98,51	96,98	100	13,32	83,29	94,53	95,5
12.	Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	98,42	92,67	100	20	100	98,51	95,5
13.	Lapas Kelas IIB Martapura	97,7	96,79	100	20	100	99,19	95,5
14.	Lapas Kelas IIB Muara Dua	99,23	93,59	100	20	100	98,76	95,5
15.	Lapas Kelas IIB Empat Lawang	99,34	86,25	100	19,29	98,22	96,92	95,5
16.	Lapas Kelas III Surulangun Rawas	99,82	98,38	100	15,81	89,52	96,69	95,5
17.	Lapas Kelas III Pagar Alam	91,6	89,23	100	20	100	97,23	95,5
18.	Rutan Kelas I Palembang	98,3	94,79	100	20	100	98,89	95,5
19.	Rutan Kelas II Prabumulih	99,08	99,15	100	0,92	52,29	86,11	95,5
20.	Rutan Kelas II Baturaja	99,49	97,08	100	20	100	99,42	95,5
21.	Bapas Kelas I Palembang	98,74	85,31	100	20	100	97,2	95,5
22.	Bapas Kelas II Lahat	92,38	90,75	100	20	100	97,58	95,5
23.	Bapas Kelas II OKU Induk	97,53	87,62	100	20	100	97,51	95,5
24.	Bapas Kelas II Muratara	97,32	98,13	100	20	100	99,4	95,5
25.	Rupbasan Kelas I Palembang	98,05	98,2	100	20	100	99,48	95,5
26.	Rupbasan Kelas II Baturaja	98,47	97,38	100	14,7	86,74	95,58	95,5
UPT KEIMIGRASIAN								
1.	Kanim Kelas I TPI Palembang	96,38	99,67	100	19,78	99,46	99,43	95,5
2.	Kanim Kelas II Non TPI Muara Enim	99,31	99,67	100	6,78	66,95	90,42	95,5

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- a) Revisi DIPA, bobot 10%;
- b) Deviasi halaman III DIPA, bobot 10%;
- c) Data kontrak, bobot 10%;
- d) Penyelesaian tagihan, bobot 10%;
- e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- f) Dispensasi SPM, bobot 10%;
- g) Penyerapan anggaran, bobot 20%;
- h) Capaian output, bobot 25%.

Berikut merupakan rekapitulasi nilai IKPA Tahun 2022.

**Capaian Nilai IKPA
Kanwil Kementerian Hukum & HAM SUMSEL
31 Desember 2022**

No	Kode Satker	Nama Satker	PAGU	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
				Revisi DIPA	Deviasi HaL III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	408814	KANWIL Ditjen IM	962.973.000	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25,00	70,00	70%	100,00
2	497733	Lapas PEREMPUAN PALEMBANG	12.708.504.000	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	9,69	5,00	25,00	99,69	100%	99,69
3	406457	Lapas LUBUK LINGGAU	16.714.826.000	10,00	10,00	20,00	10,00	9,47	10,00	5,00	25,00	99,47	100%	99,47
4	652958	Lapas NARKOTIKA MUARA BELITI	15.402.333.000	10,00	9,47	20,00	10,00	10,00	9,81	5,00	25,00	99,28	100%	99,28
5	406463	Lapas SURULANGUN RAWAS	5.744.718.000	10,00	9,29	20,00	10,00	10,00	9,98	5,00	25,00	99,27	100%	99,27
6	408820	KANWIL BALITBANGKUMHAM	169.839.000	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	9,36	5,00	25,00	79,36	80%	99,20
7	683589	Lapas BANYUASIN	19.800.351.000	10,00	9,11	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	99,11	100%	99,11
8	408815	KANWIL Ditjen KI	1.133.102.000	10,00	8,96	20,00	10,00	10,00	0,00	5,00	25,00	88,96	90%	98,84
9	406494	Rutan PRABUMULIH	9.629.976.000	10,00	9,24	19,76	10,00	10,00	9,77	5,00	25,00	98,77	100%	98,77
10	406420	Lapas MUARAENIM	17.047.332.000	10,00	8,60	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	98,60	100%	98,60
11	406401	Lapas SEKAYU	14.648.803.000	10,00	8,64	20,00	10,00	10,00	9,93	5,00	25,00	98,57	100%	98,57
12	408817	KANWIL Ditjen HAM	205.710.000	10,00	8,98	19,93	0,00	0,00	9,92	5,00	25,00	78,83	80%	98,54
13	683996	Lapas NARKOTIKA BANYUASIN	17.245.058.000	10,00	8,46	19,97	10,00	10,00	9,96	5,00	25,00	98,39	100%	98,39
14	664565	Kanim MUARAENIM	6.976.611.000	10,00	8,50	20,00	10,00	10,00	9,88	5,00	25,00	98,38	100%	98,38
15	683593	Lapas KAYU AGUNG	15.606.308.000	10,00	8,36	20,00	10,00	10,00	9,96	5,00	25,00	98,32	100%	98,32
16	408143	Kanim PALEMBANG	11.085.166.000	10,00	8,65	19,93	10,00	10,00	9,73	5,00	25,00	98,31	100%	98,31
17	653271	Rupbasan BATURAJA	1.607.532.000	10,00	8,50	19,77	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	98,27	100%	98,27
18	406472	Rutan BATURAJA	6.901.536.000	10,00	9,21	18,88	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	98,09	100%	98,09
19	408819	KANWIL BPHN	1.120.640.000	10,00	8,53	19,71	0,00	0,00	9,91	5,00	25,00	78,15	80%	97,69
20	632009	Bapas MUSI RAWAS UTARA	2.878.601.000	10,00	8,02	20,00	10,00	10,00	9,57	5,00	25,00	97,59	100%	97,59
21	408812	KANWIL Ditjen AHU	2.298.000.000	10,00	7,58	19,99	10,00	10,00	0,00	5,00	25,00	87,57	90%	97,30
22	109118	Rutan PALEMBANG	24.898.801.000	10,00	7,43	20,00	10,00	10,00	9,84	5,00	25,00	97,27	100%	97,27
23	653108	Bapas LAHAT	3.994.234.000	10,00	7,15	19,98	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	97,13	100%	97,13
24	406381	Lapas TANJUNG RAJA	14.354.319.000	10,00	7,05	19,94	10,00	10,00	9,97	5,00	25,00	96,96	100%	96,96
25	406488	Lapas MARTAPURA	8.599.154.000	10,00	8,11	20,00	8,86	10,00	9,96	5,00	25,00	96,93	100%	96,93
26	406402	Lapas LAHAT	9.724.801.000	10,00	7,74	20,00	9,05	10,00	10,00	5,00	25,00	96,79	100%	96,79
27	406539	LPKA PALEMBANG	9.425.335.000	10,00	7,57	20,00	10,00	10,00	9,08	5,00	25,00	96,65	100%	96,65
28	626115	Rupbasan PALEMBANG	3.021.852.000	10,00	6,82	20,00	10,00	10,00	9,80	5,00	25,00	96,62	100%	96,62
29	406441	Lapas EMPAT LAWANG	5.584.538.000	10,00	7,74	20,00	8,86	10,00	10,00	5,00	25,00	96,60	100%	96,60
30	406375	Lapas PALEMBANG	24.409.563.000	10,00	7,88	20,00	8,86	10,00	9,77	5,00	25,00	96,51	100%	96,51
31	408816	KANWIL Ditjen PP	275.000.000	10,00	8,61	20,00	0,00	0,00	8,14	5,00	25,00	76,75	80%	95,94
32	406426	Lapas MUARADUA	6.251.869.000	10,00	7,28	20,00	8,60	10,00	9,98	5,00	25,00	95,86	100%	95,86
33	408818	KANWIL SETJEN	26.337.462.000	10,00	8,77	19,60	9,30	9,57	8,59	5,00	25,00	95,83	100%	95,83
34	632013	Bapas OKU INDUK	2.466.358.000	10,00	5,14	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00	95,14	100%	95,14
35	406369	Bapas PALEMBANG	8.916.423.000	10,00	5,46	20,00	10,00	10,00	9,65	5,00	25,00	95,11	100%	95,11
36	408813	KANWIL Ditjen PAS	930.531.000	10,00	9,17	18,61	7,14	10,00	9,23	5,00	25,00	94,15	100%	94,15
37	406432	Lapas PAGAR ALAM	5.891.025.000	10,00	5,07	19,65	7,71	9,38	9,93	5,00	25,00	91,74	100%	91,74
RATA - RATA NILAI IKPA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN														97,48

Capaian Kinerja Anggaran diperoleh dari dua variable yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen. Berikut ini merupakan rekapitulasi nilai capaian kinerja anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Tabel 80. Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022

No	SATKER	Nilai SMART	Nilai IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
KANTOR WILAYAH				
1.	Sekretariat Jenderal	99,59	95,83	98,086
2.	Ditjen Administrasi Hukum Umum	99,41	97,3	98,566
3.	Ditjen Kekayaan Intelektual	96,23	98,84	97,274
4.	Balitbang Hukum dan HAM	89,59	99,2	93,434
5.	BPHN	92,06	97,69	94,312
6.	Ditjen Peraturan Perundang - undangan	97,01	95,94	96,582
7.	Ditjen Hak Asasi Manusia	95,06	98,54	96,452
8.	Ditjen Pemasarakatan	95,64	94,15	95,044
9.	Ditjen Imigrasi	99,4	100	99,64
UPT PEMASYARAKATAN				
1.	Lapas Kelas I Palembang	93,38	96,51	94,632
2.	LPKA Klas I Palembang	89,88	96,65	92,588
3.	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	83,7	99,69	90,096
4.	Lapas Kelas IIA Tanjung Raja	99,34	96,96	98,388
5.	Lapas Kelas IIA Lahat	98,78	96,79	97,984
6.	Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau	96,3	99,47	97,568
7.	Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti	99,62	99,28	99,484
8.	Lapas Kelas IIA Banyuasin	96,57	99,11	97,586
9.	Lapas Kelas IIB Muara Enim	99,81	98,6	99,326
10.	Lapas Kelas IIB Sekayu	86,56	98,57	91,364
11.	Lapas Kelas IIB Kayu Agung	94,53	98,32	96,046
12.	Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	98,51	98,39	98,462
13.	Lapas Kelas IIB Martapura	99,19	96,93	98,286
14.	Lapas Kelas IIB Muara Dua	98,76	95,86	97,6
15.	Lapas Kelas IIB Empat Lawang	96,92	96,6	96,792
16.	Lapas Kelas III Surulangun Rawas	96,69	99,27	97,722
17.	Lapas Kelas III Pagar Alam	97,23	91,74	95,034
18.	Rutan Kelas I Palembang	98,89	97,27	98,242
19.	Rutan Kelas II Prabumulih	86,11	98,77	91,174
20.	Rutan Kelas II Baturaja	99,42	98,07	98,88
21.	Bapas Kelas I Palembang	97,2	95,11	96,364
22.	Bapas Kelas II Lahat	97,58	97,13	97,4
23.	Bapas Kelas II OKU Induk	97,51	95,14	96,562
24.	Bapas Kelas II Muratara	99,4	97,59	98,676
25.	Rupbasan Kelas I Palembang	99,48	96,62	98,336

26.	Rupbasan Kelas II Baturaja	95,58	98,27	96,656
UPT KEIMIGRASIAN				
1.	Kanim Kelas I TPI Palembang	99,43	98,31	98,982
2.	Kanim Kelas II Non TPI Muara Enim	90,42	98,38	93,604

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/subkegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-performance setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

DIVISI ADMINISTRASI									

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tipe	Tahun	Kategori	Target				Keterangan
					2021	2022	2023	2024	
1	Debaran Kinerja Pegawai	TWA	0	0	0	0	0	0	Agustus - Juli
					0	0	0	0	Agustus - Desember
					0	0	0	0	Oktober - Desember
					0	0	0	0	Oktober - Desember
2	Indeks Persepsi Dengan Kesehatan, Kompetensi, Aman, dan Tahapan	TWA	15	15	15	15	15	15	Januari - Februari - Maret
					20	15	20	15	April - Juli - Juni
					20	15	20	15	Agustus - Desember
					20	15	14	700	Oktober - Desember - diluar dari data indikator - indikator yang harus di peroleh di bulan November tahun 2022 yang dibagi dengan total jumlah hari dan satuan responden Desember didapat dari data indikator - indikator yang harus di peroleh di bulan Desember tahun 2022 yang dibagi dengan total jumlah hari dan satuan responden
3	Terdapatnya Penyelenggaraan Penyelenggaraan yang	TWA	0	0	0	0	0	0	Januari - Februari - Maret
					0	0	0	0	April - Desember

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tipe	Tahun	Kategori	Target				Keterangan
					2021	2022	2023	2024	
4	Indeks Pelayanan Tahanan	TWA	17	17	17	17	17	17	Januari - Februari - Maret
					17	17	17	17	April - Juli - Juni
					17	17	17	17	Agustus - Desember
					17	17	17	17	Oktober - Desember - penyuluhan dan ODB dan Rukan - Oktober 2 kali dan satuan yang baru masuk 2. satuan adalah dengan pelayanan hukum pidana 3. jumlah satuan monitoring yang di lakukan sama saat habis masa penahanan rni
5	Terdapatnya Penyelenggaraan Penyelenggaraan yang Aman dan Nyata	TWA	0	0	0	0	0	0	Januari - Februari - Maret
					0	0	0	0	April - Desember
					0	0	0	0	Oktober - Desember - penyuluhan dan ODB dan Rukan - Oktober 2 kali dan satuan yang baru masuk 2. satuan adalah dengan pelayanan hukum pidana 3. jumlah satuan monitoring yang di lakukan sama saat habis masa penahanan rni
					0	0	0	0	Oktober - Desember - penyuluhan dan ODB dan Rukan - Oktober 2 kali dan satuan yang baru masuk 2. satuan adalah dengan pelayanan hukum pidana 3. jumlah satuan monitoring yang di lakukan sama saat habis masa penahanan rni

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

...e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unit_kerja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

Mengglorifikasi Pelayanan Tahanan di Wilayah Sekeloa Samar + -	Persentase meluncurkannya tahanan yang beres-beres + -	80% Tahanan 80	TW1	20	%	20	100	Januari Februari Maret
			TW2	20	%	20	100	April Mei Juni
			TW3	20	%	20	100	Juli Agustus September
			TW4	20	%	20	115	Oktober November Desember
Catatan: November jumlah tahanan yang beres-beres (112) dibagi jumlah tahanan (224) atau 100% + 5,36% jumlah tahanan yang beres-beres bulan November (112) dibagi jumlah tahanan (224) atau 100% + 5,36% Desember jumlah tahanan yang beres-beres 20 dibagi dengan jumlah tahanan 2188 atau 100% + 0,92% meluncurkannya tahanan yang beres-beres.								

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

...e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unit_kerja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

Persentase Tahanan yang mempersiapkan Layanan Penyuluhan Hukum + -	Persentase Tahanan yang mempersiapkan Layanan Penyuluhan Hukum + -	80% Tahanan 80	TW1	20	%	20	100	Januari Februari Maret
			TW2	20	%	20	100	April Mei Juni
			TW3	20	%	20	100	Juli Agustus September
			TW4	20	%	20	100	Oktober November Desember
Catatan: November jumlah tahanan yang mempersiapkan penyuluhan hukum (118) dibagi jumlah tahanan (224) atau 100% Desember jumlah tahanan yang mempersiapkan layanan penyuluhan hukum 122 atau jumlah tahanan 224 atau 100% + 5,36% dilakukan 3 hingga 2 hari kegiatan penyuluhan dengan tahanan beres-beres.								

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

8 2 Persentase narasopane yang mendapatkan hak resmi + - ✓ ✗ Satuan Kinerja Pegawai:	80% Triwulan II	TW1	2	%	2	100	Januari-Februari-Maret
		TW2	30	%	30	100	April-Mei-Juni
		TW3	1	%	1	100	Juli-Agustus-September
		TW4	4	%	4	100	Oktober-Desember

Oktober-Desember Untuk bulan Desember 2021 ada urusan resmi Desember yaitu bulan Desember diumumkan Resmi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 Sebanyak 12 Orang BPP Ta-Sumatera Selatan

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

8 3 Persentase narasopane yang mendapatkan hak integrasi + - ✓ ✗ Satuan Kinerja Pegawai:	80% Triwulan III	TW1	20	%	20	100	Januari-Februari-Maret
		TW2	20	%	20	100	April-Mei-Juni
		TW3	20	%	20	100	Juli-Agustus-September
		TW4	20	%	103	815	Oktober-Desember

Oktober-Desember narasopane yang sudah memenuhi syarat dan mendapatkan hak integrasi sebesar 70% sampai di bulan November di Lasso/Rutan

8 4 Persentase narasopane yang mendapatkan hak pendanaan + - ✓ ✗ Satuan Kinerja Pegawai:	80% Triwulan II	TW1	20	%	20	100	Januari-Februari-Maret
		TW2	20	%	20	100	April-Mei-Juni
		TW3	20	%	20	100	Juli-Agustus-September
		TW4	20	%	179,6	900	Oktober-Desember

Oktober-Desember jumlah narasopane yang mendapatkan hak

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unitkerja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

<p>Perentase narasumber yang mendapatkan hasil pendidikan</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p>	<p>30% Timbulan</p>	TW1	20	%	20	100	Januari, Februari, Maret
		TW2	20	%	20	100	April, Mei, Juni
		TW3	20	%	20	100	Juli, Agustus, September
		TW4	20	%	175	900	Oktober
		<p>Oktober: November (jumlah narasumber yang mendapatkan hasil pendidikan) bagi jumlah narasumber yang akan menjadi latar belakang penelitian adalah 100%. Desember: jumlah narasumber yang mendapatkan hasil pendidikan 3857 dibagi narasumber yang total memiliki latar belakang penelitian 3402 adalah 100%.</p>					

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unitkerja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

<p>Perentase narasumber hasil tinggi yang berubah perkulanya menjadi latar belakang penelitian</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p>	<p>15% Timbulan</p>	TW1	3	%	3	100	Januari, Februari, Maret
		TW2	4	%	4	100	April, Mei, Juni
		TW3	3	%	3	100	Juli, Agustus, September
		TW4	3	%	102.01	3482	Oktober
		<p>Oktober: November: narasumber yang tinggi yang berubah perkulanya menjadi latar belakang penelitian adalah 3482</p>					

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unit_berja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

4 Persentase narasabah yang mendapat pendataan dan penilaian ulang Saran/Usul + + + + + Standar Kinerja Pegawai:	25% Tahunan 0	TW1	4	%	4	100	Januari, Februari, Maret
		TW2	4	%	4	100	April, Mei, Juni
		TW3	11	%	11	100	Juli, Agustus, September
		TW4	7	%	7	100	Oktober
		November 2022 narasabah yang telah beres dari total keseluruhan narasabah di upl 12.813 Desember untuk kulan Desember 2022 ada					

5 Persentase narasabah yang bekerja dan produktif + + + + + Standar Kinerja Pegawai:	47% Tahunan 0	TW1	18	%	18	100	Januari, Februari, Maret
		TW2	18	%	18	100	April, Mei, Juni
		TW3	18	%	18	100	Juli, Agustus, September
		TW4	18	%	64	337	Oktober
		November jumlah narasabah yang bekerja dan produktif sebanyak 171 dari jumlah total 422 narasabah yang memiliki nilai 100% Desember jumlah narasabah yang bekerja dan produktif sebanyak 173 dari jumlah total 422 narasabah yang memiliki nilai 100%					

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unit_berja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

6 Melaksanakan Pelayanan Pengukuran Bekerja dan Nilai-nilai sesuai Standar +	75% Tahunan 0	TW1	18	%	18	100	Januari, Februari, Maret
		TW2	20	%	20	100	April, Mei, Juni
		TW3	18	%	18	100	Juli, Agustus, September
		TW4	20	%	18	90	Oktober
		November Tahun 2022 belumlahnya					

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unitkerja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

<p>9. Meningkatkan Pelayanan Pengiriman Bahan Baku di Muka Balai Besar</p>	<p>Perentase benda stian dan barang rampasan yang terdapat kualitas dan kuantitasnya</p>	<p>50% Triwulan W</p>	TW1	10	%	10	100	Januari, Februari, Maret
			TW2	20	%	20	100	April, Mei, Juni
			TW3	10	%	10	100	Juli, Agustus, September
			TW4	20	%	10	50	Oktober, November, Tahun Ekspedientannya pendataan terhadap jumlah bahan baku yang akan dihang serta bahan baku yang mengalami ekspansi

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unitkerja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

<p>10. Meningkatkan pelayanan pengiriman stan rampasan dan persediaan tak perdikan dan atas data sur terhadap di wilayah sekitar standar</p>	<p>Perentase stan uan produk rampasan atau materialnya</p>	<p>50% Triwulan W</p>	TW1	10	%	10	100	Januari, Februari, Maret
			TW2	10	%	10	100	April, Mei, Juni
			TW3	10	%	10	100	Juli, Agustus, September
			TW4	10	%	10	100	Oktober, November, Tahun Ekspedientannya ekspansi terhadap Bahan Baku yang telah inkract

E-PERFORMANCE SISTEM AKUPUNTUR

e-performance.kemkes.kemham.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unit_kerja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

10. Mengembangkan kegiatan pemertanian klien pemertanian dan pemertanian hal pemertanian klien akan pada saat lembaga di masing-masing instansi

10 1

Perentase klien usia produktif memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga

Sasaran Kinerja Pegawai

33 % Tahunan

TW1	12	%	12	100	Januari - Februari - Maret
TW2	15	%	15	100	April - Mei - Juni
TW3	10	%	10	100	Juli - Agustus - September
TW4	13	%	42	323	Oktober - November - Desember

Oktober: November klien usia produktif yang memperoleh pekerjaan atau melanjutkan pekerjaan sama sebelum melakukan tindak pidana mencapai 20%. Hal ini disebabkan karena klien kesulitan memperoleh pekerjaan, tidak memperoleh pekerjaan atau terputus dari akses mendapatkan Desember klien usia produktif yang memperoleh pekerjaan atau melanjutkan pekerjaan sama sebelum melakukan tindakan pidana (17 orang), tidak dengan jumlah klien usia produktif sebanyak (3000 klien) yang 100% yang sebesar 4,2% hal ini disebabkan karena klien kesulitan memperoleh pekerjaan, tidak memperoleh

E-PERFORMANCE SISTEM AKUPUNTUR

e-performance.kemkes.kemham.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unit_kerja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

11. Perentase klien lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial pekerja

11 2

Perentase klien lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial pekerja

Sasaran Kinerja Pegawai

80 % Tahunan

TW1	18	%	18	100	Januari - Februari - Maret
TW2	18	%	18	100	April - Mei - Juni
TW3	12	%	12	100	Juli - Agustus - September
TW4	32	%	134	893	Oktober - November - Desember

Oktober: November Tahun 2021 anak yang di terima pekerja mencapai 33 orang tahun 2022 anak yang di terima mencapai 68 orang. Dari data tersebut dapat persentase penerima bantuan sosial pekerja mencapai 70%. Desember bulan Desember 2022 anak yang di terima pekerja mencapai 11 orang dari 18 kali pemertanian dari data tersebut di dapat persentase adalah bahwa pekerja mencapai 37,2%

12. Perentase klien yang mendapatkan hal

12 3

Perentase klien yang mendapatkan hal

Sasaran Kinerja Pegawai

80 % Tahunan

TW1	20	%	20	100	Januari - Februari - Maret
TW2	20	%	20	100	April - Mei - Juni
TW3	20	%	20	100	Juli

E-PERFORMANCE SISTEM AKUPUN

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

10. 3	Persentase Analis yang memisahkan hal. 	80% Tawaran W	TW1	20	%	20	100	Januari, Februari, Maret
			TW2	20	%	20	100	April, Mei, Juni
			TW3	20	%	20	100	Juli, Agustus, September
			TW4	20	%	114	525	Oktober
			November Tahun 2022 sudah 72% analis selesai yang memisahkan hal. Hapus. Desember jumlah analis yang melakukan pendataan sebanyak 36 analis dari 114 analis, job persentase mencapai 30,4%.					
10. 4	Persentase analis yang mengikuti pendidikan formal dan non formal. 	80% Tawaran W	TW1	20	%	20	100	Januari, Februari, Maret
			TW2	20	%	20	100	April, Mei, Juni
			TW3	20	%	20	100	Juli, Agustus, September
			TW4	20	%	87	433	Oktober
			November Baru 40% analis selesai yang mengikuti pendidikan formal dan non formal Desember Jumlah					

E-PERFORMANCE SISTEM AKUPUN

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

11. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan dan Kemandirian	11. 1 Persentase Pengikuti yang tersertifikasi. 	80% Tawaran W	TW1	20	%	20	100	Januari, Februari, Maret
			TW2	20	%	20	100	April, Mei, Juni
			TW3	20	%	20	100	Juli, Agustus, September
			TW4	20	%	113	565	Oktober
			November jumlah pengikut yang masuk pada UPI hanya 80%					

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

11. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Perawatan dan Pemeliharaan di Bidang Ketenagalistrikan	11.1	1	Persentase Pengajuan yang ditindaklanjuti	30% Tujuan 30	TW1	20	%	20	100	Januari, Februari, Maret
					TW2	20	%	20	100	April, Mei, Juni
					TW3	20	%	20	100	Juli, Agustus, September
					TW4	20	%	113	565	Oktober
					<p>Oktober: November jumlah pengajuan yang masuk pada UPTI Mura Baru Desember: jumlah pengajuan yang masuk pada rumah rusak (14) dan (144) seluruhnya sebanyak (16) pengajuan yang dilaksanakan pada rumah rusak</p>					

11.2	2	Persentase Pengajuan-gangguan rumah	30% Tujuan 30	TW1	17	%	17	100	Januari, Februari, Maret
				TW2	18	%	18	100	April, Mei, Juni
				TW3	17	%	17	100	Juli, Agustus, September
				TW4	18	%	107.2	596	Oktober
				<p>Oktober: November jumlah gangguan rumah yang dapat diorganisir pada rumah rusak/rukan CPM sebanyak 20x. Jumlah seluruh gangguan rumah yang terjadi 27x. Desember jumlah seluruh gangguan rumah yang dapat diorganisir sebanyak 11 kali, jumlah seluruh gangguan rumah 22 kali</p>					

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

11.3	3	Persentase realisasi dan DPM terhadap total kebutuhan Tahanan/keaspesifikasi Paksi-Gangguan Rumah	80% Tujuan 80	TW1	20	%	20	100	Januari, Februari, Maret
				TW2	20	%	20	100	April, Mei, Juni
				TW3	20	%	20	100	Juli, Agustus, September
				TW4	20	%	204	1020	Oktober
				<p>Oktober: November 2022 ada</p>					

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unitkerja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

	11	<p>Penentase keputihan dan Delay terhadap line layanan</p> <p>Tindakan/Target/Indikator: Penaw. Gangguan Kritis</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p>	80% Tawaran W	<table border="1"> <tr><td>TW1</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>100</td><td>Jumlah seluruh gangguan kritis 22 kali</td></tr> <tr><td>TW2</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>100</td><td>Januari: Februari: Maret:</td></tr> <tr><td>TW3</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>100</td><td>April: Mei: Juni:</td></tr> <tr><td>TW4</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>100</td><td>Juli: Agustus: September:</td></tr> <tr><td>TW4</td><td>20</td><td>%</td><td>204</td><td>1020</td><td>Oktober: November: Total ada sebanyak 204 gangguan kritis yang melebihi target yang melebihi target. Desember: Total ada sebanyak 204 gangguan kritis yang melebihi target yang melebihi target.</td></tr> </table>	TW1	20	%	20	100	Jumlah seluruh gangguan kritis 22 kali	TW2	20	%	20	100	Januari: Februari: Maret:	TW3	20	%	20	100	April: Mei: Juni:	TW4	20	%	20	100	Juli: Agustus: September:	TW4	20	%	204	1020	Oktober: November: Total ada sebanyak 204 gangguan kritis yang melebihi target yang melebihi target. Desember: Total ada sebanyak 204 gangguan kritis yang melebihi target yang melebihi target.
TW1	20	%	20	100	Jumlah seluruh gangguan kritis 22 kali																													
TW2	20	%	20	100	Januari: Februari: Maret:																													
TW3	20	%	20	100	April: Mei: Juni:																													
TW4	20	%	20	100	Juli: Agustus: September:																													
TW4	20	%	204	1020	Oktober: November: Total ada sebanyak 204 gangguan kritis yang melebihi target yang melebihi target. Desember: Total ada sebanyak 204 gangguan kritis yang melebihi target yang melebihi target.																													
	11	<p>Penentase pemulian jumlah keaman pada gangguan kritis secara lumpat</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p>	70% Tawaran W	<table border="1"> <tr><td>TW1</td><td>17</td><td>%</td><td>17</td><td>100</td><td>yang melebihi target</td></tr> <tr><td>TW2</td><td>18</td><td>%</td><td>18</td><td>100</td><td>Januari: Februari: Maret:</td></tr> <tr><td>TW3</td><td>15</td><td>%</td><td>11</td><td>100</td><td>April: Mei: Juni:</td></tr> <tr><td>TW4</td><td>18</td><td>%</td><td>41.25</td><td>225</td><td>Juli: Agustus: September: Oktober: November: Total ada 27 gangguan kritis sebanyak 20 gangguan kritis yang melebihi target yang melebihi target.</td></tr> </table>	TW1	17	%	17	100	yang melebihi target	TW2	18	%	18	100	Januari: Februari: Maret:	TW3	15	%	11	100	April: Mei: Juni:	TW4	18	%	41.25	225	Juli: Agustus: September: Oktober: November: Total ada 27 gangguan kritis sebanyak 20 gangguan kritis yang melebihi target yang melebihi target.						
TW1	17	%	17	100	yang melebihi target																													
TW2	18	%	18	100	Januari: Februari: Maret:																													
TW3	15	%	11	100	April: Mei: Juni:																													
TW4	18	%	41.25	225	Juli: Agustus: September: Oktober: November: Total ada 27 gangguan kritis sebanyak 20 gangguan kritis yang melebihi target yang melebihi target.																													

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unitkerja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

	11	<p>Penentase pemulian jumlah keaman pada gangguan kritis secara lumpat</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p>	70% Tawaran W	<table border="1"> <tr><td>TW1</td><td>17</td><td>%</td><td>17</td><td>100</td><td>yang melebihi target</td></tr> <tr><td>TW2</td><td>18</td><td>%</td><td>18</td><td>100</td><td>Januari: Februari: Maret:</td></tr> <tr><td>TW3</td><td>17</td><td>%</td><td>17</td><td>100</td><td>April: Mei: Juni:</td></tr> <tr><td>TW4</td><td>18</td><td>%</td><td>41.25</td><td>225</td><td>Juli: Agustus: September: Oktober: Total ada 27 gangguan kritis sebanyak 20 gangguan kritis yang melebihi target yang melebihi target.</td></tr> </table>	TW1	17	%	17	100	yang melebihi target	TW2	18	%	18	100	Januari: Februari: Maret:	TW3	17	%	17	100	April: Mei: Juni:	TW4	18	%	41.25	225	Juli: Agustus: September: Oktober: Total ada 27 gangguan kritis sebanyak 20 gangguan kritis yang melebihi target yang melebihi target.
TW1	17	%	17	100	yang melebihi target																							
TW2	18	%	18	100	Januari: Februari: Maret:																							
TW3	17	%	17	100	April: Mei: Juni:																							
TW4	18	%	41.25	225	Juli: Agustus: September: Oktober: Total ada 27 gangguan kritis sebanyak 20 gangguan kritis yang melebihi target yang melebihi target.																							
10	11	<p>Penentase pengajuan yang ditindaklanjuti sesuai standar</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai:</p>	80% Tawaran W	<table border="1"> <tr><td>TW1</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>100</td><td>yang melebihi target</td></tr> <tr><td>TW2</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>100</td><td>Januari: Februari: Maret:</td></tr> <tr><td>TW3</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>100</td><td>April: Mei: Juni:</td></tr> <tr><td>TW4</td><td>20</td><td>%</td><td>113</td><td>565</td><td>Juli: Agustus: September: Oktober: Total ada 113 pengajuan yang ditindaklanjuti sesuai standar.</td></tr> </table>	TW1	20	%	20	100	yang melebihi target	TW2	20	%	20	100	Januari: Februari: Maret:	TW3	20	%	20	100	April: Mei: Juni:	TW4	20	%	113	565	Juli: Agustus: September: Oktober: Total ada 113 pengajuan yang ditindaklanjuti sesuai standar.
TW1	20	%	20	100	yang melebihi target																							
TW2	20	%	20	100	Januari: Februari: Maret:																							
TW3	20	%	20	100	April: Mei: Juni:																							
TW4	20	%	113	565	Juli: Agustus: September: Oktober: Total ada 113 pengajuan yang ditindaklanjuti sesuai standar.																							

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

...e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unitkerja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

12. Meningkatkan Pelayanan Pemaman dan Keamban di tingkat sekret standar	12.1	Persentase gangguan yang timbul/terjadi sesuai standar	80% Triwulan II	TW1	20	%	20	100	Januari, Februari, Maret
				TW2	20	%	20	100	April, Mei, Juni
				TW3	20	%	20	100	Juli, Agustus, September
				TW4	20	%	113	565	Oktober: November jumlah gangguan yang masuk pada 270 Maka Beras Desember jumlah gangguan yang masuk pada tahun sebanyak 113 dan ke-22 atau 22% dari jumlah gangguan yang diharapkan pada tahun tersebut
Sasaran Kinerja Pegawai:									

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

...e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unitkerja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

12. Meningkatkan Pelayanan Pemaman dan Keamban di tingkat sekret standar	12.2	Persentase gangguan karbo yang dapat diagan	70% Triwulan II	TW1	17	%	17	100	Januari, Februari, Maret
				TW2	18	%	18	100	April, Mei, Juni
				TW3	17	%	17	100	Juli, Agustus, September
				TW4	18	%	107.2	596	Oktober: November jumlah gangguan karbo yang dapat diagan pada seluruh tahun sebanyak 107,2. Jumlah seluruh gangguan karbo yang terjadi 27% Desember jumlah gangguan karbo yang dapat diagan sebanyak 22 kali, jumlah seluruh gangguan karbo 22 kali
Sasaran Kinerja Pegawai:									

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

e-performance.kemendikhum.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unitkerja=2711

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

12 3 Persentase realisasi dan capaian terhadap task terdapat di Tindakan/kegiatan/realisasi yang gangguan hamis + - Sasaran Kinerja Pegawai:	80% Tindakan 30	TW1	20	%	20	100	Januari, Februari, Maret
		TW2	20	%	20	100	April, Mei, Juni
		TW3	20	%	20	100	Juli, Agustus, September
		TW4	20	%	20	100	Oktober
		TW4	20	%	20	100	November, Total ada sebanyak realisasi data yang mengulang penganggaran
12 4 Persentase pemulhan kondisi keamanan pasca gangguan hamis secara jumlah + - Sasaran Kinerja Pegawai:	70% Tindakan 30	TW1	17	%	17	100	Januari, Februari, Maret
		TW2	18	%	18	100	April, Mei, Juni
		TW3	17	%	17	100	Juli, Agustus, September
		TW4	18	%	40.25	229	Oktober, November Dan total 27 gangguan hamis sebanyak 20 gangguan hamis yang masih dalam proses pemulhan Desember jumlah pemulhan hamis sebanyak 20 gangguan hamis secara jumlah & kali ulang jumlah gangguan hamis 16 kali nilai 100%
		TW4	18	%	40.25	229	Oktober, November Dan total 27 gangguan hamis sebanyak 20 gangguan hamis yang masih dalam proses pemulhan Desember jumlah pemulhan hamis sebanyak 20 gangguan hamis secara jumlah & kali ulang jumlah gangguan hamis 16 kali nilai 100%

Urutkan No

© BIRO PERENCANAAN KEMENDIKHAM 2023

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

E-PERFORMANCE SISTEM AKUP: x +

← → ↻ e-performance.kamerikumsel.go.id/misn.php?mod=kinerja&bid_tahun=2022&bid_unit_berja=2713

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2022
DIVISI PELAYANAN HUKUM SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CAKUPAN		TARGET				REALISASI			
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESMIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRA	
1	Tertujuhnya urusan administrasi hukum umum di Wilayah Persepsi Sumatera Selatan	1	1. Persentase penanganan PHBP Administrasi Hukum Umum			5 Persentase Triwulan II	Triw	1,2	Persentase	1,2	100	Januari: Pemantauan PHBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Persepsi Sumatera Selatan Bulan Januari Februari: Pemantauan PHBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Persepsi Sumatera Selatan Bulan Februari Maret: Pemantauan PHBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Persepsi Sumatera Selatan Bulan Maret	
			Sasaran Kinerja Pegawai:										
							Triw	1,2	Persentase	1,2	100	April: Pemantauan PHBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Persepsi Sumatera Selatan Bulan April Mai: Pemantauan PHBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Persepsi Sumatera Selatan Bulan Mei Juni: Pemantauan PHBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Persepsi Sumatera Selatan Bulan Juni	

Rain coming

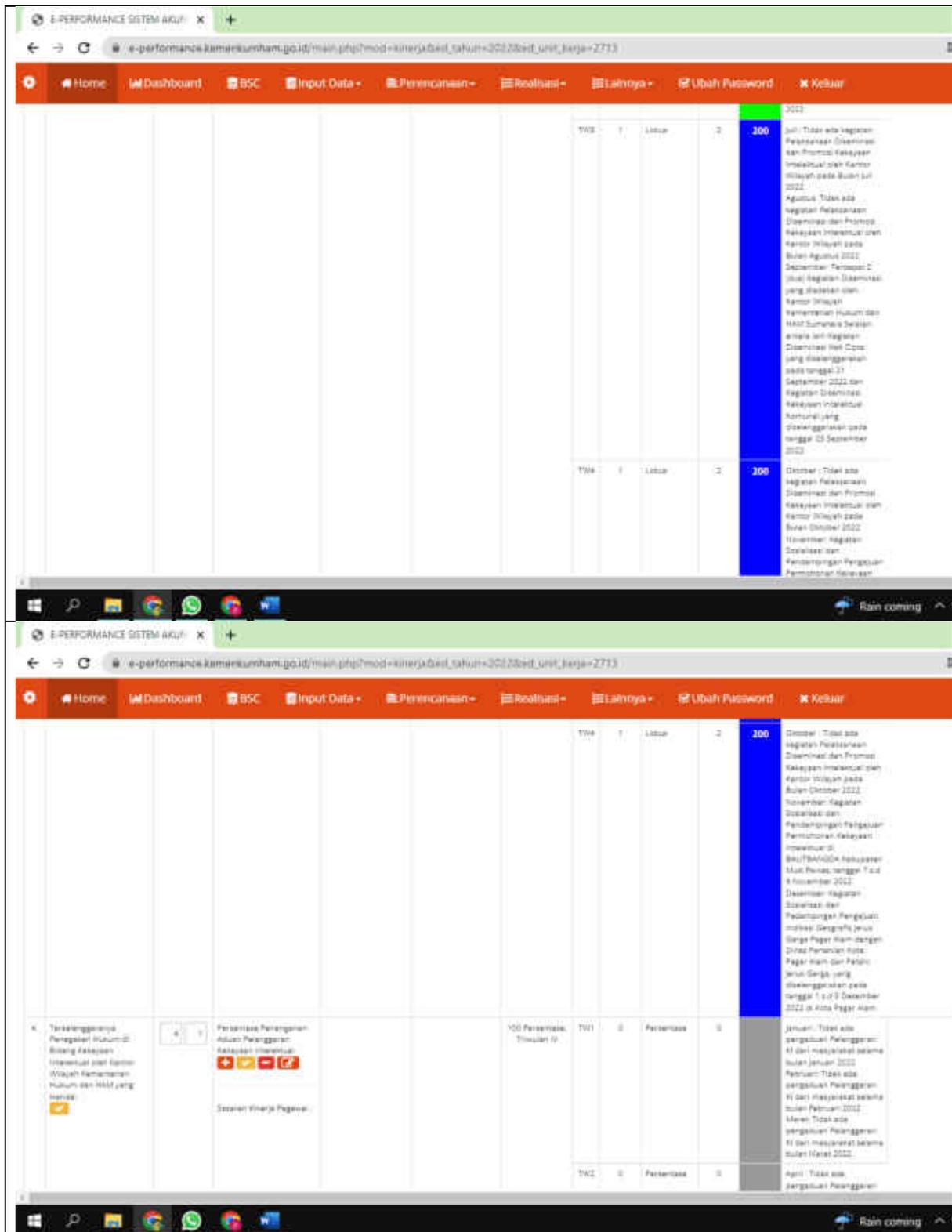
E-PERFORMANCE SISTEM AKUP: x +

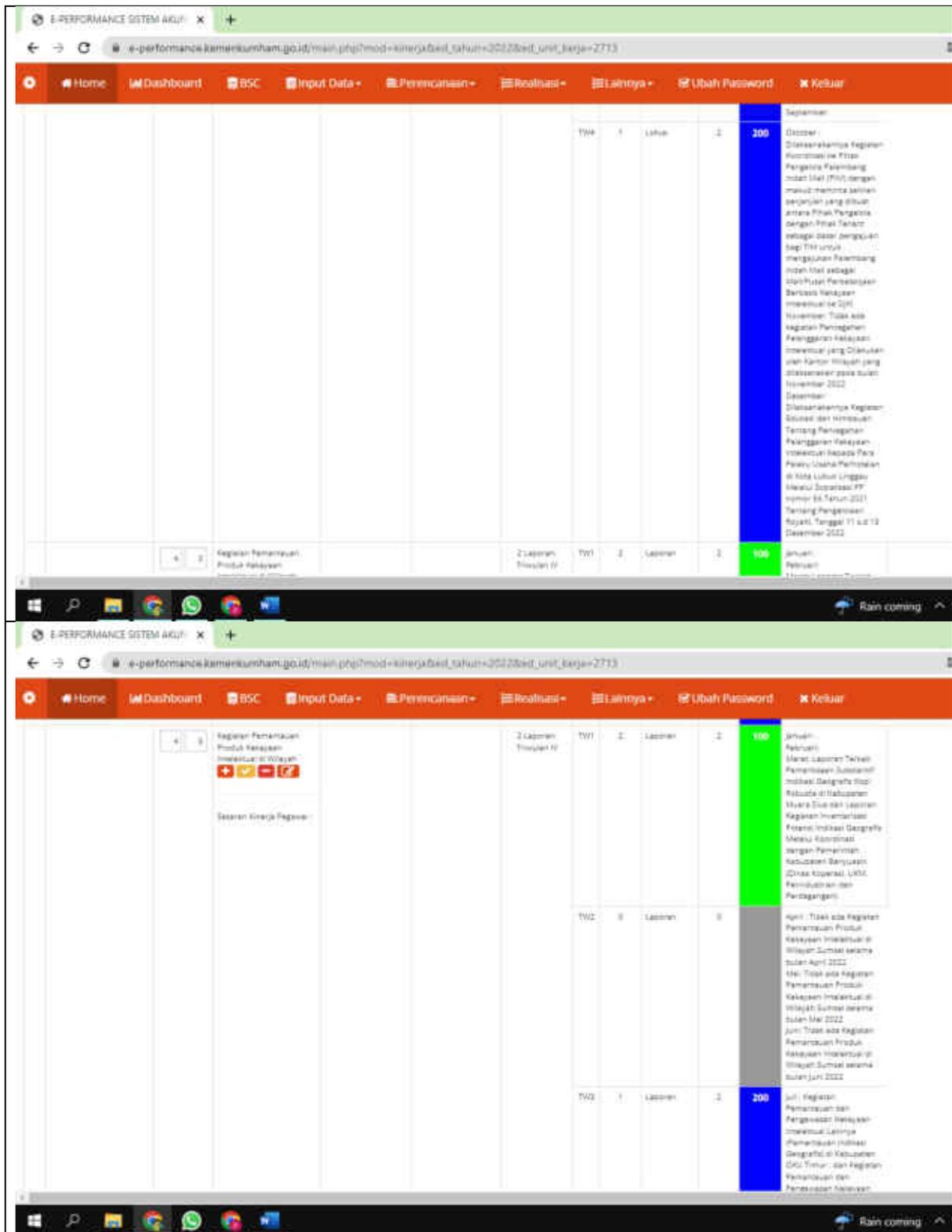
← → ↻ e-performance.kamerikumsel.go.id/misn.php?mod=kinerja&bid_tahun=2022&bid_unit_berja=2713

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

							Triw	1,2	Persentase	1,2	100	Juli: Pemantauan PHBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Persepsi Sumatera Selatan Bulan Juli Agustus: Pemantauan PHBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Persepsi Sumatera Selatan Bulan Agustus September: Pemantauan PHBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Persepsi Sumatera Selatan Bulan September	
							Triw	1,2	Persentase	1,2	100	Oktober: Pemantauan PHBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Persepsi Sumatera Selatan Bulan Oktober November: Pemantauan PHBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Persepsi Sumatera Selatan Bulan November Desember: Pemantauan PHBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Persepsi Sumatera Selatan Bulan Desember	

Rain coming





E-PERFORMANCE SISTEM AKUJI

e-performance.kamerasumham.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unitkerja=2713

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

					104	4	Rencana	4	100	<p>Oktober - Sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 telah ada 3 Rapsoda</p> <p>November - Sampai dengan bulan November tahun 2022 telah ada 2 Rapsoda</p> <p>Desember - Sampai dengan bulan Desember tahun 2022 telah ada 2 Rapsoda dan 1 Rapsoda</p>
5. Terselenggaranya pertemuan-pertemuan perundang-undangan	8	1	Jumlah pertemuan perundang-undangan di daerah yang dilaksanakan sebanyak	23 Orang Trikulit IV	101	22	Orang	22	100	<p>Januari - Pelaksanaan pengembangan kompetensi bimbingan teknis perancangan peraturan daerah</p>
			Sebaran Kerja Pegawai		102	22	Orang	22	100	<p>Februari - Pelaksanaan pengembangan kompetensi bimbingan teknis perancangan peraturan daerah pada bulan Februari sebanyak 3 orang</p> <p>Maret - Pelaksanaan pengembangan kompetensi bimbingan teknis perancangan peraturan daerah pada bulan Maret sebanyak 22 orang</p> <p>April - Pelaksanaan pengembangan kompetensi bimbingan teknis perancangan peraturan daerah pada bulan April sebanyak 22 orang</p> <p>Mai - Pelaksanaan pengembangan kompetensi bimbingan teknis perancangan peraturan daerah pada bulan Mei sebanyak 22 orang</p> <p>Juni - Pelaksanaan pengembangan kompetensi bimbingan teknis perancangan peraturan daerah pada bulan Juni sebanyak 22 orang</p>

E-PERFORMANCE SISTEM AKUJI

e-performance.kamerasumham.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unitkerja=2713

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

					103	44	Orang	44	100	<p>Juni - Pelaksanaan pengembangan kompetensi bimbingan teknis perancangan peraturan daerah pada bulan Juni sebanyak 22 orang</p> <p>Agustus - Pelaksanaan pengembangan kompetensi bimbingan teknis perancangan peraturan daerah pada bulan Agustus sebanyak 22 orang</p> <p>September - Pelaksanaan pengembangan kompetensi bimbingan teknis perancangan peraturan daerah pada bulan September sebanyak 22 orang</p>
					104	88	Orang	88	100	<p>Oktober - Pelaksanaan pengembangan kompetensi bimbingan teknis perancangan peraturan daerah pada bulan Oktober sebanyak 22 orang</p> <p>November - Pelaksanaan pengembangan kompetensi bimbingan teknis perancangan peraturan daerah pada bulan November sebanyak 22 orang</p> <p>Desember - Pelaksanaan pengembangan kompetensi bimbingan teknis perancangan peraturan daerah pada bulan Desember sebanyak 22 orang</p>

E-PERFORMANCE SISTEM AKUP

e-performance.kemkesumham.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unitkerja=2773

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

1. Terselenggaranya festival perencanaan serta penyediaan dan penyediaan media dan kegiatan produk hukum di wilayah

Jumlah kegiatan perencanaan dan penyediaan produk hukum daerah

Sasaran Kinerja Pegawai:

2. Sasaran Akademik	Tugas	0	1	2	3	4	5	6
	Febuari	0	0	0	0	0	0	0
	Maret	0	0	0	0	0	0	0
	April	0	0	0	0	0	0	0
	Mei	0	0	0	0	0	0	0
	Juni	0	0	0	0	0	0	0
	Juli	0	0	0	0	0	0	0
	Agustus	0	0	0	0	0	0	0
	September	0	0	0	0	0	0	0
	Oktober	0	0	0	0	0	0	0
	November	0	0	0	0	0	0	0
	Desember	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Rain coming

E-PERFORMANCE SISTEM AKUP

e-performance.kemkesumham.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unitkerja=2773

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

2. Sasaran Akademik	Tugas	0	1	2	3	4	5	6
	Januari	0	0	0	0	0	0	0
	Februari	0	0	0	0	0	0	0
	Maret	0	0	0	0	0	0	0
	April	0	0	0	0	0	0	0
	Mei	0	0	0	0	0	0	0
	Juni	0	0	0	0	0	0	0
	Juli	0	0	0	0	0	0	0
	Agustus	0	0	0	0	0	0	0
	September	0	0	0	0	0	0	0
	Oktober	0	0	0	0	0	0	0
	November	0	0	0	0	0	0	0
	Desember	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Rain coming

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unit_berja=2773

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

					Tgl	Kasat				
						Kadepdik		100	Oktober : selama bulan Oktober tahun 2022 kegiatan pemantauan pembantuan dan pembinaan prodi diukur daerah berupa 2 (satu) ekademi November : selama bulan November tahun 2022 kegiatan pemantauan pembantuan dan pembinaan prodi diukur daerah berupa 1 (satu) ekademi Desember : selama bulan Desember tahun 2022 kegiatan pemantauan pembantuan dan pembinaan prodi diukur daerah berupa 1 (satu) ekademi	
8	Meningkatkan kualitas hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan efisiensi hukum masyarakat di wilayah	1 1	Penertiban permohonan bantuan hukum litigasi yang dijejai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Standar Kinerja Pegawai:	81 Persembah -Triwulan IV	TW1	23	peran	23	100	Januari : Februari : Maret :
					TW2	74,4	peran	140,45	100	April : jumlah permohonan bantuan hukum litigasi sampai dengan bulan Mei tahun 2022 sebanyak 119 kasus Mei : jumlah permohonan bantuan hukum litigasi sampai dengan bulan Mei tahun 2022 sebanyak 122 kasus Juni : jumlah permohonan bantuan hukum litigasi sampai dengan bulan Juni tahun 2022 sebanyak 140 kasus

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

e-performance.kemendiknas.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unit_berja=2773

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

					Tgl	Kasat				
								100	Juli : jumlah permohonan bantuan hukum litigasi sampai dengan bulan Juli tahun 2022 sebanyak 140 kasus Agustus : jumlah permohonan bantuan hukum litigasi sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 sebanyak 150 kasus September : jumlah permohonan bantuan hukum litigasi sampai dengan bulan September tahun 2022 sebanyak 150 kasus Oktober : jumlah permohonan bantuan hukum litigasi sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 sebanyak 140 kasus November : jumlah permohonan bantuan hukum litigasi sampai dengan bulan November tahun 2022 sebanyak 200 kasus Desember : jumlah permohonan bantuan hukum litigasi sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebanyak 250 kasus	
					TW4	276,57	peran	276,57	100	Januari : Februari : Maret :
					TW2	45,45	peran	45,7	103	April : jumlah
8	Meningkatkan kualitas hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan efisiensi hukum masyarakat di wilayah	1 1	Penertiban permohonan bantuan hukum non litigasi yang dijejai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	81 Persembah -Triwulan IV	TW1	0		0		Januari : Februari : Maret :
					TW2	45,45	peran	45,7	103	April : jumlah

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

<p>Saluran Energi Pagarani</p>	101	20.45	persen	49.7	100	April Jumlah permohonan bantuan hukum non-legal selama bulan April tahun 2022 sebanyak 4 permohonan. Mei jumlah permohonan bantuan hukum non-legal selama bulan Mei tahun 2022 sebanyak 16 permohonan. Juni jumlah permohonan bantuan hukum non-legal selama bulan Juni tahun 2022 sebanyak 17 permohonan.
	103	45.45	persen	45.45	100	Juli Jumlah permohonan bantuan hukum non-legal selama bulan Juli tahun 2022 sebanyak 17 permohonan. Agustus Jumlah permohonan bantuan hukum non-legal selama bulan Agustus tahun 2022 sebanyak 20 permohonan. September Jumlah permohonan bantuan hukum non-legal selama bulan September tahun 2022 sebanyak 20 permohonan.
	104	20.71	persen	20.71	100	Oktober Jumlah permohonan bantuan hukum non-legal selama bulan Oktober tahun 2022 sebanyak 20 permohonan. November Jumlah permohonan bantuan

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

<p>Saluran Energi Pagarani</p>	104	20.71	persen	20.71	100	Oktober Jumlah permohonan bantuan hukum non-legal selama bulan Oktober tahun 2022 sebanyak 20 permohonan. November Jumlah permohonan bantuan hukum non-legal selama bulan November 2022 sebanyak 24 permohonan. Desember Jumlah permohonan bantuan hukum non-legal selama bulan Desember 2022 sebanyak 5 permohonan.
	101	0		0		Jumlah Bantuan Merak
	102	73.64		73.64	100	April Akan dilaksanakan pada Triwulan II. Akan dilaksanakan pada Triwulan II Juni. Tahap pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan bantuan hukum.
<p>Saluran Energi Pagarani</p>	102	140.20	trial	140.20	100	Juli Tahap dilaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan bantuan hukum Agustus-Tahap dilaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan bantuan hukum September-Tahap dilaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan

The image shows two screenshots of the 'E-PERFORMANCE SISTEM AKUP' web application. The top screenshot displays a dashboard with a navigation menu (Home, Dashboard, BSC, Input Data, Perencanaan, Realisasi, Lainnya, Ubah Password, Keluar) and a table of performance indicators. The bottom screenshot shows a similar dashboard with a different set of indicators.

Top Screenshot Data:

Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Detail
Sasaran Kinerja Pegawai	90	90	100	April - PK 404 Eksekutif Dan Kajian Hukum dan HAKI Maj - PK 391 Eksekutif Dan Kajian Hukum dan HAKI Juni - PK 404 Eksekutif Dan Kajian Hukum dan HAKI
	100	100	100	Juli - PK 404 Eksekutif Dan Kajian Hukum dan HAKI Agustus - PK 391 Eksekutif Dan Kajian Hukum dan HAKI September - PK 404 Eksekutif Dan Kajian Hukum dan HAKI
	275	275	100	Oktober - PK 404 Eksekutif Dan Kajian Hukum dan HAKI November - PK 391 Eksekutif Dan Kajian Hukum dan HAKI Desember - PK 404 Eksekutif Dan Kajian Hukum dan HAKI
1. Ralat, Tawakkul	1	1	100	Jumlah Pelanggaran Maret 1 keuliah pelanggaran hukum dan lain di wilayah melalui realisasi sumber sesuai (GPA)
Sasaran Kinerja Pegawai	0	0		April telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022

Bottom Screenshot Data:

Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Detail
Sasaran Kinerja Pegawai	0	0		April telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 Maj telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 Juni telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022
	0	0		Juli telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 Agustus telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 September telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022
	0	0		Oktober telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 November telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 Desember telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022
10. Meningkatkan kemampuan daerah yang melaksanakan program aksi HAKI	1	17	100	Jumlah Pelanggaran Maret Pelaksanaan Rapat Bulatan Penguatan Aksi Hari di 17 Kota/Kabupaten di Pro. Sumsel
Sasaran Kinerja Pegawai	0	17	100	April Pelaksanaan Rapat Bulatan Penguatan Aksi Hari di 17 Kota/Kabupaten di Pro. Sumsel dan Pelaksanaan Rapat

E-PERFORMANCE SISTEM AKUP

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

Sasaran Kinerja Pegawai:

									850	April : Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Adu Ham di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel Mek. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Adu Ham di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel Juni : Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Adu Ham di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel
									100	Juli : Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Adu Ham di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel Agustus : Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Adu Ham di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel Desember : Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Adu Ham di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel
									100	Oktober : Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Adu Ham di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel November : Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Adu Ham di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel Desember : Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Adu Ham di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel

E-PERFORMANCE SISTEM AKUP

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

Jumlah Aktifitas pada 2022

Sasaran Kinerja Pegawai:

									850	Januari : Pelaksanaan Rapat Evaluasi Dan Pelaksanaan Penggubatan Kab.Kota Paduli Ham Melalui Aplikasi pada di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel
									850	April : Rapat Evaluasi Dan Pelaksanaan Penggubatan Kab.Kota Paduli Ham Melalui Aplikasi pada di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel Mek. Rapat Evaluasi Dan Pelaksanaan Penggubatan Kab.Kota Paduli Ham Melalui Aplikasi pada di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel Juni : Rapat Evaluasi Dan Pelaksanaan Penggubatan Kab.Kota Paduli Ham Melalui Aplikasi pada di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel
									100	Juli : Rapat Evaluasi Dan Pelaksanaan Penggubatan Kab.Kota Paduli Ham Melalui Aplikasi pada di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel Agustus : Rapat Evaluasi Dan Pelaksanaan Penggubatan Kab.Kota Paduli Ham Melalui Aplikasi pada di 17 Kota/Kabupaten di Provs. Sumsel

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI: x +

← → ↻ e-performance.kemendikunham.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unit_berja=2773

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

				100	17	17	100	Jan - Rapat Disusun Dan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Melalui Forum di 17 Kota Kabupaten di Prodi Sumsel
				100	17	17	100	Agustus - Rapat Disusun Dan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Melalui Aplikasi pada di 17 Kota Kabupaten di Prodi Sumsel
				100	17	17	100	September - Rapat Disusun Dan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Melalui Aplikasi pada di 17 Kota Kabupaten di Prodi Sumsel
				100	17	17	100	Oktober - Rapat Disusun Dan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Melalui Aplikasi pada di 17 Kota Kabupaten di Prodi Sumsel
				100	17	17	100	November - Rapat Disusun Dan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Melalui Aplikasi pada di 17 Kota Kabupaten di Prodi Sumsel
				100	17	17	100	Desember - Rapat Disusun Dan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Melalui Aplikasi pada di 17 Kota Kabupaten di Prodi Sumsel

E-PERFORMANCE SISTEM AKUI: x +

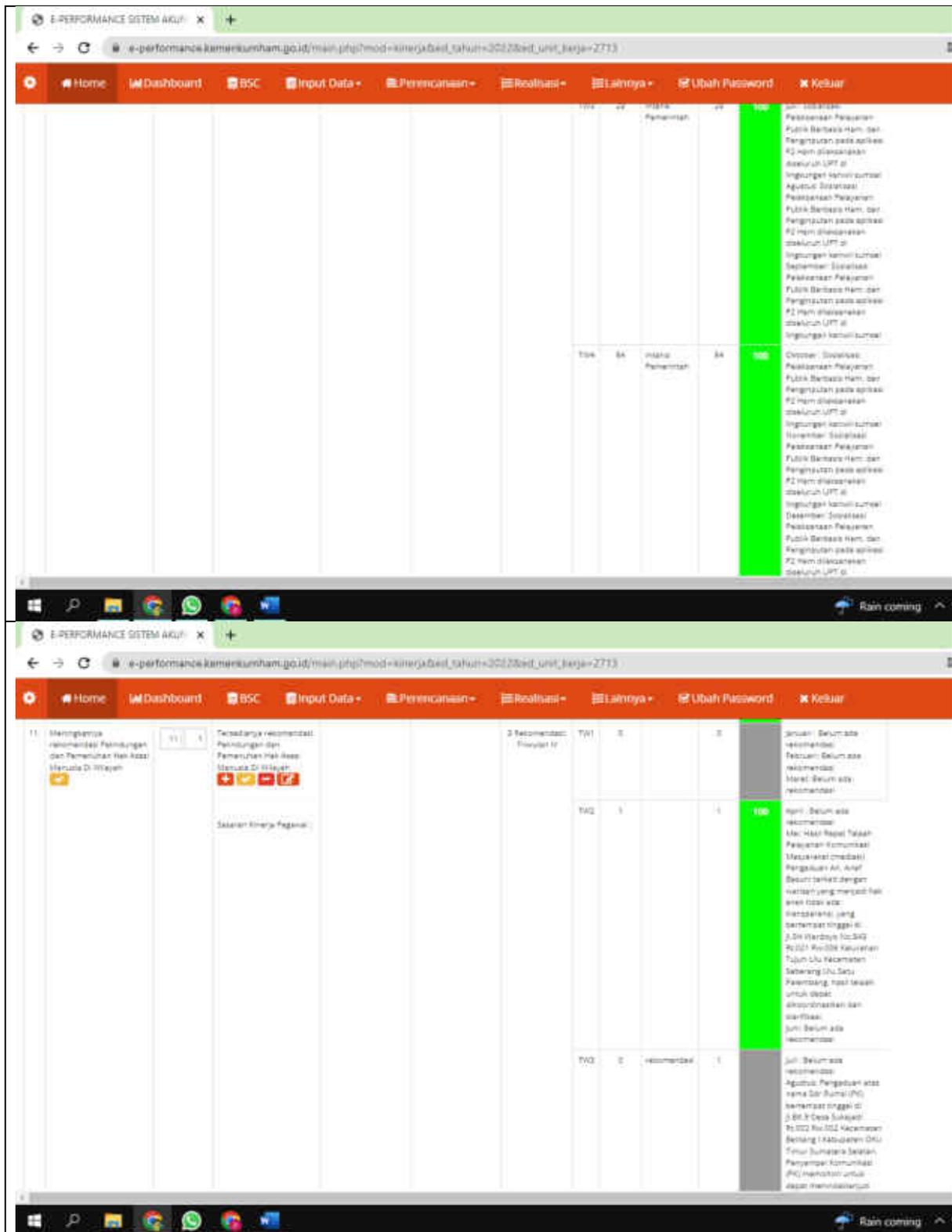
← → ↻ e-performance.kemendikunham.go.id/mah.php?mod=kinerja&id_tahun=2022&id_unit_berja=2773

Home Dashboard BSC Input Data Perencanaan Realisasi Lainnya Ubah Password Keluar

Jumlah orang pemerintah yang menghadiri hasil diplomasi dan pengabdian masyarakat sebanyak 1400 orang.

Sasaran Kinerja Pegawai:

			2 orang Pemerintah Swasta IT	100	2	2	1400	Januari - Sosialisasi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Melalui Forum Publik Berbasis Ham dan Pengabdian pada aplikasi 72 Ham dilaksanakan di seluruh UPT di lingkungan kampus Sumsel
				100	2	2	1400	April - Sosialisasi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Melalui Forum Publik Berbasis Ham dan Pengabdian pada aplikasi 72 Ham dilaksanakan di seluruh UPT di lingkungan kampus Sumsel
				100	28	28	100	Jan - Sosialisasi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Melalui Forum Publik Berbasis Ham dan Pengabdian pada aplikasi 72 Ham dilaksanakan di seluruh UPT di lingkungan kampus Sumsel



kinerja pada tanggal 6 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, seluruh Unit Utama dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan target kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan telah melaksanakan target kinerja tersebut dan telah diunggah pada laman <http://kinerja.kemenkumham.go.id> setiap bulannya.

Secara garis besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan memiliki 39 target kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia : 14 Target Kinerja

- a) 80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b) 40 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia;
- c) 70% Desa/Kelurahan sadar hukum;
- d) Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah;
- e) Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan kebijakan di wilayah;
- f) Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- g) Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- h) Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah;
- i) Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille);
- j) Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham;

- k) Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah;
- l) Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait;
- m) Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan *IP Clinic* atau *Mobile IP Clinic*;
- n) Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual;

Divisi Pemasyarakatan : 11 Target Kinerja

- a) Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA;
- b) Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan;
- c) Redistribusi pada UPT dengan tingkat *overcrowding* di atas 300%;
- d) Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project;
- e) Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana;
- f) 80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa);
- g) 45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha:
 - Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini
 - Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah
- h) 65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian;
- i) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran di Rupbasan;
- j) Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 kota:

- Kota Banda Aceh, Aceh
 - Kota Tanjung Pinang, Kepri
 - Palembang, Sumsel
 - Yogyakarta, DIY
 - Tanjung Selor, Kalimantan Utara
 - Kupang, NTT
 - Kota Gorontalo, Gorontalo
 - Kota Palu, Sulteng
 - Ternate, Maluku utara
 - Kota Jayapura, Papua
- k) Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasarakatan.

Divisi Keimigrasian : 3 Target Kinerja

- a) Tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan Terselenggaranya Pengusulan Cekal yang cepat , tepat dan berbasis IT;
- b) Penegakan hukum berbasis SOPAP dan Regulasi;
- c) Implementasi Mobile Paspor.

Divisi Administrasi : 11 Target Kinerja

- a) Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi Corporate University;
- b) Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah;
- c) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- d) Penetapan status penggunaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 80%;
- e) Nilai Pengawasan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis 70;
- f) Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran dimasa Adaptasi Kebiasaan Baru, 0 orang terpapar covid;
- g) Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA dan SMART) Kantor Wilayah 95;
- h) Penyelesaian Pengaduan pada Aplikasi LAPOR!;
- i) Pembinaan untuk Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j) Pelaksanaan Manajemen Risiko;

k) Tersusunnya LKJIP Kantor Wilayah dan pelaporan e-performance tepat waktu.

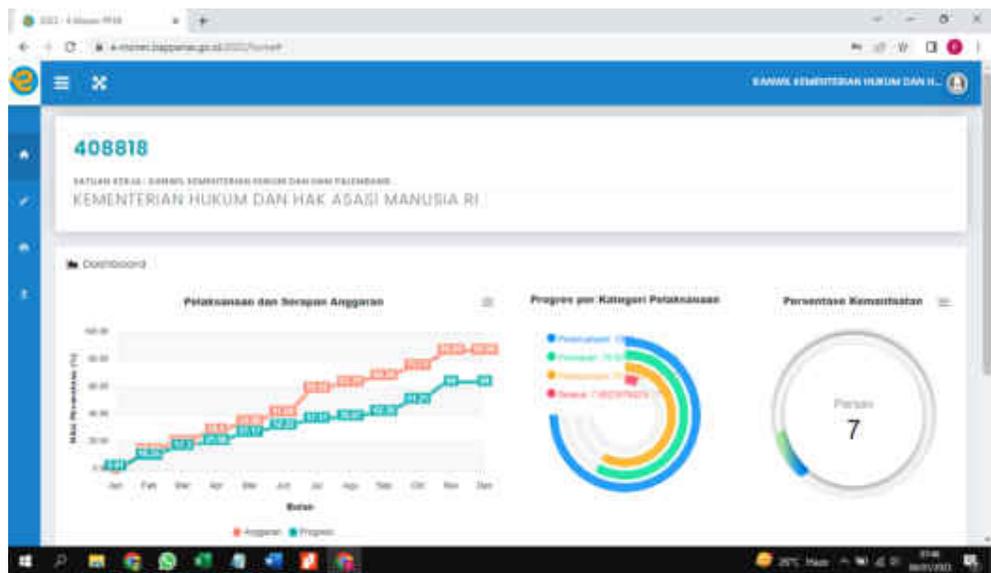
Selama tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan selalu melakukan pengunggahan data dukung target kinerja sesuai dengan timeline yang telah ditentukan serta memperoleh nilai 100 (hijau) pada setiap target kinerja.

3) E-Monev Bappenas

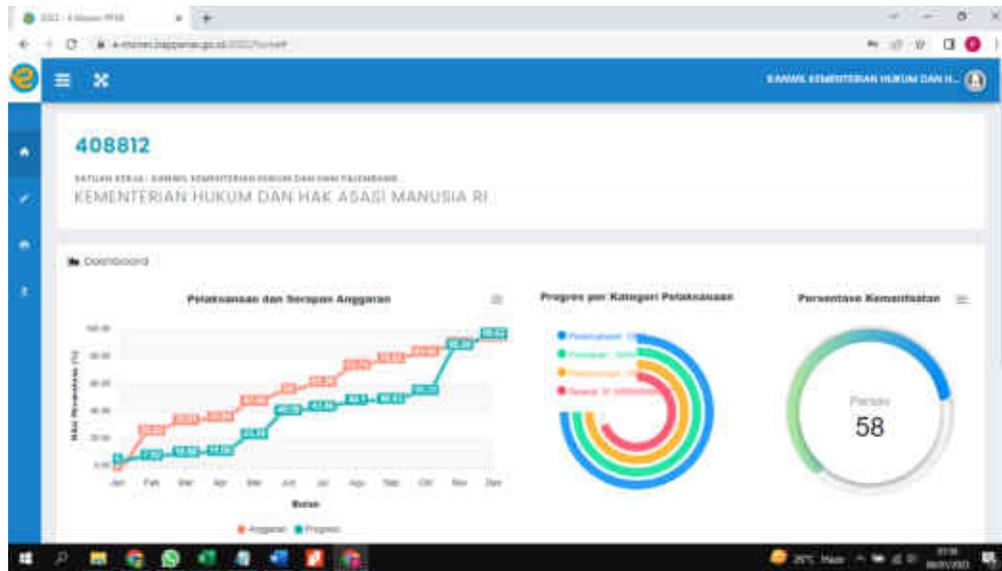
Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berikut merupakan capture penginputan e-monev BAPPENAS Tahun 2022.

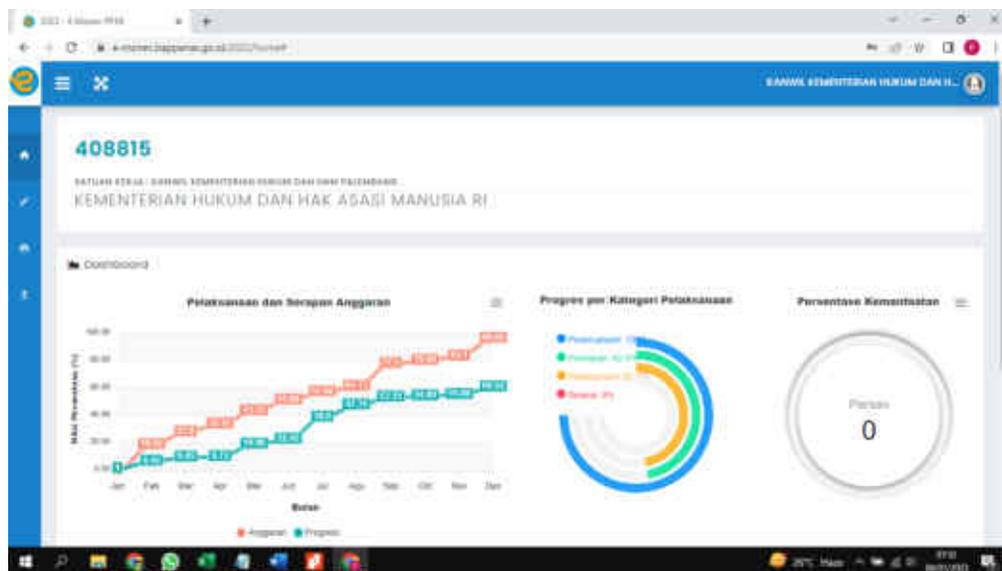
Tabel 81. Capture E-Monev Bappenas

No.	Satuan Kerja
KANTOR WILAYAH	
1	<p>Sekretariat Jenderal</p> 

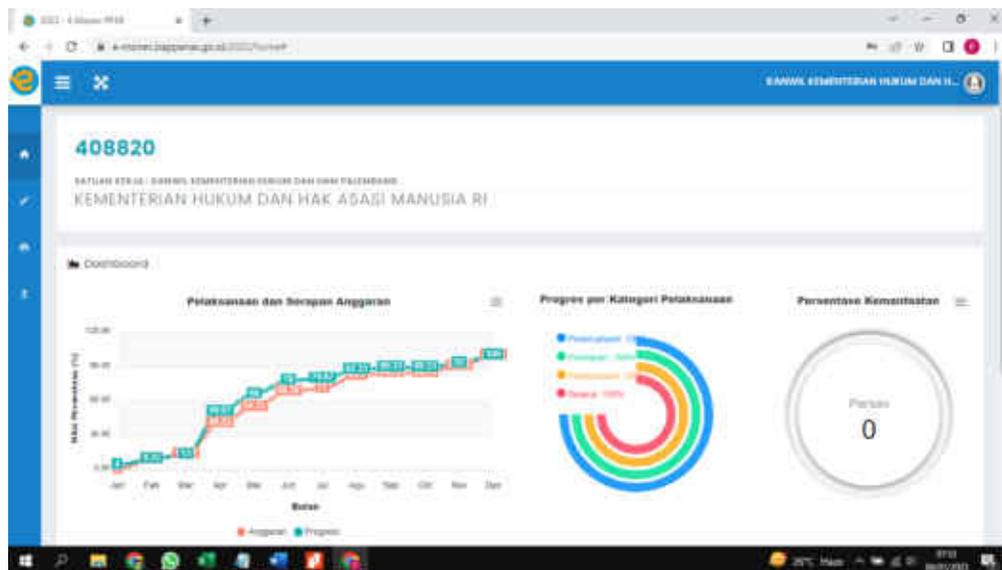
2 Ditjen Administrasi Hukum Umum



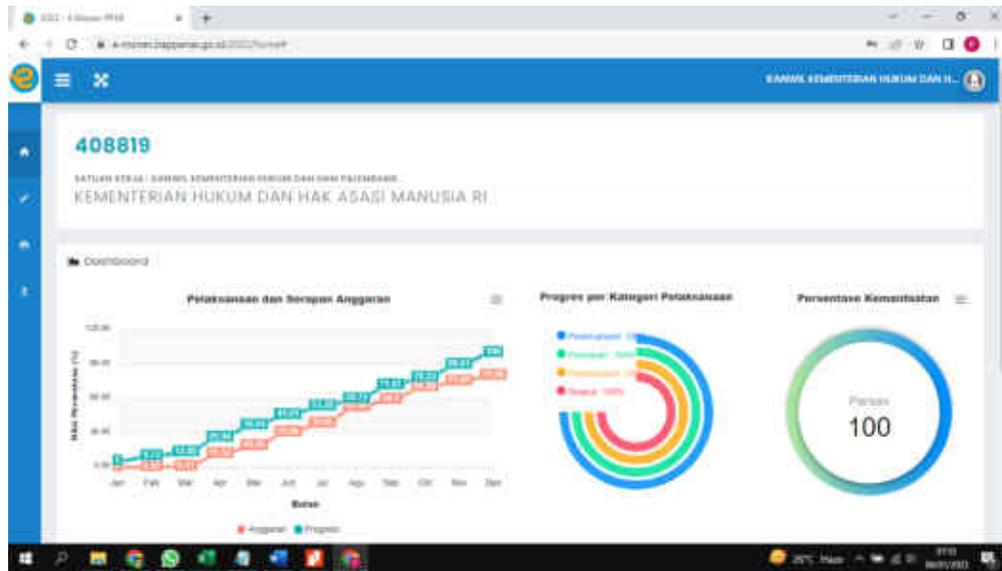
3 Ditjen Kekayaan Intelektual



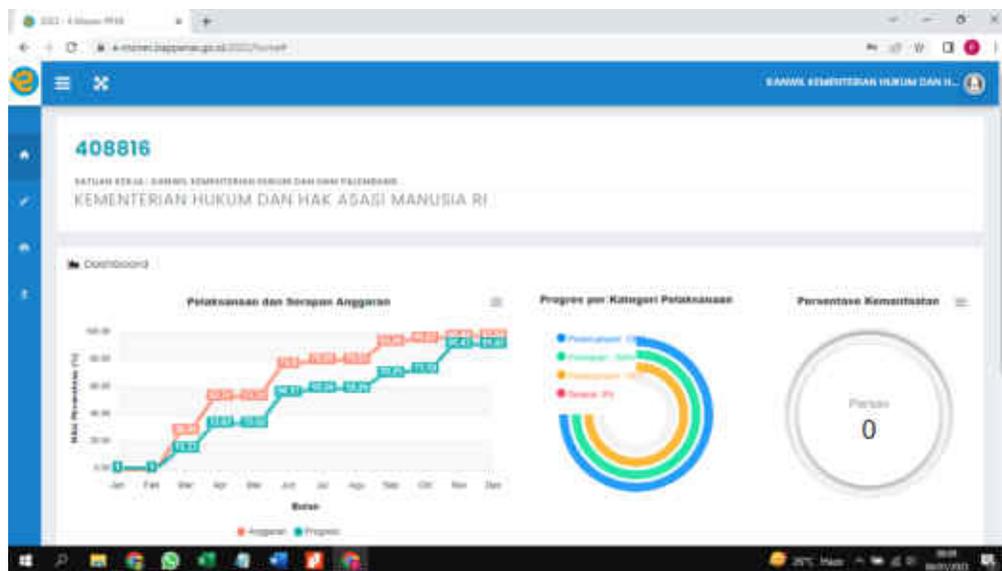
4 Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia



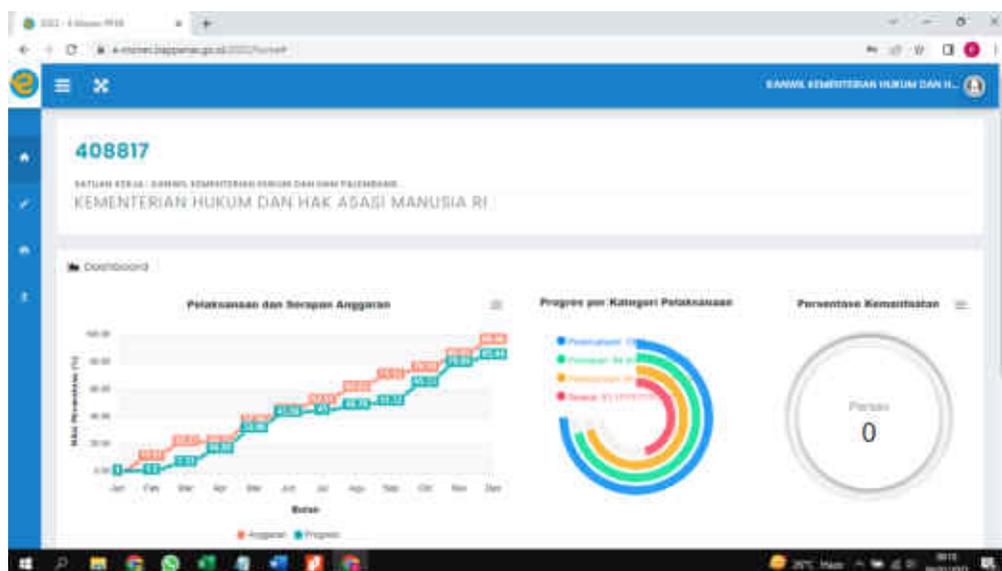
5 BPHN



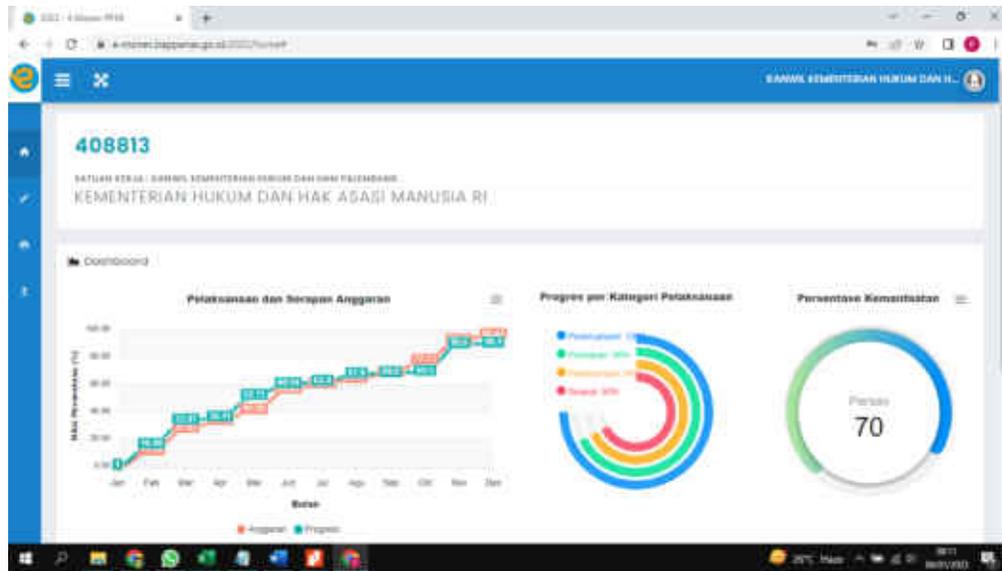
6 Ditjen Peraturan Perundang – undangan



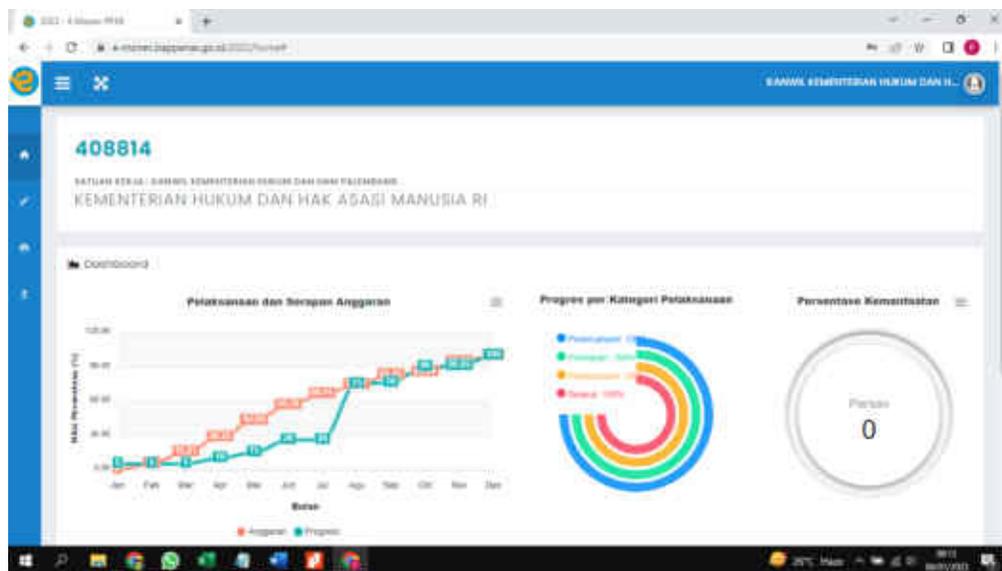
7 Ditjen Hak Asasi Manusia



8 Ditjen Pemasaryakatan

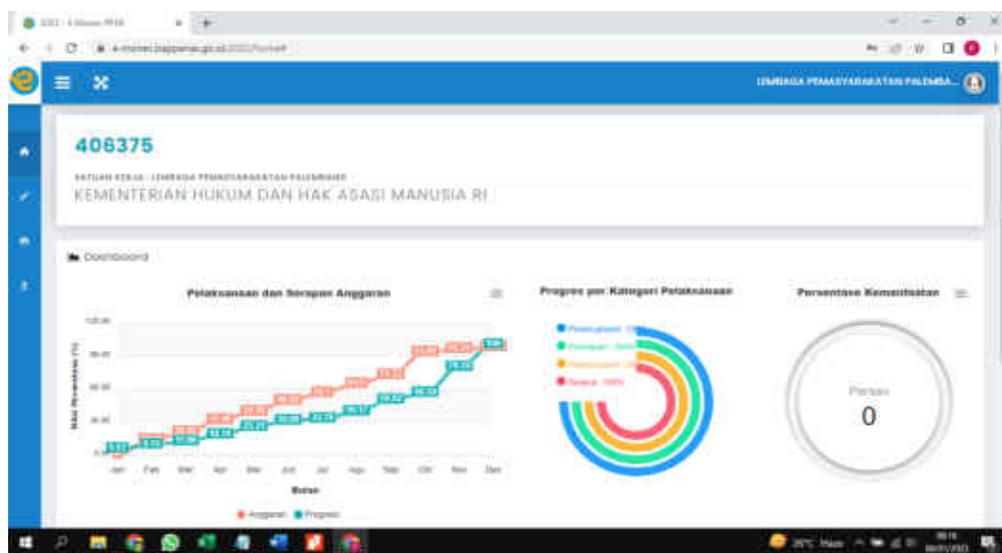


9 Ditjen Imigrasi

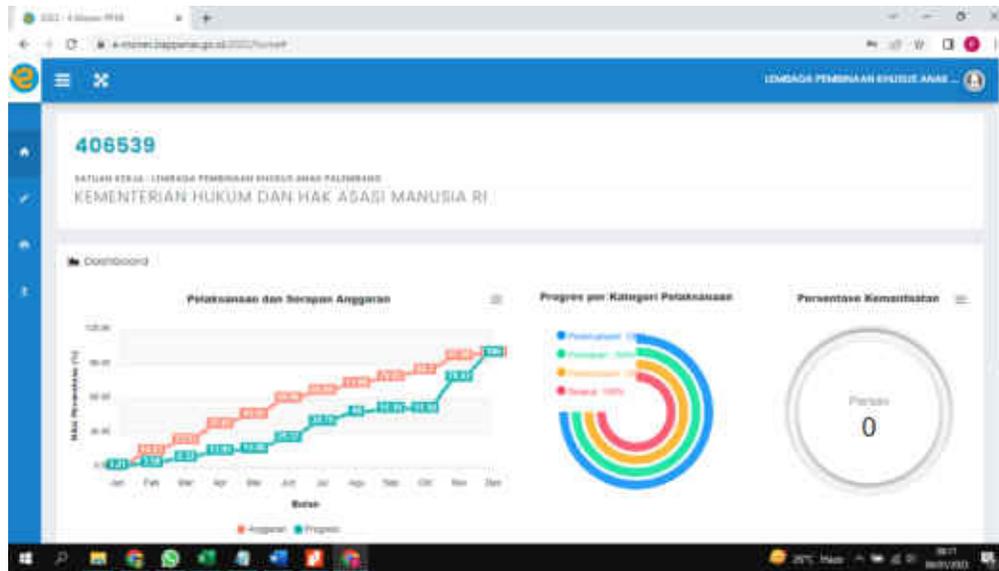


UPT PEMASYARAKATAN

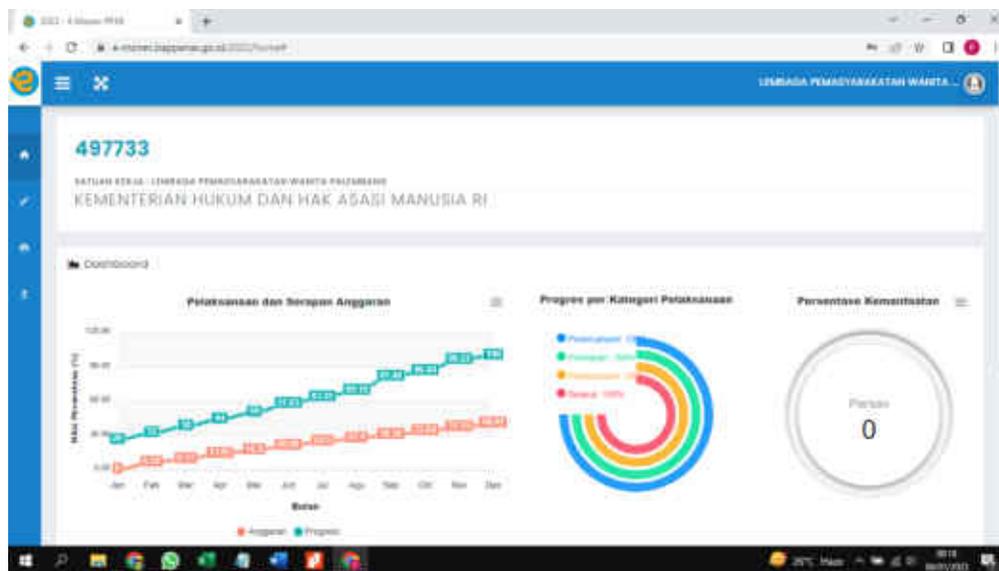
1 Lapas Kelas I Palembang



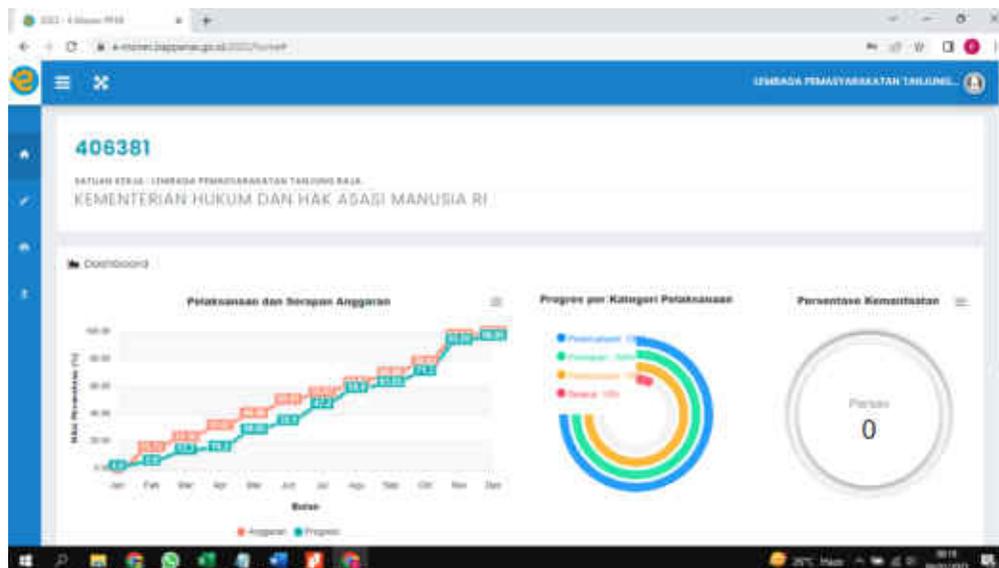
2 LPKA Klas I Palembang



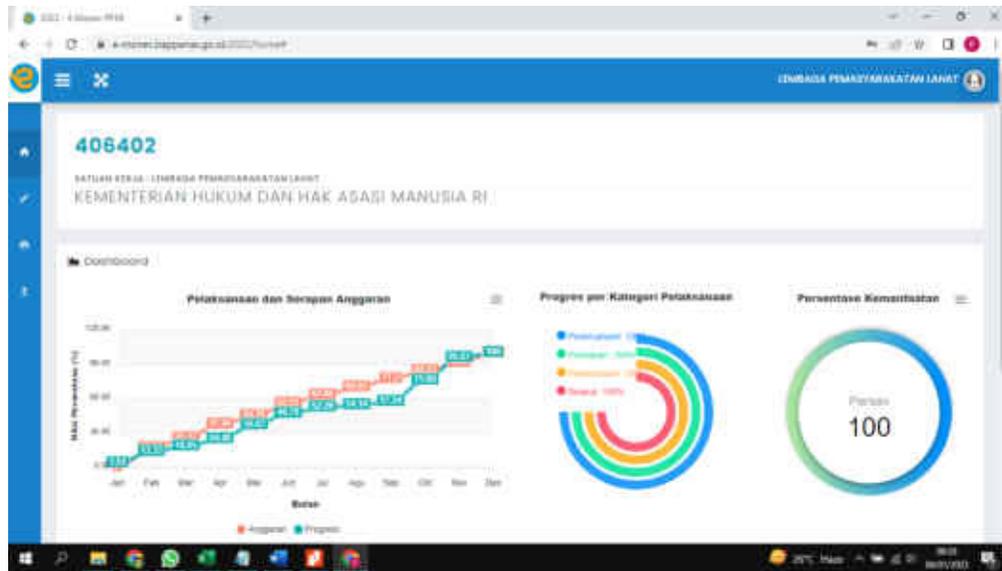
3 Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang



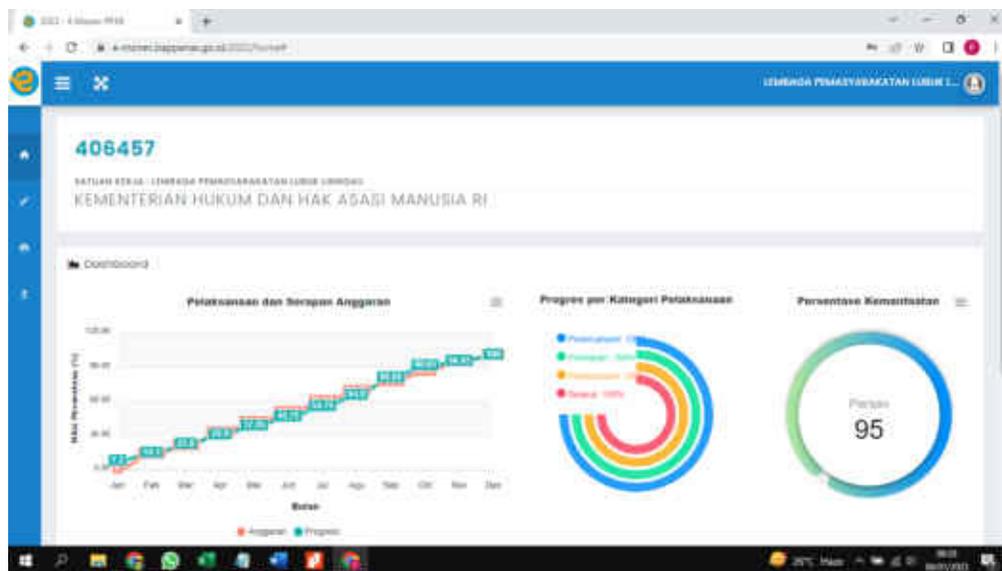
4 Lapas Kelas IIA Tanjung Raja



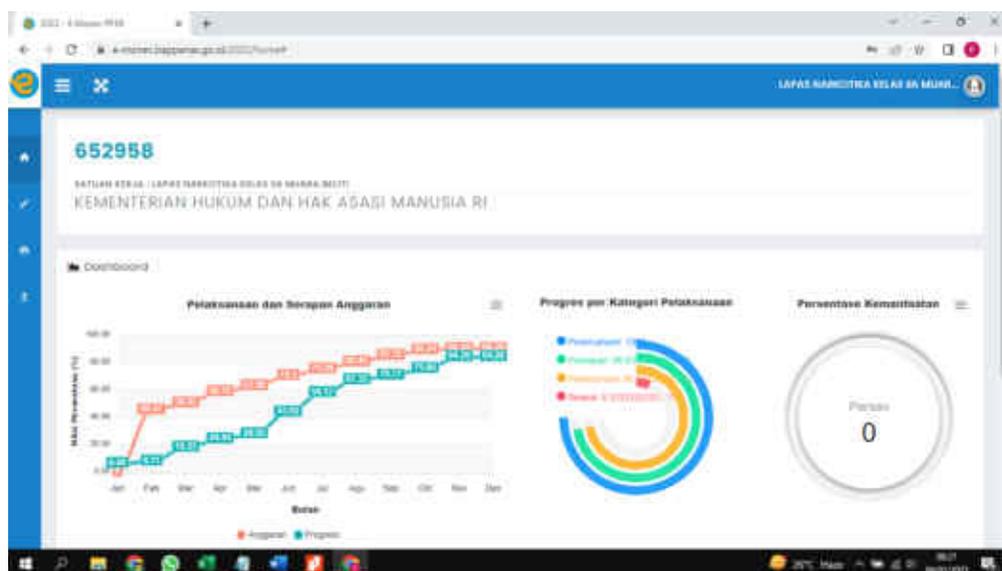
5 Lapas Kelas IIA Lahat



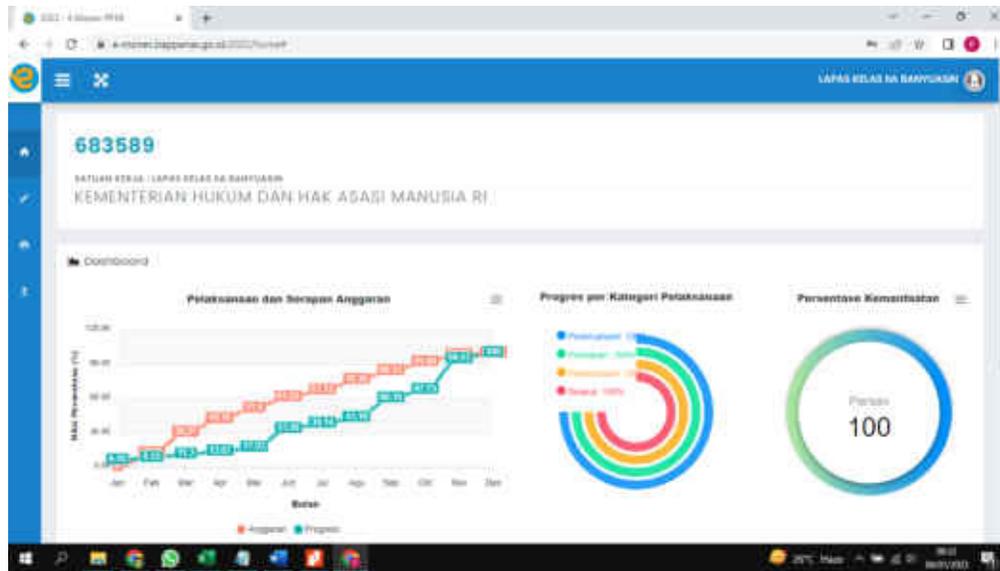
6 Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau



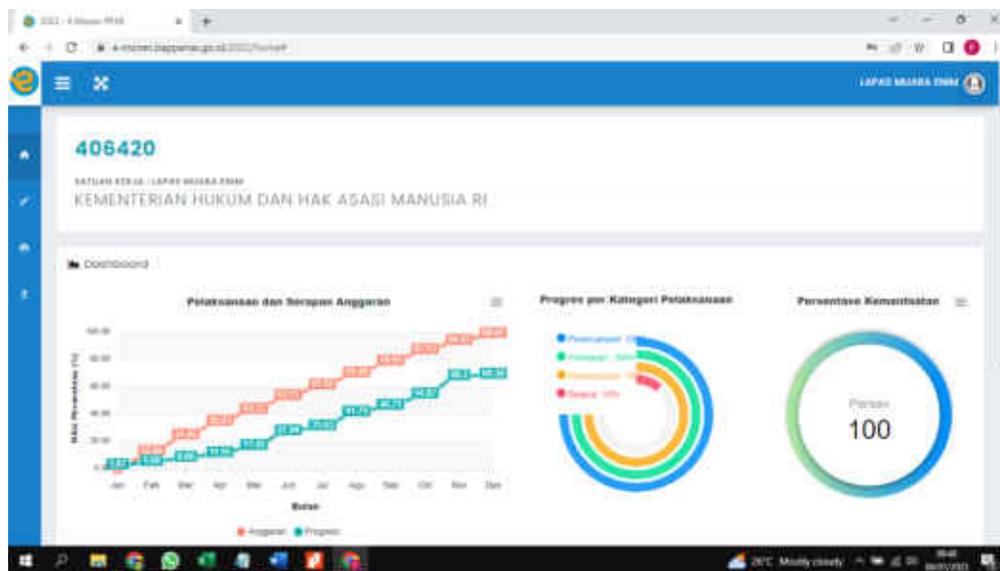
7 Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti



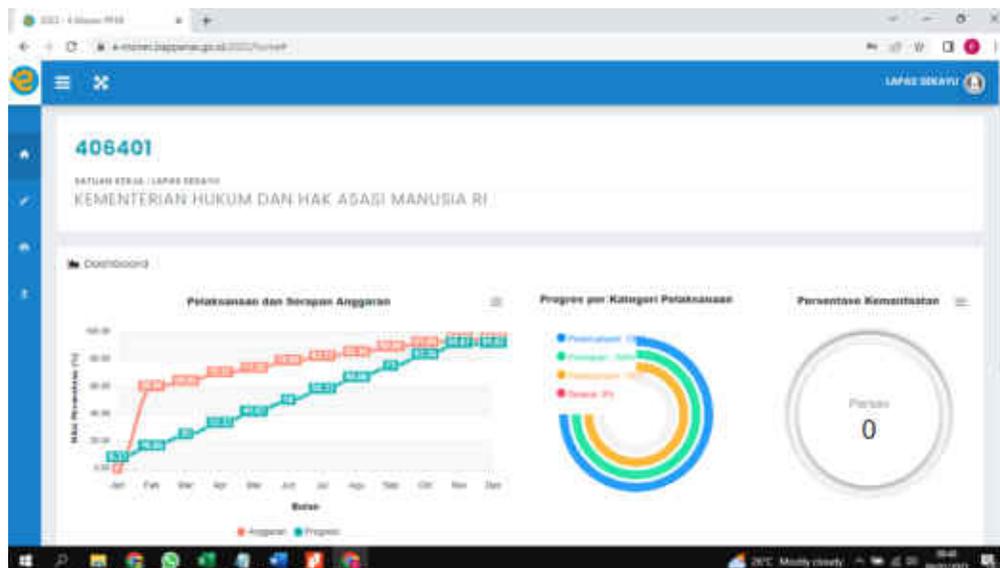
8 Lapas Kelas IIA Banyuwasin



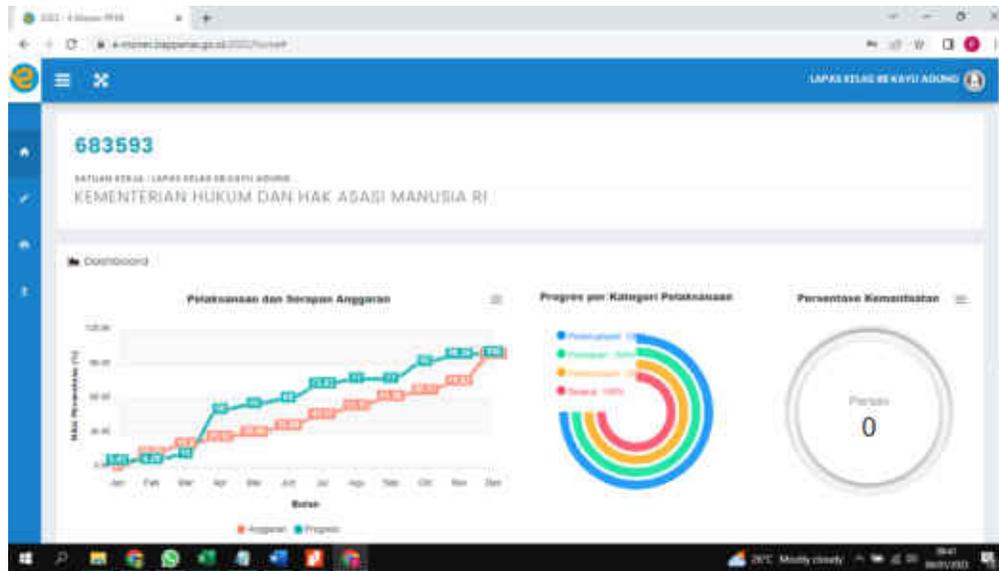
9 Lapas Kelas IIB Muara Enim



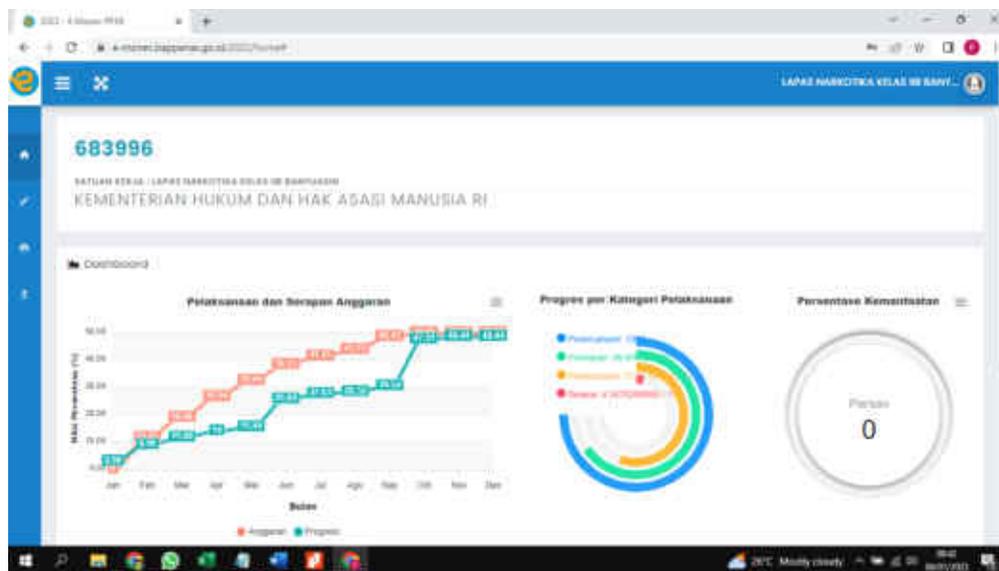
10 Lapas Kelas IIB Sekayu



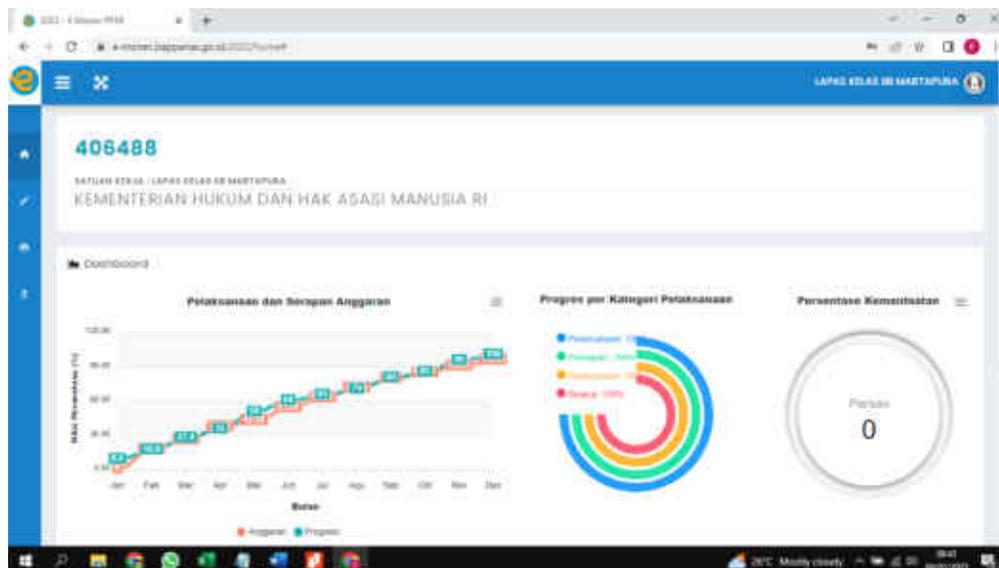
11 Lapas Kelas IIB Kayu Agung



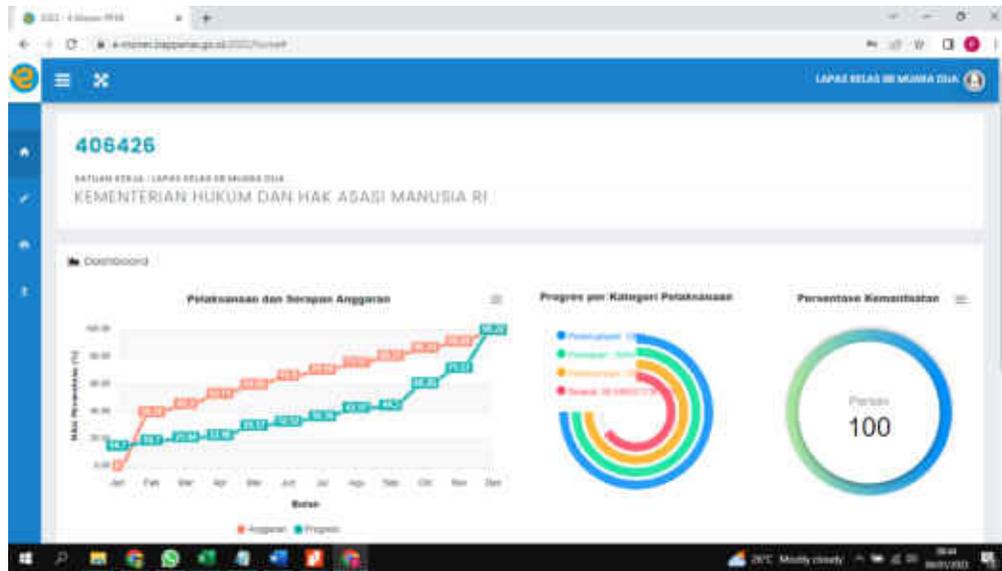
12 Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin



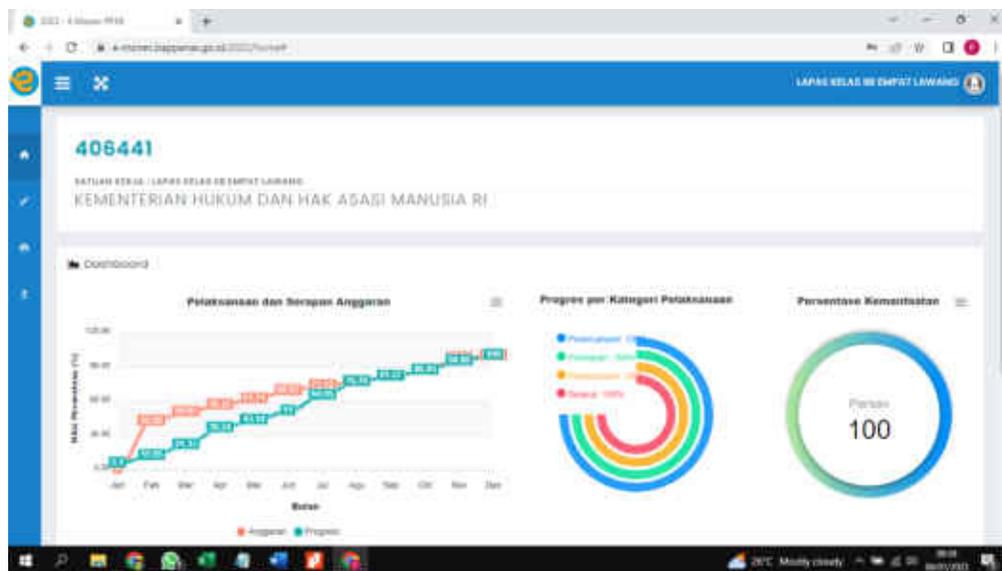
13 Lapas Kelas IIB Martapura



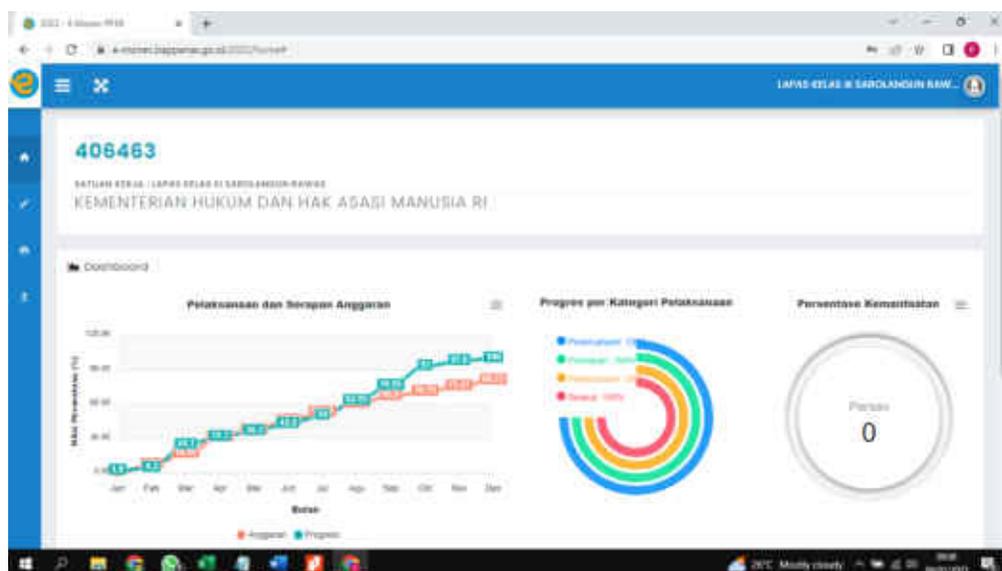
14 Lapas Kelas IIB Muara Dua



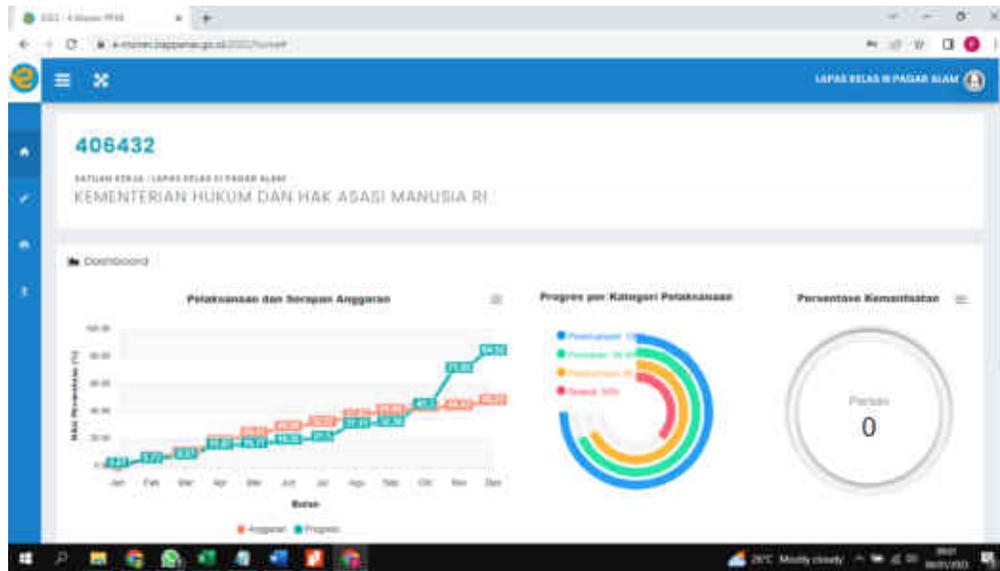
15 Lapas Kelas IIB Empat Lawang



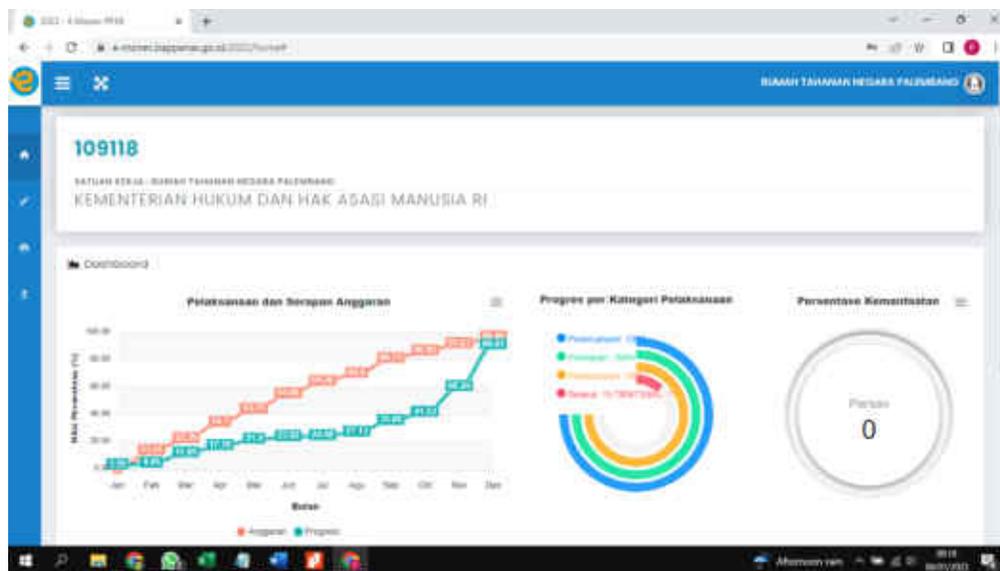
16 Lapas Kelas III Surulungun Rawas



17 Lapas Kelas III Pagar Alam



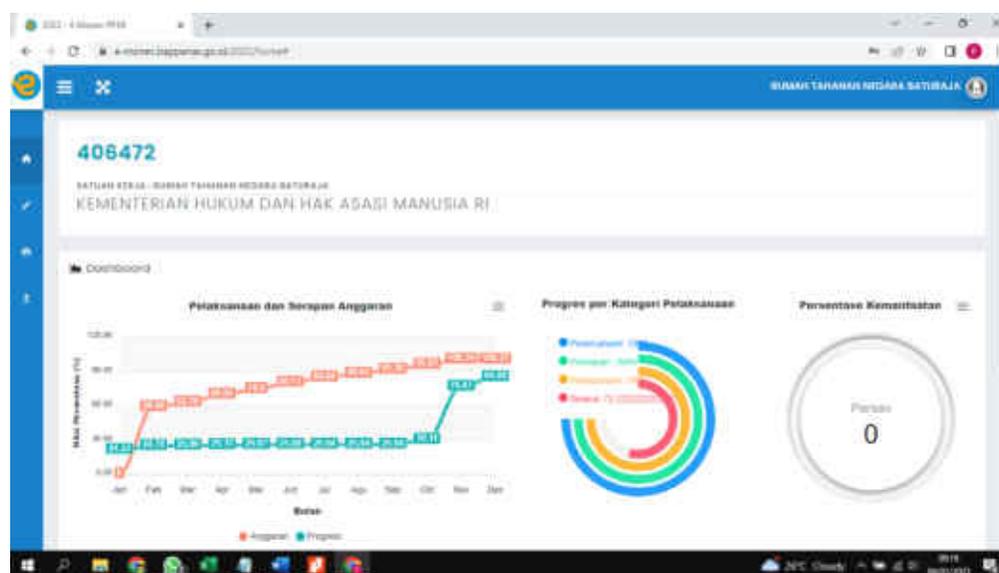
18 Rutan Kelas I Palembang



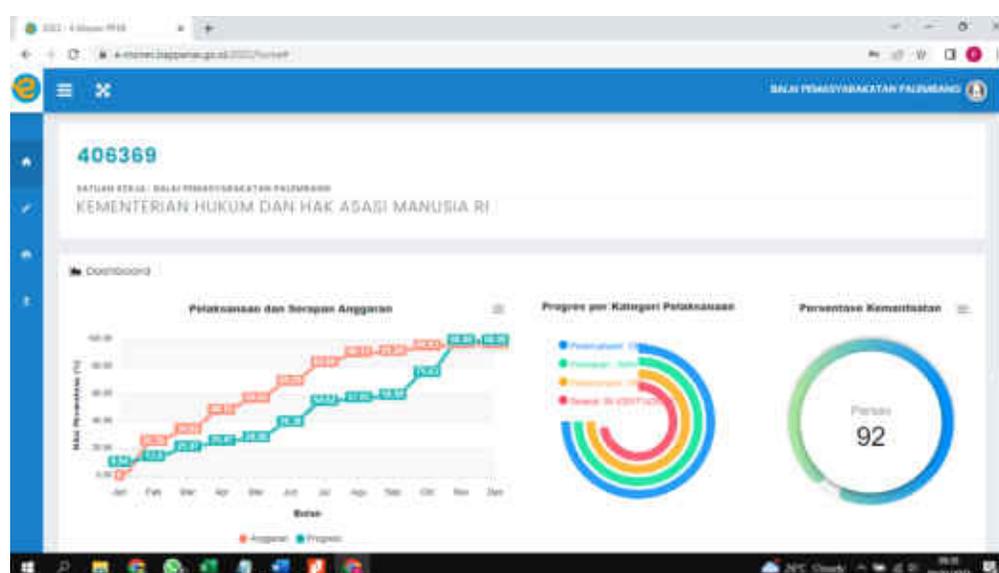
19 Rutan Kelas II Prabumulih



20 Rutan Kelas II Baturaja



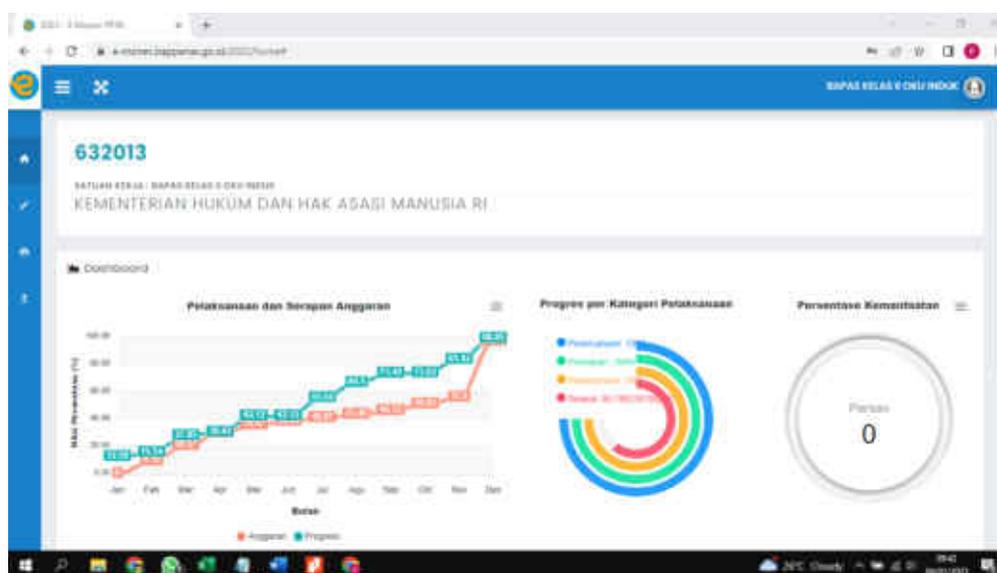
21 Bapas Kelas I Palembang



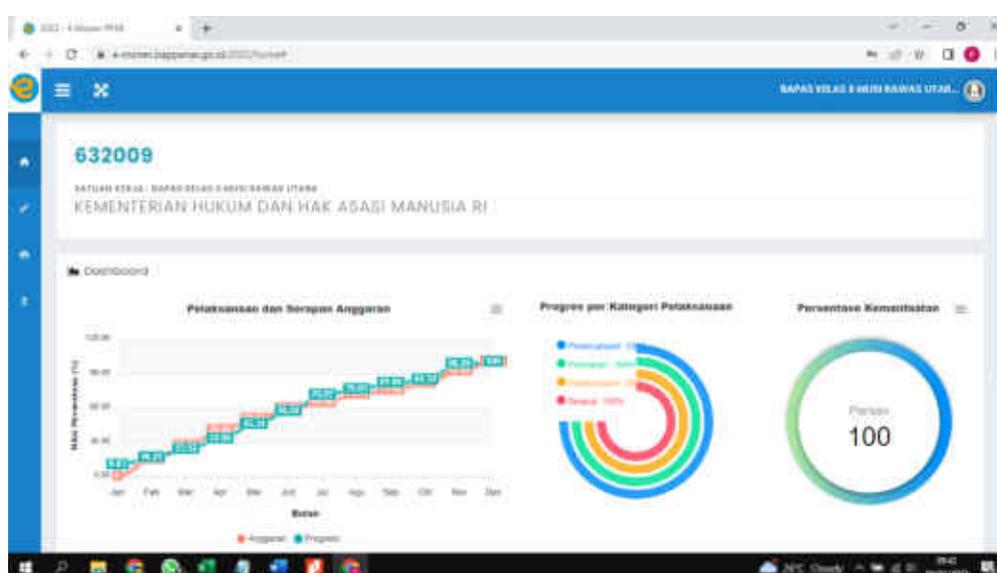
22 Bapas Kelas II Lahat



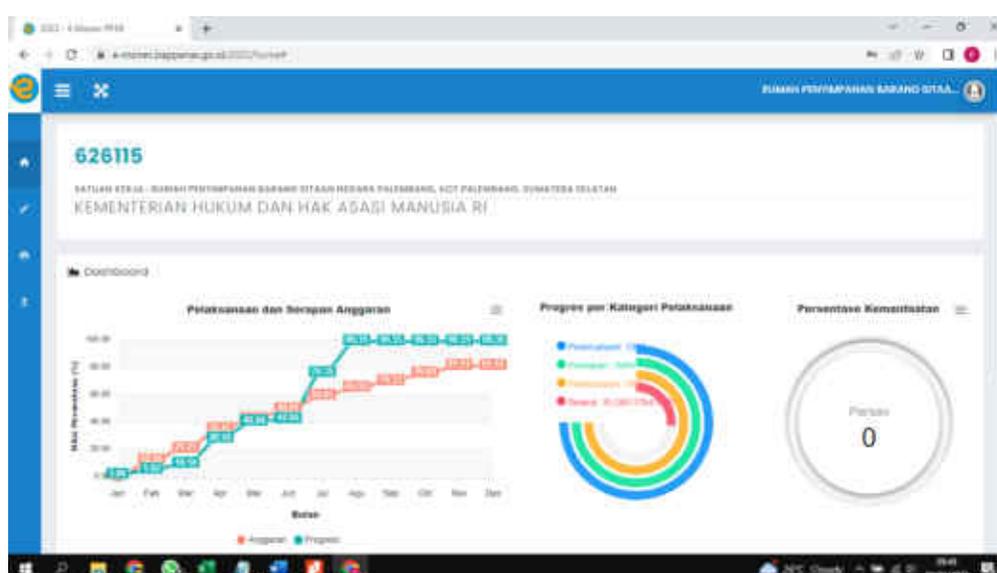
23 Bapas Kelas II OKU Induk



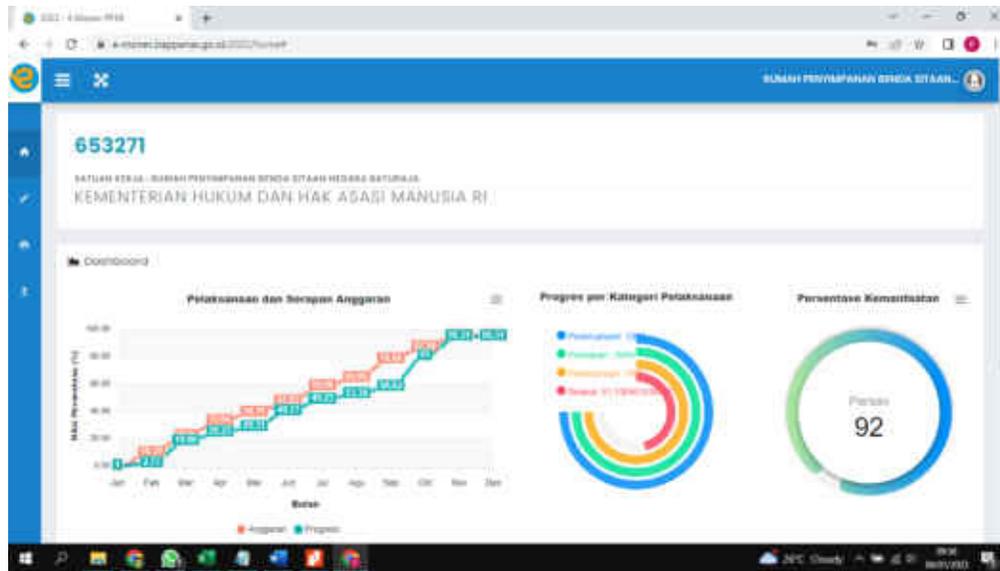
24 Bapas Kelas II Muratara



25 Rupbasan Kelas I Palembang

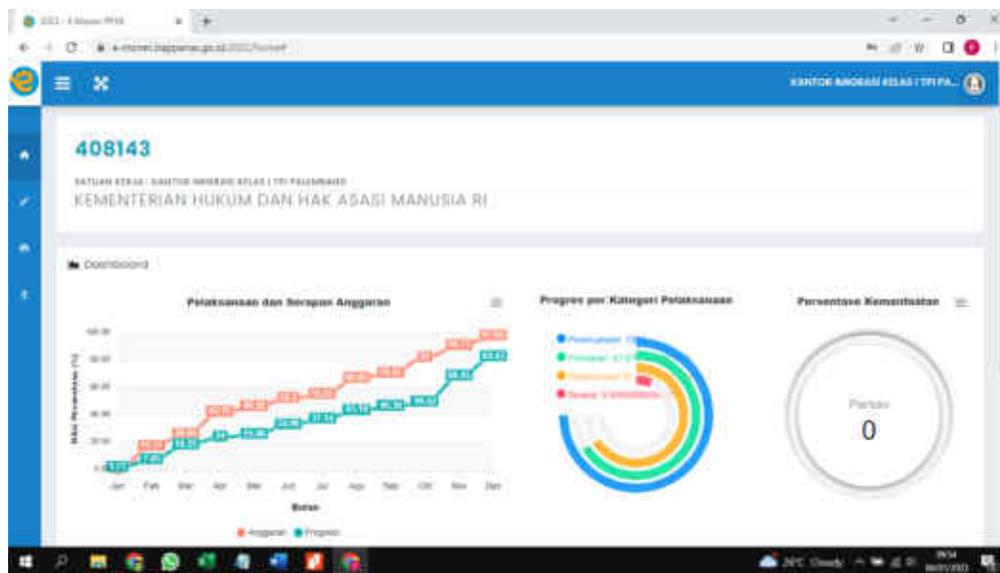


26 Rupbasan Kelas II Baturaja

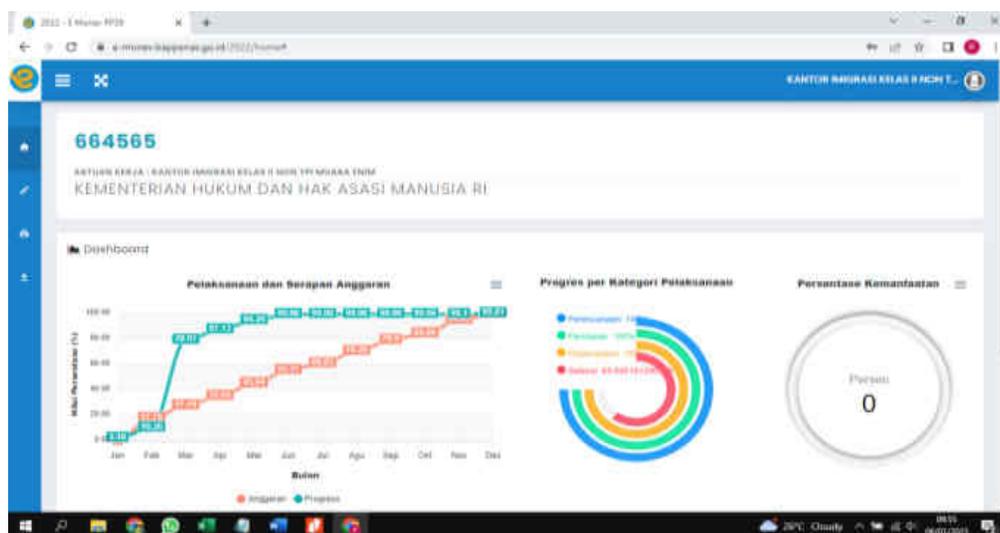


UPT KEIMIGRASIAN

1 Kanim Kelas I TPI Palembang



2 Kanim Kelas II Non TPI Muara Enim



E. Penghargaan-Penghargaan

Pada tahun 2022 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan berhasil meraih beberapa penghargaan, di antaranya:

1. Penghargaan Terbaik II Pelaksanaan e-Rekon & LK TA 2021 oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI



2. Penghargaan atas Menyukkseskan Program Unggulan DJKI Mobile Intellectual Property Clinic, DJKI Mengajar, dan Sertifikat Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual Tahun 2022 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



3. Penghargaan atas Kinerja Terbaik III Tahun 2021 Kategori Klasifikasi Kantor Wilayah Tipe B pada Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023



4. Penghargaan Peringkat Keempat atas Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal Tervalidasi Tahun 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI



5. Juara Ke-2 Kanwil DJKN SJB Award Pada Kelompok 1 (Korwil yang memiliki satker dibawahnya) untuk Kategori Laporan Wasdal Wilayah Sumatera Selatan



Unit Pelaksana Teknis

- Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim memperoleh penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke-72 Tahun 2022



- Lapas Lubuk Linggau memperoleh penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2021 (Kategori Pagu Kecil) oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan



A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan beserta jajarannya telah melaksanakan perjanjian kinerja secara baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa realisasi capaian kinerja dari berbagai divisi yang telah memenuhi target. Bahkan, terdapat beberapa indikator yang telah melebihi target itu sendiri. Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Hal tersebut juga ditunjang oleh program kerja yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang jelas, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk operasional yang dapat dipahami oleh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, serta kualitas aparatur yang baik dilihat dari tingkat pendidikannya. Meski demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dipenuhi sesuai dengan target. Hal tersebut dikarenakan pengaruh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggunya pencapaian kinerja secara maksimal, adanya kebijakan *auto adjustment* anggaran, serta beberapa kendala teknis lainnya.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan atau penambahan sarana dan prasarana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan untuk memaksimalkan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, instansi pemerintah terkait dan *stakeholder* lainnya guna peningkatan kinerja organisasi dan mencapai target kinerja;
3. Mengoptimalkan efektifitas pemanfaatan Sumber Daya Manusia, anggaran dan Teknologi Informasi melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, diharapkan dapat memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2022 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ilham Djaya
NIP 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indro Purwoko
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 23.086.115.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 23.086.115.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indro Purwoko

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Name : **Indro Purwoko**

Jabatan : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Cahyo Rahadian Muzhar**

Jabatan : **Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196909 18 199403 1 001

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
DENGAN
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	86 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.298.000.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.298.000.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzher
 NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
 NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Indro Purwoko**

Jabatan : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indro Purwoko
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
DENGAN
PLT. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	27 Permohonan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.133.102.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.133.102.000,-

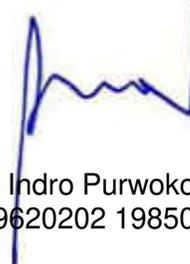
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002



Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indro Purwoko

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indro Purwoko

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H.R. Benny Riyanto

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

H.R. Benny Riyanto
NIP. 19620410 198703 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terperuhnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasnya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	23 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 315.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 315.000.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Peraturan Perundang-Undangan


 H.R. Benny Riyanto
 NIP. 19620410 198703 1 003

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


 Indro Purwoko
 NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indro Purwoko

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indro Purwoko
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

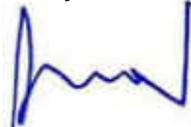
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA
SELATAN DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61

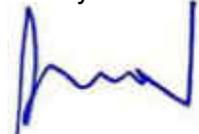
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing	70%
Kegiatan		Anggaran	
Program Pembentukan Regulasi	5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	Rp. 135.197.000,-	20%
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah		Rp. 135.197.000,-	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Rp. 1.541.670.000,-	
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah		Rp. 1.541.670.000,-	

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indro Purwoko

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA
SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indro Purwoko
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

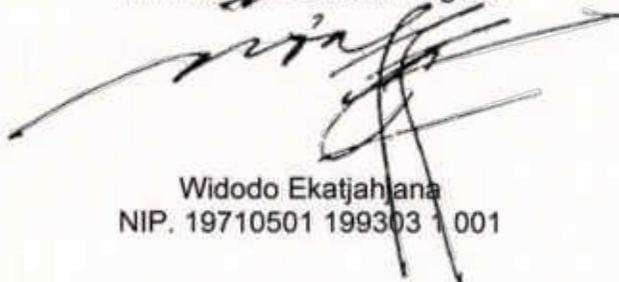
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

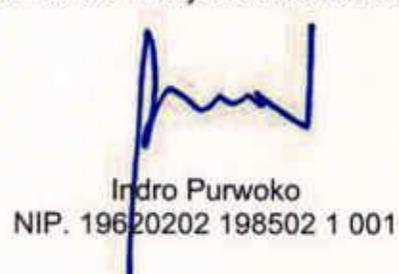
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA
SELATAN DENGAN
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 5.332.914.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 5.332.914.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.502.663.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 13.502.663.000,-

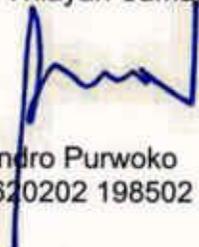
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekatjajana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA
SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indro Purwoko

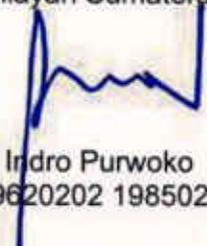
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Indro Purwoko

NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indro Purwoko
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Seleku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

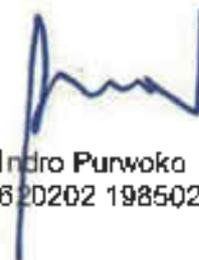
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Mualimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001



Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA
SELATAN DENGAN
DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota Daerah memenuhi HAM.	40,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 205,710,000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 205,710,000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Muallimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Indro Purwoko**

Jabatan : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Indro Purwoko**

Jabatan : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Puguh Budi Utami**

Jabatan : **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Sri Puguh Budi Utami
NIP. 19620702 198703 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA
SELATAN DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

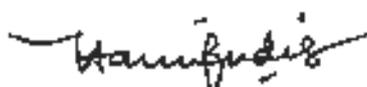
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 214.073.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 214.073.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
 Hukum dan Hak Asasi Manusia



Sri Puguh Budi Utami
 NIP. 19620702 198703 2 001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Indro Purwoko
 NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indro Purwoko
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19820202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indro Purwoko

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA
SELATAN DENGAN
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	50
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 144.534.245.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 144.534.245.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 132.264.143.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 132.264.143.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan



Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indro Purwoko

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifqi Adrian Kriswanto
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Indro Purwoko
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi

Rifqi Adrian Kriswanto
NIP. 19720429 199803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 23.086.115.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 23.086.115.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

Palembang, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi


Rifqi Adrian Kriswanto
NIP. 19720429 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifqi Adrian Kriswanto
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi

Rifqi Adrian Kriswanto
NIP. 19720429 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herdaus
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Indro Purwoko
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

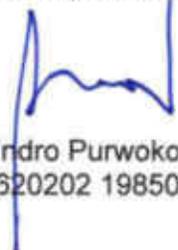
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian


Herdaus
NIP. 19690111 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 962.973.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 962.973.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

Palembang, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian


Herdaus
NIP. 19690111 199103 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herdaus

Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 06 Januari 2022

Kepala Divisi Keimigrasian

Herdaus

NIP. 19690111 199103 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dadi Mulyadi
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Indro Purwoko
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

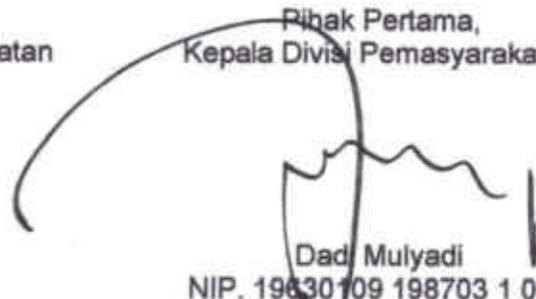
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan


Dadi Mulyadi
NIP. 19630709 198703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	50
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengertasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak	80%

		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.151.828.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.151.828.000,-

Palembang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasarakatan

Dadi Mulyadi
NIP. 19630109 198703 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dadi Mulyadi
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 03 Januari 2022

Kepala Divisi Pemasyarakatan


Dadi Mulyadi
NIP. 19630109 198703 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siar Hasoloan Tamba
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Indro Purwoko
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

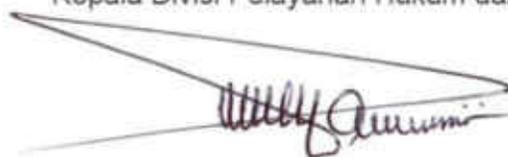
Palembang, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



Siar Hasoloan Tamba
NIP. 19621221 198903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	86 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.298.000.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.298.000.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	27 Permohonan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.133.102.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.133.102.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	23 Orang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	peraturan perundang-undangan		

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 315.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 315.000.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	4. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		5. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 135.197.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 135.197.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.541.670.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.541.670.000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota Daerah memenuhi HAM.	40,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 205,710,000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 205,710,000,-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

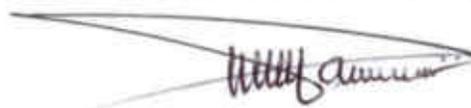
Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 214.073.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 214.073.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Indro Purwoko
NIP. 19620202 198502 1 001

Palembang, 06 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



Siar Hasoloan Tamba
NIP. 19621221 198903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siar Hasoloan Tamba
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Siar Hasoloan Tamba
NIP. 19621221 198903 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Telepon (0711) 355386-358433 Faksimili (0711) 378384
Laman : <http://sumsel.kemenkumham.go.id>

Nomor : W.6.PR.03-0254

5 Desember 2022

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

Yth. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
di Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun LKIP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. LKIP dibuat berdasarkan **Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022** (Januari sampai dengan akhir Desember 2022).
3. Menyajikan LKIP dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan data dukung seperti realisasi anggaran, pencapaian yang telah diperoleh, penghargaan yang telah diterima, SK Tim Penyusun LKIP, dan foto dokumentasi kegiatan.
4. Laporan Kinerja Satuan Kerja (UPT) disampaikan kepada Kepala Divisi masing-masing dan ditembuskan kepada Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah **paling lambat tanggal 4 Januari 2023**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,



Idris

NIP 197312101998051001

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (sebagai laporan).

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN**

NOTA DINAS
NOMOR W.6-PR.03-0255

Yth : 1. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
4. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
5. Kepala Bagian Program dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Dari : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Hal : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

Tanggal : 5 Desember 2022

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini dengan hormat dimohon bantuan Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun LKIP Tahun 2022 masing-masing Kepala Divisi sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. LKIP Kepala Divisi dibuat berdasarkan **Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022** (Januari sampai dengan akhir Desember 2022).
3. Menyajikan LKIP dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan data dukung seperti realisasi anggaran, pencapaian yang telah diperoleh, penghargaan yang telah diterima, SK Tim Penyusun LKIP, dan foto dokumentasi kegiatan.
4. Laporan Kinerja Kepala Divisi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Administrasi **paling lambat tanggal 6 Januari 2023** melalui aplikasi Sisumaker dan email: ppkanwilsumsel@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Idris
NIP 197204291998031001

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN
NOMOR: W.6-PR.03-0107 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud tercapainya tata kelolaan pemerintah yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menghimpun data Laporan Kinerja dari masing-masing Divisi;
 2. Melakukan Koordinasi dengan masing-masing Divisi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja;
 3. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
 4. Menyampaikan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
- KETIGA : Biaya yang timbul berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan berlaku dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 1 April 2022

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Harun Sulianto

NIP 196504081987031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
Nomor : W-6.PR.03-0107 Tahun 2022
Tanggal : 1 April 2022

- Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
- Pengarah : 1 Kepala Divisi Administrasi
2 Kepala Divisi Pemasyarakatan
3 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
4 Kepala Divisi Keimigrasian
- Ketua : Kepala Bagian Program dan Humas
- Sekretaris : Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
2. Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga
3. Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN
4. Kepala Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
5. Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
6. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
7. Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
8. Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian
9. Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian
10. Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian
11. Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian
12. Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
13. Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
14. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
15. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
16. Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM
17. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
18. Ameylia Kurnyanti
19. Willi Anugrah
20. Fransisca
21. A. Jefriansyah Corrie
22. Ahmad Iqbal Morgan
23. Purna Yudha Rujito
24. Eduar Agustin

25. Sawalludin
26. Ihsania Amalia
27. Beta Mentari
28. Lydia Sari
29. Al-Firdaus Abu Kamal
30. KMS. Muhammad Febriansyah Mustofa
31. Angga Rakisma Putra
32. Muhammad Anis Kurniawan
33. Septiana Ferianti
34. Ashari Hidayat
35. Chairina Indoman



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Harun Sulianto

NIP 196504081987031002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN
DIVISI ADMINISTRASI
BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

22 Maret 2021

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

KEPALA KANTOR WILAYAH

Indro Purwoko, S.H., M.H.
NIP 19620202 198502 1 001

NAMA SOP :

PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik
3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan

KETERKAITAN:

1. SOP Penomoran Surat
2. SOP Pengiriman Surat
3. SOP Permintaan Data Kinerja
4. SOP Penyusunan Laporan Kinerja
5. SOP Penyusunan Laporan Kinerja

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Disposisi
4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik

PERINGATAN :

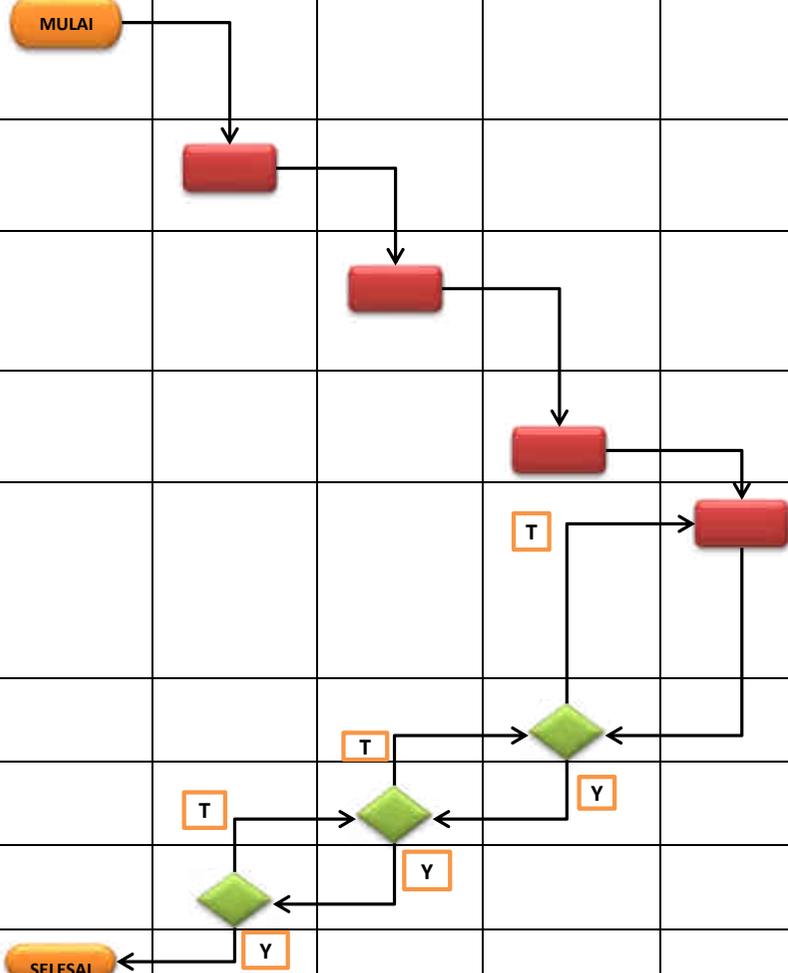
Permintaan data laporan target kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan kinerja

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasubbag Program dan Pelaporan	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Kantor Wilayah memerintahkan Kepala Divisi Administrasi untuk menyusun konsep laporan kinerja Kantor Wilayah	MULAI					instruksi	15 menit	disposisi	
2	Memberikan disposisi kepada Kabag Program dan Humas untuk menyiapkan konsep laporan kinerja Kantor Wilayah						instruksi	15 menit	disposisi	
3	Memberikan disposisi kepada Kasubbag Program dan Pelaporan untuk memfasilitasi pengumpulan data dan menyiapkan konsep laporan kinerja Kantor Wilayah						instruksi	15 menit	disposisi	
4	Memberikan arahan kepada JFU/JFT untuk menghimpun data kinerja dan membuat konsep laporan kinerja						instruksi	30 menit	disposisi	
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari setiap divisi, kemudian memverifikasi, mengolah, dan membuat draf laporan kinerja Kantor Wilayah dan menyerahkannya kepada Kasubbag						instruksi	5 hari	draf laporan kinerja	
6	Mengoreksi draf laporan kinerja dan menyerahkannya kepada Kabag Program dan Humas						instruksi	3 hari	draf laporan kinerja	
7	Mengoreksi draf laporan kinerja dan mengirimkannya kepada Kadivmin						draf laporan kinerja	1 hari	draf laporan kinerja	
8	Mengoreksi draf laporan kinerja dan mengirimkannya kepada Kakanwil						draf laporan kinerja	2 hari	draf laporan kinerja	
9	Menyetujui dan menandatangani laporan kinerja	SELESAI					draf laporan kinerja	3 hari	Laporan kinerja	





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN
DIVISI ADMINISTRASI
BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	22 Maret 2022
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH  HARUN SULIANTO 19650408 198703 1 002
NAMA SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer2. Memahami pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Permintaan Data LKIP2. SOP Permintaan Data Laporan Target Kinerja3. SOP Penyusunan Laporan Target Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Jaringan Internet3. Disposisi4. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Permintaan data laporan capaian kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan capaian kinerja secara menyeluruh	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

No	Kegiatan	PELAKSANA					Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasubbag Program dan Pelaporan	Pelaksana				
1	Memberikan disposisi kepada Kepala Divisi Administrasi untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	MULAI					Surat Sekretaris Jenderal	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	
2	Memberikan disposisi kepada Kepala Bagian PPL untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kadivmin	
3	Memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bagian Humas dan Pelaporan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kadivmin	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kabag Program dan Humas	
4	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk mengumpulkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kabag Program dan Humas	30 menit	Arahan Penyusunan Laporan oleh Kasubbag Humas dan Laporan	
5	Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Arahan Penyusunan Laporan oleh Kasubbag Program dan Pelaporan	1 Minggu	Konsep Laporan	Konsep Laporan dilengkapi dengan Nota dinas berjenjang dan surat pengantar laporan
6	Mengoreksi konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kabag Program dan Humas						Konsep Laporan	30 menit	Konsep Laporan yang sudah di Setujui oleh Kasubbag Humas dan Laporan	
7	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kepala Divisi Administrasi						Konsep Laporan yang sudah di Setujui oleh Kasubbag Program dan Pelaporan	30 menit	Laporan yang sudah di Setujui oleh Kabag Program dan Humas	
8	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Wilayah						Laporan yang sudah di Setujui oleh Kabag Program dan Humas	30 menit	Laporan yang sudah di Setujui oleh Kepala Divisi Administrasi	
9	Menyetujui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan memerintahkan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal	SELESAI					Laporan yang sudah di Setujui oleh Kepala Divisi Administrasi	30 menit	LAKIP yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Wilayah	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat